

**ANALISIS POTENSI EKONOMI  
KABUPATEN DAN KOTA  
DI PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**Program Studi  
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan**



**TESIS  
untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2**

**Program Studi  
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan**

**Oleh  
Nudiatulhuda Mangun  
C4B 005 115**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**Mei  
2007**

**TESIS**  
**ANALISIS POTENSI EKONOMI**  
**KABUPATEN DAN KOTA**  
**DI PROPINSI SULAWESI TENGAH**

Disusun Oleh

Nudiatulhuda Mangun  
C4B 005 115

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 25 Mei 2007  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Penguji

Dr. Dwisetia Poerwono.,MSc.

1. Prof.Dr.Miyasto

Pembimbing Pendamping

2. Drs.Bagio Mudakir, MT

Drs.R. Mulyo Hendarto, MSP

3. Drs. Maruto Umar Basuki, MSi

Telah dinyatakan lulus Program Studi  
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Tanggal .....  
Ketua Program Studi

Dr. Dwisetia Poerwono.,MSc.

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Mei 2007-05-08

Nudiatulhuda Mangun

## *Halaman Persembahan*

Salah satu yang dipertanyakan  
sebelum kedua telapak kaki seseorang menetap dihari kiamat  
adalah : " Tentang ilmu yang dimilikinya, apasaja yang ia amalkan  
dengan ilmunya itu "

*( H-R Buhari-Muslim ).*

" Pelajarilah Ilmu "

Barang siapa yang mempelajarinya karena Allah, itu Taqwa

Menuntutnya, itu Ibadah

Membahasnya, itu Jihad

Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu, itu Sedekah

Memberikannya kepada ahlinya, itu mendekatkan diri kpd. Allah.

*(Abusy Syaikh Ibnu Hibban & Ibnu Abdil Barr, Ilya Al-Ghozali, 1986)*

*Untuk:*

*Para Birokrat*

*Orangtuaku : H. Jahya Mangun & Hj. ST.Nuriah Anshari*

*Mertuaku: H. Soeparlan & Hj. Asrania*

*Suami tercinta : Eko Jokolelono, SE, MSi*

*Buah Hatiku Tersayang:*

*Rizki Ayuning Ekoputri*

*M. Fajri Dwi Anugerah*

*M. Syauqi Tri Pascananda*

*M. Ghifari Catur Mubaraq*

## ABSTRAKSI

Studi ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena potensi ekonomi unggulan serta klasifikasi daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah belum teridentifikasi dan

dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan pembangunan. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sektor-sektor basis/unggulan, yang mempunyai daya saing kompetitif dan spesialisasi di masing-masing Kabupaten/Kota, menentukan tipologi daerah dan prioritas sektor basis guna pengembangan pembangunan Kabupaten/Kota.

Data yang terpakai dalam penelitian ini adalah data sekunder kurun waktu tahun 2000-2005 bersumber dari BPS Propinsi, BPS Kabupaten/Kota, serta Bapeda Prop. Sulawesi Tengah. Model analisis yang digunakan yakni Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi Klassen serta Model Rasio Pertumbuhan (MRP).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kabupaten/Kota mempunyai potensi masing-masing sesuai dengan kondisinya namun sektor Pertanian masih merupakan sektor basis yang dominan di Propinsi Sulawesi Tengah karena 9 Kabupatennya mempunyai basis/unggulan di sektor ini; sedangkan sektor lainnya bervariasi khusus sektor Pertambangan dan industri Pengolahan hanya dimiliki Kota Palu sekaligus sebagai kota yang paling banyak memiliki sektor basis ( 8 Sektor basis).

Tidak satupun Kabupaten/Kota yang masuk kriteria pertama yakni notasi overlay ketiga komponen bertanda positif (+++), sebaliknya terdapat 4 Kabupaten yang memiliki sektor ekonomi yang bernotasi negatif untuk ketiga komponen (---) dengan sektor yang sama. Demikian pula hasil analisis Shift – Share menunjukkan bahwa tidak terdapat sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif di semua Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah, tetapi memiliki spesialisasi. Sektor Listrik, Gas, Air Bersih dan sektor Perdagangan, Hotel, Restoran dan sektor jasa-jasa mempunyai spesialisasi di 6 Kabupaten/Kota; Sektor Industri Pengolahan; Pengangkutan Komunikasi dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5 Kabupaten/Kota ; Sektor Pertanian; sektor Pertambangan Penggalian 4 Kabupaten/Kota.

Di Propinsi Sulawesi Tengah tidak ada Kabupaten/Kota masuk Tipologi daerah cepat maju dan cepat tumbuh dan Tipologi daerah berkembang cepat. Tiga Kabupaten/Kota masuk Tipologi daerah maju tapi tertekan dan 7 Kabupaten masuk Tipologi daerah tertinggal. Dari hasil analisis LQ, Shift-Share, Tipologi daerah dan pertumbuhan sektoral, dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas pengembangan sektor-sektor unggulan yang dimiliki. Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai prioritas pertama untuk pengembangan wilayah semua sektor basis yang dimilikinya.

## ABSTRACT

This study of background overshadow by existence of pre-eminent economic potency phenomenon and also area classification of regency/Town in Province of Central Sulawesi not yet been identified to be exploited in an optimal for the development of development. Aim to know and analyse bases sector/pre-eminent, which have competitiveness of competitive and specialization each regency/town, determining typology area and bases sector priority utilize development of development of Regency / Town in Province of Central Sulawesi.

Used data in this research is data of secondary range of time in 2000 -2005 stemming from BPS Province of Central Sulawesi, BPS Regency / Town in Province of Central Sulawesi, and also Bapeda Province of Central Sulawesi. Analysis model that used each Analysis of LQ, Shift-Share, Typology Klassen and also MRP.

The result of this research conclude that Agricultural Sector still represent dominant bases sector because its 9 regency have bases / pre-eminent in this sector; Processing industrial sector 6 regency; Sector of Trade, Hotel,Restorant 4 regency; Sector Transportation, Telecommunication; Sector of Finances, Rental, Company Service 3 regency; Sector of Electric, Gas, Clean Water; Building Sector and Services Sector 2 regency; while mining sector and Processing industry only owned by Palu Town at the same time as town which at most owning bases sector ( 8 bases sector )

No one Regency / Town which enter first criterion namely notation of overly third of component have positive sign ( +++ ), on the contrary there are 4 Regency owning economic sector which have negative notation to third component ( --- ) with same sector. That way also result of analysis of Shift-Share indicate that there aren't sector having excellence of competitive in all Regency/Town in Province of Central Sulawesi, but owning specialization. Sector of Electric,Gas, Clean Water and Sector of Trade, Hotel, Restaurant and Services sector have specialization in 6 Regency / Town; Processing Industrial sector; Transportation, Communication and sector of Finance, Rental and Company Service 5 Regency / Town; Agricultural Sector; Mining Digging Sector 4 Regency/Town.

Determination of Area Typology there no Regency/Town enter area Typologi quickly go forward and grow and area Typology expand quickly. Three Regency/Town enter area Typology go forward but depress and 7 Regency enter Typology left behind area. From result of analysis of LQ, Shift-Share, area Typology and Sectoral growth, can be determined by Regency/Town becoming priority development of pre-eminent sectors which owned. Regency of Tojo Una-Una have first priority for the development of region all bases sector.

## Kata Pengantar

Limpahan Rahmat dan Ridho dari Allah SWT. yang senantiasa tercurah bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi S2 pada Program Magister Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan (MIESP) Undip; Atas segalanya penulis bersyukur dan senantiasa memuji Keagungan - Mu.

Sebuah karya sulit dikatakan sebagai usaha satu orang, tanpa bantuan orang lain. Demikian pula dengan penelitian ini, tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dorongan, bantuan dan kritik membangun dari berbagai pihak, olehnya dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih.

Terima kasih paling khusus kami persembahkan kepada :

1. Bapak Dr. Dwisetia Poerwono, MSc, selaku Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan (MIESP) Undip, sekaligus sebagai pembimbing utama, yang telah dengan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktu dalam membimbing serta memberikan dorongan semangat sehingga penulisan ini terselesaikan.
2. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP; selaku pembimbing kedua, yang telah meluangkan waktu serta selalu berkenan memberikan pencerahan dalam menghadapi kesulitan, sehingga mempercepat terselesaikannya penulisan tesis ini.
3. Bapak-Ibu Dosen pada Program Magister Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan (MIESP) Undip yang telah memberikan pencerahan dan tambahan pengetahuan serta Bapak-Bapak Tim Penguji yang telah memberikan arahan demi sempurnanya karya ilmiah penulis.
4. Bapak H. Sahabuddin Mustapa, SE, MSi; Rektor Universitas Tadulako yang telah memberikan izin dan peluang serta motivasi bagi penulis untuk melanjutkan studi.
5. Kedua orangtuaku dan Kakak-Adik-adikku, Mertua dan Adik-adik iparku; Iringan Do'a dan bantuan moril maupun materil dari kalian semua, sehingga tugas dan beban dalam penyelesaian studi dapat teratasi.

6. Suami dan anak-anakku, yang telah memberikan motivasi dan inspirasi serta kesabaran dan pengertian dari kalian semua telah memacu semangat sehingga segala tugas dapat terselesaikan.
7. Teman-teman angkatan XI MIESP Undip; Warsana, Daryadi, Maltuf, Zainal, Iyus dan Lasmiatun semoga kebersamaan kita terpatri abadi dalam hati, Staf administrasi; Mbak Tanti, Indri, Inggga, mas Muji dan mas Condro serta Mas Koko Cs di Lab. Planologi Undip.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga dibutuhkan kritik tanggapan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Akhirnya, segala kesalahan dan kekurangan adalah tanggung jawab penulis, namun apabila terdapat kebenaran, semuanya karena petunjuk, tuntunan dan Ridho Allah Sang Pencipta.

Semoga karya ini dapat bermanfaat . Amin.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I      PENDAHULUAN	1
1.1     Latar Belakang	1
1.2     Rumusan Masalah	12
1.3     Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.3.1    Tujuan Penelitian	13
1.3.2    Manfaat Penelitian	13
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	14
2.1     Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	14
2.2     Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	18
2.3     Sektor Potensial Dalam Pengembangan Wilayah	19
2.4     Teori Basis Ekonomi	21
2.5     Analisis Shift – Share	25
2.6     Tipologi Ekonomi Regional	30
2.7     Model Rasio Pertumbuhan ( MRP )	32
2.8     Sistim Informasi Geografi ( SIG )	34
2.9     Penelitian Terdahulu	35
2.10    Kerangka Pemikiran Teoritis	37
BAB III    METODE PENELITIAN	40
3.1.    Definisi Operasional Variabel	40
a.    Potensi Ekonomi	40
b.    Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	40
c.    Pertumbuhan Ekonomi	40
d.    Pendapatan Perkapita	41
e.    Sektor-Sektor Ekonomi	41
f.    Kegiatan Ekonomi	41
3.2    Jenis dan Sumber Data	41
3.3    Metode Pengumpulan Data	42
3.4    Metode Analisis	43

	3.4.1	Metode Location Quatient (LQ)	43
	3.4.2	Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	43
	3.4.3	Metode Analisis Shift-Share	46
	3.4.4	Penentuan Tipologi Daerah	48
	3.4.5	Menentukan Prioritas Sektor Basis untuk Pengembangan	49
	3.4.6	Metode SIG untuk Pemetaan	50
<b>BAB</b>	<b>IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN</b>	<b>51</b>
	4.1	Pembentukan Propinsi Sulawesi Tengah	51
	4.2	Letak Geografis	52
	4.3	Demografi	55
	4.4	Kondisi Perekonomian Propinsi Sulawesi Tengah	56
<b>BAB</b>	<b>V</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>61</b>
	5.1	Sektor-Sektor Basis di Masing-masing Kabupaten/Kota	61
	5.1.1	Sektor Pertanian	62
	5.1.2	Sektor Pertambangan dan Penggalian	64
	5.1.3	Sektor Industri Pengolahan	65
	5.1.4	Sektor Listrik dan Air Bersih	66
	5.1.5	Sektor Bangunan	67
	5.1.6	Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	68
	5.1.7	Sektor Pengangkutan Dan Komunikasi	69
	5.1.8	Sektor Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	70
	5.1.9	Sektor Jasa – Jasa	71
	5.2.	Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	74
	5.2.1	Analisis MRP Kabupaten Banggai Kepulauan	75
	5.2.2	Analisis MRP Kabupaten Banggai	76
	5.2.3	Analisis MRP Kabupaten Morowali	77
	5.2.4	Analisis MRP Kabupaten Poso	78
	5.2.5	Analisis MRP Kabupaten Donggala	79
	5.2.6	Analisis MRP Kabupaten Toli-Toli	80
	5.2.7	Analisis MRP Kabupaten Buol	81
	5.2.8	Analisis MRP Kabupaten Parigi Moutong	82
	5.2.9	Analisis MRP Kabupaten Tojo Una – Una	83
	5.2.10	Analisis MRP Kota Palu	84
	5.3	Hasil Analisis Shift-Share Tentang Keunggulan Komparatif dan Spesialisasi	87
	5.4	Analisis Tipologi Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah	90
	5.5	Prioritas Wilayah Untuk Pengembangan Pembangunan	93
	5.5.1	Prioritas Sektor Pertanian	93
	5.5.2	Prioritas Sektor Pertambangan dan Penggalian	94
	5.5.3	Prioritas Sektor Industri Pengolahan	94
	5.5.4	Prioritas Sektor Listrik dan Air Bersih	95
	5.5.5	Prioritas Sektor Bangunan	95
	5.5.6	Prioritas Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	96

	5.5.7	Prioritas Sektor Pengangkutan Dan Komunikasi	97
	5.5.8	Prioritas Sektor Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	97
	5.5.9	Sektor Jasa – Jasa	98
	5.6	Pemetaan Potensi Ekonomi Propinsi Sulawesi Tengah	100
BAB	VI	PENUTUP	116
	6.1	Kesimpulan	116
	6.2	Saran - Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

## DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	1.1	Perbandingan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Propinsi se Sulawesi Tahun 2003	4
Tabel	1.2	Perbandingan PDRB, PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi se Sulawesi Tahun 1999 dan 2003 atas dasar harga konstan 1993	5
Tabel	1.3	Proyek-proyek PMDN dan Proyek-Proyek PMA yang disetujui Pemerintah menurut sektor ekonomi	6
Tabel	1.4	Volume Ekspor menurut Pelabuhan penting di Sulawesi	6
Tabel	1.5	Luas Hutan menurut Kabupaten/Kota dan Fungsinya Tahun 2004	6
Tabel	1.6	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000-2004	10
Tabel	2.1	Tipologi Daerah	31
Tabel	2.2	Prosedur dan Aktivitas Utama dalam SIG	35
Tabel	2.3	Penelitian-Penelitian Terdahulu Tahun 2000 – 2003	36
Tabel	4.1	Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006	53
Tabel	4.2	Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2003 – 2005	55
Tabel	4.3	Struktur Ekonomi Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001-2005	57
Tabel	4.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sulawesi Tengah	58
Tabel	4.5	PDRB, PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten / Kota Atas Dasar Harga Konstan 2000 Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005	59
Tabel	5.1	Hasil Perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota untuk Sektor Pertanian Tahun 2000 – 2005	63
Tabel	5.2	Hasil Perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2000 – 2005	65
Tabel	5.3	Hasil Perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota untuk Sektor Industri Pengolahan Tahun 2000 – 2005	66
Tabel	5.4	Hasil Perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota untuk Sektor Listrik dan Air Bersih Tahun 2000 – 2005	67
Tabel	5.5	Hasil Perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota untuk Sektor Bangunan Tahun 2000 – 2005	68
Tabel	5.6	Hasil Perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Tahun 2000 – 2005	69
Tabel	5.7	Hasil Perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota untuk Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Tahun 2000 – 2005	70
Tabel	5.8	Hasil Perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota untuk Sektor Keuangan, Persewaan, jasa Perusahaan Tahun 2000 – 2005	70

Tabel	5.9	Hasil Perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota untuk Sektor Jasa-Jasa Tahun 2000 – 2005	71
Tabel	5.10	Hasil Kompilasi Analisis LQ di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000 – 2005	73
Tabel	5.11	Overlay RPR, RPS dan LQ Perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan	76
Tabel	5.12	Overlay RPR, RPS dan LQ Perekonomian Kabupaten Banggai	77
Tabel	5.13	Overlay RPR, RPS dan LQ Perekonomian Kabupaten Morowali	78
Tabel	5.14	Overlay RPR, RPS dan LQ Perekonomian Kabupaten Poso	79
Tabel	5.15	Overlay RPR, RPS dan LQ Perekonomian Kabupaten Donggala	80
Tabel	5.16	Overlay RPR, RPS dan LQ Perekonomian Kabupaten Toli-Toli	81
Tabel	5.17	Overlay RPR, RPS dan LQ Perekonomian Kabupaten Buol	82
Tabel	5.18	Overlay RPR, RPS dan LQ Perekonomian Kabupaten Parigi Moutong	83
Tabel	5.19	Overlay RPR, RPS dan LQ Perekonomian Kabupaten Tojo Una - Una	84
Tabel	5.20	Overlay RPR, RPS dan LQ Perekonomian Kota Palu	85
Tabel	5.21	Hasil Analisis Shift-Share tentang keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi menurut sektor di Kabupaten/Kota Pripinsi Sulawesi Tengah	89
Tabel	5.22	Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah Periode 2000-2005	92
Tabel	5.23	Prioritas Untuk Sektor Pertanian dilihat dari Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuha Sektoral	93
Tabel	5.24	Prioritas Untuk Sektor Industri Pengolahan dilihat dari Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral	94
Tabel	5.25	Prioritas Untuk Sektor Listrik,Gas dan Air Bersih dilihat dari Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral	95
Tabel	5.26	Prioritas Untuk Sektor Bangunan dilihat dari Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral	96
Tabel	5.27	Prioritas Untuk Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran dilihat dari Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral	96
Tabel	5.28	Prioritas Untuk Sektor Angkutan dan Komunikasi dilihat dari Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral	97
Tabel	5.29	Prioritas Untuk Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan dilihat Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral	98
Tabel	5.30	Prioritas Untuk Sektor Jasa - Jasa dilihat dari Analisis LQ,Shift-Share,Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral	98
Tabel	5.31	Prioritas Pengembangan Pembangunan Sektor Basis di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000-2005	99
Tabel	5.32	Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000 - 2005	101
Tabel	5.33	Realisasi Pembangunan/Belanja Operasi Pemeliharaan dan Belanja Modal Propinsi Sulawesi Tengah T.A 2001 s/d 2005	114

Tabel 5.34 Alokasi Belanja Pembangunan/Belanja Operasi Pemeliharaan dan Belanja Modal Propinsi Sulawesi Tengah T.A 2001-2005 115

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Teoritis	39
Gambar 3.1 Skema Tipologi Daerah Menurut Klassen	49
Gambar 4.1 Peta Pulau Sulawesi	54
Gambar 5.1 Skema Tipologi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah	90
Gambar 5.2 Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Pertanian	101
Gambar 5.3 Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Pertambangan dan Peggalian	103
Gambar 5.4 Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	105
Gambar 5.5 Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Listrik dan Air Minum	107
Gambar 5.6 Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Bangunan	109
Gambar 5.7 Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	111
Gambar 5.8 Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	113
Gambar 5.9 Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	115
Gambar 5.10 Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Jasa - Jasa	117

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten / Kota Tahun 2000-2005	121
Lampiran 2 Hasil Perhitungan LQ Per Kabupaten / Kota Tahun 2000-2005	132
Lampiran 3 Hasil Perhitungan RPs dan RPr Kabupaten / Kota Tahun 2000-2005	135
Lampiran 4 Hasil Analisis Shift-Share Model Estaban Marquillas Per Kabupaten / Kota	141
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup Penulis	151

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional di negara-negara berkembang pada umumnya, terfokus pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur antara lain melalui Produk Domestik Bruto ( PDB ) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) pada tingkat daerah baik Propinsi, Kabupaten maupun Kota.

Pelaksanaan pembangunan Indonesia selama ini juga tidak terlepas dari pandangan tersebut. Pembangunan nasional mempunyai dampak atas pembangunan daerah, sebab daerah adalah bagian integral dari suatu negara. Indonesia sebagai suatu negara kesatuan, rencana pembangunannya meliputi rencana pembangunan nasional maupun rencana pembangunan dalam tataran regional. Pembangunan ekonomi nasional mempunyai dampak atas struktur ekonomi nasional dan struktur ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan (Soeparmoko, 2002). Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisien. Dalam penentuan kebijakan, haruslah

memperhitungkan kondisi internal maupun perkembangan eksternal. Perbedaan kondisi internal dan eksternal hanyalah pada jangkauan wilayah, dimana kondisi internal meliputi wilayah daerah/regional, sedangkan kondisi eksternal meliputi wilayah nasional. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah akan bertanggung jawab secara lebih penuh terhadap kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana, kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumberdaya manusia.

Sejak era reformasi tahun 1999 terjadi pergeseran paradigma dalam sistim penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi atau disebut Otonomi daerah yang mengandung makna, beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah (Armida, 2000). Hal ini membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain dibidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut .

John Glasson (1990) mengatakan bahwa kemakmuran suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonominya dan faktor ini merupakan faktor utama. Perubahan wilayah kepada kondisi yang lebih makmur tergantung pada usaha-usaha di daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa, serta usaha-usaha pembangunan yang diperlukan. Oleh sebab itu maka kegiatan basis mempunyai peranan penggerak utama (*prime mover role*) dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional. Berdasarkan teori basis ekonomi, faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad,1999). Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*). Dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat karena disetiap daerah mempunyai keadaan yang berbeda, mempunyai karakteristik tersendiri, laju pertumbuhan ekonomi maupun potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Daerah Sulawesi Tengah sebagai salah satu propinsi yang ada di pulau Sulawesi, merupakan propinsi terbesar di pulau Sulawesi ditinjau dari segi luas wilayah, Sulawesi Tengah mempunyai luas wilayah sebesar 63.678 km<sup>2</sup> sedangkan propinsi Sulawesi Selatan hanya sebesar 62.365 km<sup>2</sup>, Propinsi Sulawesi Utara mempunyai luas wilayah sebesar 15.273 km<sup>2</sup> dan Propinsi Sulawesi Tenggara sebesar 38.140 km<sup>2</sup>. Namun demikian dengan luas wilayah yang relatif besar serta jumlah penduduk yang tidak berbeda jauh dengan propinsi lain di Sulawesi yaitu jumlah penduduk sebesar 2.221 jiwa

diatas Propinsi Sulawesi Utara sebanyak 2.136 jiwa dan Sulawesi Tenggara sebanyak 1.887 jiwa, seperti terlihat dalam Tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Perbandingan luas wilayah dan jumlah penduduk**  
**Provinsi se Sulawesi Tahun 2003**

No.	Wilayah	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Sulawesi Tengah	63.678	2.221
2.	Sulawesi Selatan	62.365	8.253
3.	Sulawesi Tenggara	38.140	1.887
4.	Sulawesi Utara	15.273	2.136

Sumber data : BPS – Statistik Indonesia 2003

Propinsi Sulawesi Tengah mempunyai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang relatif rendah yakni hanya sebesar Rp. 2.287.380, pada tahun 1999 dan tahun 2003 sebesar Rp.2.643.128,- atau berada diurutan 3 atau dibawah Propinsi Sulawesi Selatan dengan PDRBnya sebesar Rp. 11.092.996,- tahun 2003 dan Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 3.490.692,- pada tahun 2003. Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sebesar 4,14 % sama dengan Propinsi Sulawesi Tenggara dan berada diatas Propinsi lainnya, tidak termasuk Gorontalo dan Sulawesi Barat yang baru dimekarkan, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.2.

**Tabel 1.2.**  
**Perbandingan PDRB , PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan ekonomi**  
**Propinsi se Sulawesi tahun 1999 dan 2003 atas dasar harga konstan 1993**

No	Wilayah	PDRB Thn 1999 ( juta Rp )	PDRB Thn.2003 ( juta Rp )	PDRB/kap Thn.2003 ( juta Rp )	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Sulawesi Utara	3.889.665	3.490.692	6.102,2	2,74
2.	Sulawesi Tengah	2.287.380	2.643.128	5.257,4	4,14
3.	Sulawesi Selatan	9.631.076	11.092.996	4.772,0	3,47
4.	Sulawesi Tenggara	1.588.457	1.880970	4.461,9	4,14

Sumber Data : BPS- Statistik Indonesia 2003

Pada sisi lain selang waktu tahun 2003 sampai tahun 2005 Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun proyek Penanaman Modal Asing (PMA) yang disetujui Pemerintah menurut sektor ekonomi sangat kecil jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada tahun 2003 hanya mendapatkan 1 proyek untuk PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp.217,7 milyar, sedangkan untuk provinsi lain; Sulawesi Selatan sebanyak 9, Sulawesi Tenggara 3 dan Sulawesi Utara sebanyak 4 proyek untuk PMDN dengan nilai investasi masing-masing sebesar Rp.29.239,8 milyar Rp. 167,2 milyar dan Rp.142,15 milyar, untuk proyek PMA ditahun 2003 sampai 2005 tidak mendapatkan proyek, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1.3**  
**Proyek-Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Proyek-Proyek Penanaman**  
**Modal Asing PMA Yang Disetujui Pemerintah Menurut sektor Ekonomi**  
**(Miliar rupiah)**

Provinsi di Sulawesi	2003		2004		2005		
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	
Sultra:	PMDN	4	143.3	3	374.5	2	440.0
	PMA	9	49.9	6	50.0	8	16.5
Tengah:	PMDN	1	217.7	2	1.179.4	0	75.0
	PMA	-	131.4	-	0.5	-	0.0
Tenggara:	PMDN	3	167.2	7	646.1	2	711.8
	PMA	10	210.1	1	1.0	1	34.2
Selatan:	PMDN	9	29.239.8	1	393.0	-	0.0
	PMA	-	-	8	226.1	1	2.9
Gorontalo:	PMDN	-	-	1	0.7	-	0.0
	PMA	1	0.1	2	85.6	1	0.1

Sumber:- BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

- Ada angka proyek tanpa investasi = Proyek Pertambangan (kontrak karya), sebaliknya ada angka investasi tanpa proyek = perluasan proyek

Selanjutnya Tabel 1.4 memperlihatkan volume ekspor menurut pelabuhan penting di Sulawesi. Tabel tersebut terlihat bahwa sejak tahun 2003–2004 Sulawesi Tengah dengan pelabuhannya Pantoloan volume ekspornya hanya sebesar 97,4–111,0 ribu meter ton dibandingkan dengan pelabuhan Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) 448,7-418,9 ribu meter ton, Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara) 406,4–501,0 ribu meter ton dan Pelabuhan Pomala (Sulawesi Tenggara) sebesar 648,2 – 621,5 ribu meter ton.

**Tabel 1.4**  
**Volume Ekspor (berat bersih: ribu m.ton) menurut Pelabuhan**  
**Pelabuhan Penting 2003–2004**

Pelabuhan di Sulawesi	2003	2004
Sulawesi Selatan : U.Pandang Malili	448.7	418.9
	31.3	105.5
Sulawesi Tenggara : Pomala'a	648.2	621.5
Sulawesi Tengah : Pantoloan	97.4	110.0
Sulawesi Utara : Bitung	406.4	501.0

Sumber: Statistik Indonesia 2004

Sebuah hasil studi tentang posisi perekonomian Propinsi Kawasan Timur Indonesia menurut tipologi daerah (Mudrajat, 2004) menunjukkan bahwa Propinsi Sulawesi Tengah termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal, sedangkan daerah atau Propinsi lain di Sulawesi yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara berada pada klasifikasi Daerah Berkembang Cepat. Padahal potensi yang dimiliki Propinsi Sulawesi Tengah sangat baik dan dapat dibanggakan khususnya disektor kehutanan dengan berbagai jenis kayu utamanya kayu hitam (*ebony timber*) dan sektor perkebunan yang merupakan komoditi perdagangan dan mempunyai peranan strategis, karena disamping merupakan sumber penghasilan devisa negara, juga mencakup usaha kegiatan produksinya yang dapat membuka lapangan kerja yang luas. Sektor perkebunan yang terdiri dari perkebunan besar dengan tujuh komoditi yang mempunyai luas areal sebesar 55.160 ha dengan 88,40 persen diantaranya untuk tanaman kelapa sawit dan tanaman coklat 8,50 persen sedangkan perkebunan rakyat terdiri dari enam belas komoditi dengan luas areal sebesar 478.604 ha tahun 2004 (BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka 2004). Gambaran potensi kehutanan yaitu luas hutan serta fungsinya di Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam Tabel 1.5 sebagai berikut :

**Tabel 1.5**  
**Luas Hutan Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Propinsi Sulawesi Tengah dan Fungsinya**  
**Tahun 2004 (ha)**

Kabupaten/ Kota	Hutan Lindung	Hutan Produksi Biasa Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Hutan yg.dapat dikonversi	Hutan Suaka Alam dan Wisata	Luas Kawasan Hutan
Kab.Banggai Kepulauan	51.336	38.291	49.691	19.351	-	158.669
Kab. Banggai	169.669	55.526	309.113	52.529	23.726	610.563
Kab. Morowali	436.756	181.366	238.177	61.216	241.331	1.158.846
Kab.Poso	299.170	79.142	271.749	34.157	145.452	829.670
Kab. Donggala	232.995	11.624	294.427	33.296	135.736	708.078
Kab. Tolitoli	55.955	39.999	80.644	1.208	53.698	231.504
Kab. Buol	63.602	60.413	100.341	24.070	9.802	258.228
Kab. Parimo	162.640	22.467	127.607	22.808	60.714	396.236
Kab. Tojo Una- Una	10.659	11.759	193	3.221	-	25.832
Kota Palu	7.141	-	4.376	-	5.789	17.306
<b>Sulawesi Tengah</b>	1.489.923	500.589	1.476.316	251.856	676.248	4.394.932

Sumber : Dinas Kehutanan Prop.Sulawesi Tengah  
 ( BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka 2004)

Konflik sosial pecah di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah pada tahun 1998 dan berkelanjutan hingga tahun 2004. Seiring dengan terjadinya konflik di daerah tersebut jelas mempengaruhi Sulawesi Tengah secara keseluruhan. Indonesia pun dilanda krisis ekonomi dan politik yang mengusung reformasi demokrasi dan ekonomi serta desentralisasi. Ini memiliki implikasi yang besar terhadap ekonomi lokal serta tingkat kesejahteraan masyarakat, karena konflik dapat menimbulkan dampak langsung berupa kematian, kerugian properti dan aset lainnya dan dampak tidak langsung yang berat serta

luas terhadap produksi ekonomi dan perniagaan serta pelayanan (Nudiatulhuda, 2000). Hal ini jelas memperparah kondisi ekonomi daerah meskipun saat ini Sulawesi Tengah berada dalam taraf pemulihan dari adanya konflik yang berkepanjangan. tersebut.

Guna meningkatkan pendapatan daerah pada dewasa ini masing-masing daerah dituntut harus mampu berusaha sendiri untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalian potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi yang tepat adalah jalan terbaik, karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah maka pengembangan pembangunan dan pendapatan daerah tidak akan mencapai hasil yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber kehidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko, 2002).

Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 9 Kabupaten dan 1 Kota dimana tentunya setiap Kabupaten dan Kota masing-masing mempunyai potensi ekonomi yang khas sesuai keadaan daerahnya masing-masing sehingga akan mempunyai PDRB, tingkat pertumbuhan dan prioritas sektoral yang berbeda-beda pula seperti yang terlihat dalam Tabel 1.6. berikut ini.

**Tabel 1.6.**  
**PDRB Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2000**

No	Kabupaten/Kota	PDRB tahun 2000 (Juta Rp)	Persen tase ( % )	PDRB Tahun 2004 (juta Rp)	Persen tase ( % )	Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata ( % )
1.	Kab.Banggai Kepulauan	366.111	4,42	500.313	4,27	6,05
2.	Kab. Banggai	901.545	10,87	1.337.881	11,41	7,55
3.	Kab. Morowali	708.750	8,55	1.021.431	8,71	7,05
4.	Kab. Poso	909.640	10,97	764.782	6,52	3,53
5.	Kab. Donggala	1.688.438	20,37	2.240.776	19,10	5,50
6.	Kab. Toli-Toli	614.642	7,42	922.306	7,86	7,80
7.	Kab. B u o l	305.153	3,68	445.448	3,80	7,29
8.	Kota P a l u	1.576.266	19,02	2.076.360	17,70	5,36
9.	Kab. Tojo Una-Una *)	-	-	344.541	2,94	4,91
10.	Kab. Parimo	1.217.819	14,69	1.914.127	16,32	8,65
	Sulawesi Tengah	8.288.364	100	11.728.617	100	9,35

Sumber Data : BPS - Sulawesi Tengah Dalam Angka 2005

\*) Kabupaten Tojo Una-Una dimekarkan Tahun 2002

Tabel diatas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota tahun 2000–2004 terdapat 2 kabupaten yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi rendah dibandingkan kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una masing-masing sebesar 3,53 % dan 4,91 % .

Hal ini memerlukan perhatian yang cukup serius dari pemerintah meskipun diketahui bahwa untuk kabupaten Poso kemunduran ekonominya lebih dipengaruhi oleh adanya konflik sosial yang bernuansa SARA yang berkepanjangan dan untuk Kabupaten Tojo Una-Una baru saja dimekarkan pada akhir tahun 2002 dari kabupaten induknya Poso. Jadi Kabupaten Poso kurun waktu tahun 2000 – 2002 terjadi pemekaran wilayahnya menjadi Kabupaten Morowali serta Kabupaten Tojo Una-Una, untuk itu

perhatian dan pengembangan pembangunannya perlu direncanakan kembali sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Bagi Kabupaten lain meskipun mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang positif, untuk lebih meningkatkan PDRB agar hasilnya optimum diperlukan pemilihan sektor-sektor yang diprioritaskan sehingga dapat menggunakan potensi ekonomi daerah secara optimal terutama bagi daerah-daerah yang potensi dimilikinya belum dimanfaatkan secara baik. Sektor-sektor yang dapat diunggulkan oleh setiap daerah merupakan sektor basis, punya keunggulan kompetitif serta mempunyai spesialisasi bagi daerah yang bersangkutan.

Kajian mengenai potensi ekonomi berupa sektor-sektor unggulan ini sangat diperlukan untuk perencanaan pengembangan pembangunan yang akan datang terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana terjadinya pemekaran wilayah yang berdampak pada berubahnya potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh wilayah asalnya (wilayah induk).

Dari uraian diatas maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui potensi serta identifikasi sektor-sektor ekonomi daerah Kabupaten dan Kota yang berada dalam wilayah Sulawesi Tengah sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di era otonomi daerah.

## 1.2. Rumusan Masalah

Propinsi Sulawesi Tengah termasuk daerah yang perekonomiannya lebih rendah dibandingkan dengan tiga Propinsi lain yang setara di Sulawesi yakni Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan meskipun lebih unggul sedikit dari Sulawesi Tenggara, yang tercermin dari tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)nya (lihat tabel 1.2). Demikian pula dengan volume ekspornya serta realisasi proyek-proyek baik Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) yang relatif sedikit dibandingkan dengan Propinsi lain di Sulawesi. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan potensi daerah. Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan dikaji adalah :

1. Ditiap kabupaten dan kota di Propinsi Sulawesi Tengah sektor mana yang mempunyai potensi sebagai sektor basis serta yang mempunyai keunggulan kompetitif atau daya saing dan spesialisasi dengan bantuan alat analisis LQ dan shift – share serta Model Rasio Pertumbuhan (MRP)
2. Daerah mana yang dapat digunakan untuk memacu pengembangan pembangunan dengan memanfaatkan alat analisis Tipologi Klassen.
3. Bagaimana penentuan prioritas sektor basis untuk pengembangan pembangunan di Sulawesi Tengah ditiap Kabupaten/kota.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi dan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tengah dengan cara :

1. Mengetahui sektor-sektor basis/unggulan di tiap Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah
2. Mengidentifikasi dan menganalisis kinerja sektor-sektor ekonomi di masing-masing daerah terutama untuk mengetahui sektor-sektor yang mempunyai daya saing kompetitif dan spesialisasi
3. Menganalisis tipologi masing-masing daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya.
4. Menentukan prioritas sektor basis guna pengembangan pembangunan di Sulawesi Tengah umumnya serta Kabupaten dan Kota khususnya.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi, informasi dan pedoman bagi pengambil kebijakan serta peneliti lainnya yang berminat dibidang ini:

1. Memudahkan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah membuat perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan potensi ekonomi dan tipologi yang dimiliki tiap Kabupaten/Kota
2. Sebagai bahan informasi untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Sulawesi Tengah tentang kinerja masing-masing sektor.
3. Menambah referensi tentang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan studi-studi selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS**

#### **2.1 Teori Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah**

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

Istilah pembangunan dapat diartikan berbeda-beda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya bahkan antara negara satu dengan negara lain. Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestic Product (GNP)* atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu Propinsi, Kabupaten atau Kota. Definisi pembangunan tradisional ini sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara menjadi negara industrialisasi. Kontribusi sektor pertanian mulai digantikan dengan kontribusi industri.

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan *dethronement of GNP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengurangan distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Jelasnya bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu

proses yang *multidimensional* (Mudrajat, 2003). Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan daerah dari suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Todaro,2000; Mudrajat, 2000;)

1. Ketahanan (*Sustenance*): Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan,papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri ( *Self Esteem* ): Pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu
3. *Freedom from servitude*: Kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu aspek pembangunan wilayah (regional) adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur. Perubahan struktur ekonomi dapat berupa peralihan dari kegiatan perekonomian ke non-pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produksi, serta perubahan status kerja buruh. Karena itu konsep pembangunan wilayah (regional) sangat tepat bila didukung dengan teori pertumbuhan ekonomi, teori basis ekonomi, pusat pertumbuhan dan teori spesialisasi.

Rahardjo Adisasmita (2005), menyatakan bahwa Pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, tehnologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan,

kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Terdapat pula beberapa teori penting lainnya mengenai pembangunan ekonomi wilayah (regional) diantaranya menurut aliran Klasik yang dipelopori oleh Adam Smith dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Sumbangan pemikiran aliran Neo Klasik tentang teori pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut :

1. Akumulasi modal merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi
2. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang gradual
3. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang harmonis dan kumulatif
4. Aliran Neo Klasik merasa optimis terhadap pertumbuhan (perkembangan).
5. Meskipun model pertumbuhan Neo Klasik ini telah banyak digunakan dalam analisis regional namun terdapat beberapa asumsi mereka yang tidak tepat antara lain, (a). *Full employment* yang terus menerus tidak dapat diterapkan pada sistem multi regional dimana persoalan-persoalan regional timbul disebabkan karena perbedaan-perbedaan geografis dalam hal tingkat penggunaan sumberdaya, dan (b). persaingan sempurna tidak bisa diberlakukan pada perekonomian regional dan spasial.

Selanjutnya Todaro (1997) menyatakan bahwa, terdapat beberapa sumber strategis dan dominan yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Salah satu klasifikasinya adalah faktor fisik dan manajemen. Secara spesifik disebutkan terdapat 3 faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi yaitu, akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak angkatan kerja berarti

semakin produktif, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun ini tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif. Faktor utama lainnya adalah kemajuan teknologi.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Beberapa ahli ekonomi pembangunan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan, dengan rasa aman dan tenteram yang dirasakan masyarakat luas (Lincolyn, 1999).

Perroux yang terkenal dengan teori kutub pertumbuhan menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang bersamaan. Pertumbuhan hanya terjadi dibeberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda (Perroux, 1988 dalam Mudrajat , 2002). Selanjutnya Kuznets (Todaro, 2000), yang telah berjasa dalam memelopori analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju mengemukakan bahwa, pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahapan berikutnya hal itu akan membaik. Observasi inilah yang kemudian terkenal secara luas sebagai konsep kurva U- terbalik dari Kuznets.

Di sisi lain Hoover (1977), menerangkan bahwa teori pertumbuhan regional berbasis ekspor merupakan beberapa aktivitas disuatu daerah adalah *basic*, dengan kata lain pertumbuhannya menimbulkan serta menentukan pembangunan menyeluruh daerah tersebut. Sedangkan aktivitas-aktivitas lain (*non-basic*) merupakan konsekwensi dari

pembangunan menyeluruhnya. Demikian pula menurut Bendavid-Val (1991), menyatakan bahwa semua pertumbuhan regional ditentukan oleh sektor *basic*, sedangkan sektor *non-basic* hanyalah yang mencakup aktivitas pendukung, seperti perdagangan, jasa-jasa perseorangan, produksi *input* untuk produk-produk di sektor *basic*, melayani industri-industri di sektor *basic* maupun pekerja-pekerja beserta keluarganya di sektor *basic*, atau menurut Bachrul (2004), dikatakatan bahwa kegiatan-kegiatan basis adalah kegiatan yang mengekspor barang dan jasa diluar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, sedangkan kegiatan bukan basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Menurut model ini multiplier basis ekonomi dihitung menurut banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan.

## **2.2 Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah**

Potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko, 2002).

Telah diketahui bersama bahwa tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah peningkatan pendapatan riil perkapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha. Dengan mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah, maka strategi pengembangan potensi yang ada akan lebih terarah dan strategi tersebut akan

menjadi pedoman bagi pemerintah daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan usaha di daerah tersebut. Oleh karena itu langkah-langkah berikut dapat dijadikan acuan dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang ada di daerah, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor
2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan serta mencari factor-faktor penyebab rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan.
3. Mengidentifikasi sumberdaya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk sumberdaya manusianya yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan setiap sektor yang bersangkutan.
4. Dengan model pembobotan terhadap variabel - variabel kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan sub-sektor, maka akan ditemukan sektor-sektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
5. Menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan yang diharapkan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya (*self propelling*) secara berkelanjutan (*sustainable development*) .

### **2.3. Sektor Potensial Dalam Pengembangan Wilayah**

Persoalan pokok dalam pembangunan daerah sering terletak pada sumberdaya dan potensi yang dimiliki guna menciptakan peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada kerjasama Pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang tersedia dalam daerah dan diperlukan sebagai kekuatan untuk pembangunan perekonomian wilayah.

Pengembangan wilayah diartikan sebagai semua upaya yang dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan wilayah yang ditandai dengan pemerataan pembangunan dalam semua sektor dan pada seluruh bagian wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara serentak pada semua tempat dan semua sektor perekonomian, tetapi hanya pada titik-titik tertentu dan pada sektor-sektor tertentu pula. Disebutkan juga bahwa investasi diprioritaskan pada sektor-sektor utama yang berpotensi dan dapat meningkatkan pendapatan wilayah dalam jangka waktu relatif singkat (Glasson, 1990). Dari definisi tersebut diatas dimaksudkan bahwa wilayah yang memiliki potensi berkembang lebih besar akan berkembang lebih pesat, kemudian pengembangan wilayah tersebut akan merangsang wilayah sekitarnya. Bagi sektor yang memiliki potensi berkembang lebih besar cenderung dikembangkan lebih awal yang kemudian diikuti oleh perkembangan sektor lain yang kurang potensial.

Dalam pengembangan wilayah, pengembangan tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian akan tetapi diprioritaskan pada pengembangan sektor-sektor perekonomian yang potensi berkembangnya cukup besar. Karena sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat yang akan merangsang sektor-sektor lain yang terkait untuk berkembang mengimbangi perkembangan sektor potensial tersebut. Perkembangan ekonomi suatu wilayah membangun suatu aktivitas perekonomian yang mampu tumbuh dengan pesat dan memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor lain sehingga membentuk *forward linkage* dan *backward linkage*. Pertumbuhan yang cepat dari sektor potensial tersebut akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya yang pada akhirnya secara tidak langsung sektor perekonomian lainnya akan mengalami perkembangan.

Jadi disimpulkan bahwa pengembangan suatu sektor ekonomi potensial dapat menciptakan peluang bagi berkembangnya sektor lain yang terkait, baik sebagai input bagi sektor potensial maupun sebagai imbas dari meningkatnya kebutuhan tenaga kerja sektor potensial yang mengalami peningkatan pendapatan. Hal inilah yang memungkinkan pengembangan sektor potensial dilakukan sebagai langkah awal dalam pengembangan perekonomian wilayah dan pengembangan wilayah secara keseluruhan.

#### **2.4. Teori basis Ekonomi**

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Menurut Glasson (1990) kegiatan-kegiatan Basis (*Basic activities*) adalah kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (*Non basic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang jadi; luas lingkup produksi dan daerah pasar yang terutama bersifat lokal. Implisit didalam pembagian kegiatan-kegiatan ini terdapat hubungan sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi.

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 1977).

Kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama (*Prime mover role*) dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional. Pendekatan secara tidak langsung mengenai pemisahan antara kegiatan basis dan kegiatan bukan basis dapat menggunakan salah satu ataupun gabungan dari tiga metode yaitu :

a. Menggunakan asumsi-asumsi atau metode arbetrer sederhana

Mengasumsikan bahwa semua industri primer dan manufakturing adalah Basis, dan semua industri Jasa adalah bukan basis, metode tidak memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam sesuatu kelompok industri bisa terdapat industri-industri yang menghasilkan barang yang sebagian di ekspor atau dijual kepada lokal atau ke duanya.

b. Metode *Location Quotient* ( LQ ).

Metode *Location Quotient* (LQ) adalah salah satu tehnik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan sektor basis atau non basis (Prasetyo, 2001 : 41-53; Lincolyn, 1997: 290). Analisis LQ dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Dengan dasar pemikiran *economic base* kemampuan suatu sektor dalam suatu daerah dapat dihitung dari rasio berikut :

$$LQ = ( L_{ij}/L_j ) / ( N_{ip}/N_p )$$

Keterangan:

- L<sub>ij</sub> = Nilai tambah sektor i di daerah j (Kabupaten/Kota)
- L<sub>j</sub> = Total nilai tambah sektor di daerah j
- N<sub>ip</sub> = Nilai tambah sektor i di daerah p (Propinsi/ Nasional)
- N<sub>p</sub> = Total nilai tambah sektor di p
- P = Propinsi /Nasional

$L_{ij}/L_j$  = Prosentasi employment regional dalam sektor i  
 $N_{ip}/N_p$  = Prosentase employment nasional dalam sektor i

Atau melalui formulasi berikut:

$$LQ = \frac{V_1^R / V^R}{V_1 / V}$$

Dimana :

$V_1^R$  = Jumlah PDRB suatu sektor kabupaten / kota  
 $V^R$  = Jumlah PDRB seluruh sektor kabupaten/kota  
 $V_1$  = Jumlah PDRB suatu sektor tingkat propinsi  
 $V$  = Jumlah PDRB seluruh sektor tingkat propinsi

Berdasarkan hasil perhitungan LQ tersebut dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut :

- Jika  $LQ > 1$ , merupakan sektor basis, artinya tingkat spesialisasi Kabupaten / kota lebih tinggi dari tingkat propinsi
- Jika  $LQ = 1$ , berarti tingkat spesialisasi kabupaten / kota sama dengan di tingkat propinsi
- Jika  $LQ < 1$ , adalah merupakan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat Spesialisasi kabupaten/kota lebih rendah dari tingkat propinsi.

Penggunaan LQ ini sangat sederhana dan banyak digunakan dalam analisis sektor-sektor basis dalam suatu daerah. Namun teknik ini mempunyai suatu kelemahan karena berasumsi bahwa permintaan disetiap daerah adalah identik dengan pola permintaan nasional, bahwa produktivitas tiap tenaga kerja disetiap daerah sektor regional adalah sama dengan produktivitas tiap tenaga kerja dalam industri nasional, dan bahwa perekonomian nasional merupakan suatu perekonomian tertutup. Sehingga

perlu disadari bahwa: [i] Selera atau pola konsumsi dan anggota masyarakat itu berbeda-beda baik antar daerah maupun dalam suatu daerah. [ii] Tingkat konsumsi rata-rata untuk suatu jenis barang untuk setiap daerah berbeda. [iii] Bahan keperluan industri berbeda antar daerah.

Walaupun teori ini mengandung kelemahan, namun sudah banyak studi empirik yang dilakukan dalam rangka usaha memisahkan sektor-sektor basis - bukan basis. Disamping mempunyai kelemahan, metode ini juga mempunyai dua kebaikan penting, *pertama* ia memperhitungkan ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. *Kedua* metode ini tidak mahal dan dapat diterapkan pada data historik untuk mengetahui trend (Prasetyo, 2001)

- c. Metode ketiga, yakni kebutuhan minimum (*minimum requirements*) adalah modifikasi dari metode LQ dengan menggunakan distribusi minimum dari employment yang diperlukan untuk menopang industri regional dan bukannya distribusi rata-rata. Untuk setiap daerah yang pertama dihitung adalah persentase angkatan kerja regional yang dipekerjakan dalam setiap industri. Kemudian persentase itu diperbandingkan dengan perhitungan hal-hal yang bersifat kelainan dan persentase terkecil dipergunakan sebagai ukuran kebutuhan minimum bagi industri tertentu. Persentase minimum ini dipergunakan sebagai batas dan semua employment di daerah-daerah lain yang lebih tinggi dari persentase dipandang sebagai employment basis. Proses ini dapat diulangi untuk setiap industri di daerah bersangkutan untuk memperoleh employmen basis total. Dibandingkan dengan metode LQ, metode ini malahan lebih bersifat arbiter karena sangat tergantung pada pemilihan persentase minimum dan tingkat disagregasi-disagregasi yang terlalu terperinci malahan dapat mengakibatkan hampir semua sektor

menjadi kegiatan basis atau ekspor.

Teori basis ini mempunyai kebaikan mudah diterapkan, sederhana dan dapat menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah dan dampak umum dari perubahan-perubahan jangka pendek. Keterbatasan teori ini tidak terlalu ketat dan dapat menjadi landasan yang sangat bermanfaat bagi peramalan jangka pendek .

## **2.5. Analisis shift-share :**

Pada dasarnya analisis ini membahas hubungan antara pertumbuhan wilayah dan struktur ekonomi wilayah, untuk mengetahui perubahan struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di daerah dibandingkan dengan perekonomian daerah yang lebih tinggi digunakan analisis *Shift- Share*. Menurut Bendavid - Val (1983), Hoover (1984) (Lihat Prasetyo, 1993: 44) tehnik ini menggambarkan *performance* (kinerja) sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan kinerja sektor-sektor perekonomian nasional. Dengan demikian dapat temukan adanya *shift* (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah, bila daerah itu memperoleh kemajuan lebih lambat atau lebih cepat dari kemajuan nasional. Lincolyn Arsyad (1997: 290) dan Latif Adam (1994), mengemukakan bahwa analisis *shift-share* merupakan tehnik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tehnik ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor di suatu wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya, dan mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan-perbandingan itu. Bila penyimpangan itu positif, hal itu disebut keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut.

Tehnik shift-share ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu

variabel wilayah, seperti kesempatan kerja, nilai tambah, pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh pertumbuhan nasional (N), bauran industri M dan keunggulan kompetitif (C) (Bendavid-Val, 1991). Pengaruh pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa (*share*), pengaruh bauran industri disebut proporsional shift atau bauran komposisi, dan akhirnya pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan pula *differential shift* atau *regional share*. Itulah sebabnya disebut teknik *shift-share*. Berikut terdapat beberapa rumusan analisa shift share antara lain teknik analisa *shift-share Klasik* dengan formulasi sebagai berikut :

Untuk industri atau sektor i di wilayah j :

$$(1) D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Bila analisis itu diterapkan kepada kesempatan kerja (employment), E, maka :

$$(2) D_{ij} = E_{ij}^* - E_{ij}$$

$$(3) N_{ij} = E_{ij} \cdot r_n$$

$$(4) M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$(5) C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Dimana :

$r_{in}$  ,  $r_n$  dan  $r_{ij}$  mewakili laju pertumbuhan wilayah dan laju pertumbuhan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai :

$$(6) r_{ij} = (E_{ij}^* - E_{ij}) / E_{ij}$$

$$(7) r_{in} = (E_{in}^* - E_{in}) / E_{in}$$

$$(8) r_n = (E_n^* - E_n) / E_n$$

dimana :

$E_{ij}$  = tenaga kerja disektor i di wilayah j

$E_{in}$  = kesempatan kerja disektor i ditingkat nasional, dan

$E_n$  = kesempatan kerja nasional, semuanya diukur pada suatu tahun dasar.

Untuk suatu wilayah, pertumbuhan nasional (3), bauran industri (4) dan keunggulan kompetitif (5) dapat ditentukan bagi sesuatu sektor i atau dijumlah untuk semua sektor sebagai keseluruhan wilayah. Persamaan shift-share untuk sektor i di wilayah j adalah :

$$(9) \quad D_{ij} = E_{ij}r_n + E_{ij}(r_{in} - r_n) + E_{ij}(r_{ij} - r_{in})$$

Dari persamaan diatas membebankan tiap sektor wilayah dengan laju pertumbuhan yang setara dengan laju yang dicapai oleh perekonomian nasional selama kurun waktu analisis.

Dalam penggunaan *analysis shift-share* diatas (*model Klasik*) harus mempertimbangkan keterbatasan teoritik yang ada. Menurut Prasetyo Soepono (1993) mencatat empat keterbatasan teoritik dari *analysis shift-share* ini yaitu: [i] Persamaan *shift-share* adalah suatu persamaan identitas sehingga tidak mempunyai implikasi- implikasi keperilakuan. Karena itu metode bukan untuk menjelaskan dan tidak analitik tetapi hanya mencerminkan suatu sistem akunting. [ii] Pertumbuhan industri pada suatu wilayah dibebani laju pertumbuhan yang ekuivalen dengan laju pertumbuhan tingkat nasional. Gagasan ini sangat sederhana sehingga dapat mengaburkan sebab- sebab pertumbuhan suatu wiiayah. [iii] Arti ekonomi dari dua komponen *shift* tidak dikembangkan dengan baik, sehingga tidak mudah dibedakan / dipisahkan. [iv] *Analysis shift-share* mengasumsikan bahwa semua barang yang dijual secara nasional. Asumsi ini kurang realistis karena suatu barang yang bersifat

lokal tidak bersaing dengan barang sejenis yang dihasilkan wilayah lain sehingga barang yang bersangkutan tidak memperoleh bagian dari permintaan agregat.

Selanjutnya Estaban Marquillas (**E-M**) tahun 1972 ( Prasetyo, 1993) berusaha memodifikasi analisis shift-share ini sehingga terlihat pengaruh persaingan yang meliputi pengaruh persaingan dan pengaruh alokasi yang pada nantinya dapat menunjukkan keunggulan kompetitif dan sektor spesialisasi. Persamaan S-S yang direvisi itu mengandung suatu unsur baru, yaitu *homothetic employment* di sektor i di wilayah j, diberi notasi  $E'_{ij}$  dan dirumuskan sebagai berikut :

$$(10) \quad E'_{ij} = E_j ( E_{in} / E_n )$$

$E'_{ij}$  di definisikan sebagai employment atau output atau pendapatan atau nilai tambah yang dicapai sektor i diwilayah j bila struktur kesempatan kerja diwilayah itu sama dengan struktur nasional. Dengan mengganti kesempatan kerja nyata,  $E_{ij}$ , dengan homothetic employment,  $E'_{ij}$ , persamaan (5) diubah menjadi :

$$(11) \quad C'_{ij} = E'_{ij} ( r_{ij} - r_{in} )$$

$C'_{ij}$  mengukur keunggulan atau ketidak-unggulan kompetitif di sektor i di perekonomian suatu wilayah. Selanjutnya pengaruh alokasi atau *allocation effect* sektor i diwilayah j ( $A_{ij}$ ) dirumuskan sebagai berikut :

$$(12) \quad A_{ij} = ( E_{ij} - E'_{ij} ) ( r_{ij} - r_{in} )$$

Persamaan (12) diatas menunjukkan bahwa bila suatu wilayah mempunyai spesialisasi di sektor-sektor tertentu, maka sektor-sektor itu juga menikmati keunggulan kompetitif yang lebih baik. Maksudnya efek alokasi,  $A_{ij}$  itu dapat positif atau negatif. Efek alokasi positif mempunyai dua kemungkinan: pertama,  $E_{ij} - E'_{ij} <$

0 dan  $r_{ij} - r_{in} < 0$  dan kedua,  $E_{ij} - E'_{ij} > 0$  dan  $r_{ij} - r_{in} > 0$ . sebaliknya efek alokasi yang negatif mempunyai dua kemungkinan yang berkebalikan dengan efek alokasi positif tersebut diatas.

Jadi modifikasi **E-M** terhadap analisis shift-share adalah :

$$(13) \quad D_{ij} = E_{ij}(r_n) + E_{ij}(r_{ij} - r_n) + E'_{ij}(r_{ij} - r_{in}) + (E_{ij} - E'_{ij})(r_{ij} - r_{in})$$

Modifikasi selanjutnya terhadap analisis S-S adalah dikemukakan oleh *Arcelus* (1984) adalah dengan memasukkan sebuah komponen yang merupakan dampak pertumbuhan interen suatu wilayah atas perubahan (kesempatan kerja) wilayah. Modifikasi ini mengganti  $C_{ij}$  dengan sebuah komponen yang disebabkan oleh pertumbuhan wilayah dan sebuah komponen bauran industri regional sebagai sisanya. Penekanan *Arcelus* terletak pada komponen kedua yang mencerminkan adanya *agglomeration economies* (penghematan biaya persatuan karena kebersamaan lokasi satuan-satuan usaha). Untuk menjelaskan regional *growth effect* berikut ini dirumuskan sebagai berikut :

$$(14) \quad R_{ij} = E'_{ij}(r_{ij} - r_n) + (E_{ij} - E'_{ij})(r_j - r_n)$$

Dimana :

$E'_{ij}$  = homothetic employment sektor i di wilayah j

$E_{ij}$  = employment disektor i di wilayah j

$r_j$  = laju pertumbuhan wilayah j

$r_n$  = laju pertumbuhan nasional

Selanjutnya rumus berikut :

$$R_{ij} = E'_{ij}(r_{ij} - r_j) - (r_{in} - r_n) + (E_{ij} - E'_{ij})[(r_{ij} - r_j) - (r_{in} - r_n)]$$

Menggambarkan komponen bauran industri regional yang dimodifikasi oleh *Arcelus*.

## 2.6 Tipologi Ekonomi Regional.

Karakteristik tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan Klassen tipologi (Sjahrizal, 1997: 29-30) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal. Daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*High growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*).

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah adalah sebagai berikut:

- [i] Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*High growth and high income*) adalah laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita rata-rata nasional.
- [ii] Daerah maju tapi tertekan. (*high income but low growth*) yaitu daerah yang relatif maju, tapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhan menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Daerah ini merupakan daerah yang telah maju tapi dimasa mendatang pertumbuhannya tidak akan begitu cepat walaupun potensi pengembangan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar. Daerah ini mempunyai pendapatan perkapita lebih tinggi tapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
- [iii] Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah daerah yang dapat

berkembang cepat dengan potensi pengembangan yang dimiliki sangat besar tapi belum diolah sepenuhnya secara baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi, namun tingkat pendapatan perkapita yang mencerminkan dari tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah. Daerah ini memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

[iv]Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah daerah yang masih mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita lebih rendah dari pada rata-rata nasional.

Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Tipologi Daerah**

<b>PDRB per Kapita (y)</b> <b>Laju pertumbuhan (r)</b>	<b>( y<sub>1</sub> &gt; y )</b>	<b>( y<sub>1</sub> &lt; y )</b>
<b>( r<sub>1</sub> &gt; r )</b>	Pendapatan tinggi dan Pertumbuhan tinggi	Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi
<b>( r<sub>1</sub> &lt; r )</b>	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah	Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah

Sumber : Mudrajat Kuncoro( 2002)

**Keterangan :**

- r = Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota
- y = Rata – rata PDRB per kapita kabupaten/kota
- r<sub>1</sub> = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang diamati (i)
- y<sub>1</sub> = PDRB per kapita kabupaten/kota yang diamati (i)

## 2.7. Model Rasio Pertumbuhan (MRP).

Dalam perencanaan Wilayah dan Kota terutama untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial alat analisis yang sering digunakan antara lain: analisis *Location Quotient* digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi suatu kegiatan dalam wilayah studi dibandingkan dengan wilayah referensinya, dan analisis *Shift-Share* adalah melihat pertumbuhan dari suatu kegiatan terutama melihat perbedaan pertumbuhan, baik dalam skala yang lebih luas (wilayah referensi) maupun skala yang kecil (wilayah studi). Kedua alat tersebut sangat dibutuhkan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi wilayah yang potensial, meskipun dalam melakukan analisis dengan kedua alat tersebut harus mempunyai pola yang sama terutama dalam melakukan *overlay*.

Salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan “ Model Rasio Pertumbuhan (MRP)”. Modifikasi tersebut dilakukan dalam usaha menyamakan bahasa, satuan dan pola dengan analisis *Location quotient*. Model Rasio Pertumbuhan adalah membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan dalam wilayah referensi dan wilayah studi. Dalam analisis tersebut terdapat dua rasio pertumbuhan yaitu :

- a. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs), dengan formulasi matematis yang digunakan adalah :

$$RPs = \frac{DEj / EiR (t)}{DEiR / EiR (t)}$$

- b. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR), Formulasi yang digunakan adalah :

$$RPr = \frac{DEiR / EiR (t)}{DER / ER (t)}$$

Dimana :

$DE_{ij}$  = Perubahan pendapatan kegiatan I di Kabupaten/Kota pada tahun awal analisis

DER = Perubahan PDRB di Propinsi Sulawesi Tengah

$DE_{iR}$  = Perubahan pendapatan kegiatan I di Propinsi Sulawesi Tengah

$E_{iR}(t)$  = Perubahan pendapatan kegiatan I di Kabupaten/kota

ER = PDRB wilayah referensi

Pada dasarnya alat analisis ini sama dengan LQ, namun perbedaannya terletak pada kriteria perhitungan dimana LQ menggunakan kriteria distribusi sedangkan MRP menggunakan kriteria pertumbuhan.

Pendekatan alat analisis MRP ini kemudian akan digabungkan dengan hasil analisis menggunakan pendekatan LQ (*overlay*). Penggabungan kedua pendekatan ini digunakan untuk memperoleh hasil identifikasi kegiatan sektoral yang unggul, baik dari segi kontribusi maupun pertumbuhannya. Selain itu juga dapat diketahui bagaimana peran sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB pada tingkat Provinsi.

Identifikasi kegiatan-kegiatan unggulan tersebut ditunjukkan melalui overlay antara Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr), Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) dan Location Quotient (LQ). Koefisien dari ketiga komponen tersebut kemudian disamakan satuannya dengan diberikan notasi positif (+) yang berarti koefisien komponen bernilai lebih dari satu dan Negatif (-) berarti kurang dari satu. RPR bernotasi positif berarti pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibanding pertumbuhan total di wilayah referensi. RPs bernotasi positif berarti pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah referensi. Sedangkan LQ bernotasi positif berarti kontribusi sektor i terhadap PDRB di wilayah studi lebih tinggi dibanding kontribusi sektor yang sama terhadap PDRB di wilayah referensi. Ringkasnya dapat dibuat sebagai berikut.

Notasi	Keterangan Analisis
<b>RPr</b> +	Bermakna bahwa pertumbuhan sektor <i>i</i> lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total di wilayah referensi.
<b>RP<sub>s</sub></b> +	Bermakna bahwa pertumbuhan sektor <i>i</i> lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah referensi.
<b>LQ</b> +	Bermakna bahwa kontribusi sektor <i>i</i> terhadap PDRB di wilayah studi lebih tinggi dibandingkan kontribusi sektor yang sama terhadap PDRB di wilayah referensi.

## 2.8 Sistem Informasi Geografi (SIG)

Banyaknya ekonom yang tertarik dalam masalah studi lokasi telah mendorong munculnya paradigma baru dalam ilmu ekonomi regional dan perkotaan, yang disebut geografi ekonomi baru (Krugman,1998) Salah satu trend utama dalam paradigma baru ini adalah digunakannya Sistem Informasi Geografi (SIG) yang merupakan alat analisis yang bermanfaat terutama untuk: (1) Mengidentifikasi lokasi industri; (2) di daerah mana mereka cenderung mengelompok secara spasial.

Pada dasarnya SIG adalah jenis khusus sistem informasi, yang memperhatikan representasi dan manipulasi realita geografi. SIG mentransformasikan data menjadi informasi dengan mengintegrasikan sejumlah data yang berbeda, menerapkan analisis fokus, dan menyajikan output dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Kemampuan SIG dalam penyimpanan, analisis, pemetaan dan membuat model mendorong aplikasi yang luas dalam berbagai disiplin ilmu, dari teknologi informasi hingga sosial-ekonomi maupun analisis yang berkaitan dengan populasi. (Martin, 1996, dalam Mudrajat, 2002). Terdapat prosedur standar dalam merancang dan menggunakan SIG, yaitu : pengumpulan data, pengolahan data awal, konstruksi basis data, analisis dan kajian spasial serta penyajian grafis. Aktifitas utama dalam masing-masing prosedur dapat terlihat dari Tabel 2.2. berikut ini :

**Tabel 2.2.**

**Prosedur dan Aktivitas Utama dalam SIG**

<b>Prosedur</b>	<b>Aktivitas</b>
Memperoleh data	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberian angka pada peta-peta atau dokumen-dokumen termasuk pengkodean data, verifikasi data dan pengkoreksian kesalahan.</li><li>• Menjelaskan sekumpulan data yang telah ada, khususnya yang berasal dari survei industri yang dipublikasikan tahunan oleh BPS</li><li>• Menyelenggarakan survei primer</li></ul>
Persiapan Pengolahan Data	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menginterpretasikan atau mengklasifikasikan data yang didapat dari survei</li><li>• Menyusun struktur data digital untuk memilih model - spasial ruang (berdasarkan objek, jaringan, dan lapangan)</li><li>• Mentransformasikan/mengubah menjadi sistem koordinat biasa/umum</li></ul>
Pengkonstruksian data dasar atau database (penyimpanan dan pemanggilan kembali)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat model dari konsep data</li><li>• Menetapkan struktur database</li><li>• Menetapkan prosedur terbaru</li><li>• Mengirim data ke database</li></ul>
Penelitian spasial/lokasi/wilayah beserta analisisnya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemanggilan data berdasarkan lokasi</li><li>• Pemanggilan data berdasarkan kelas atau atribut</li><li>• Menemukan lokasi yang paling cocok berdasarkan kriteria</li><li>• Mencari pola, kelompok, jalur dan interaksi.</li><li>• Membuat model dan mensimulasikan pada fenomena fisik dan sosial</li></ul>
Tampilan secara grafik (visualisasi dan interaksi)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menciptakan peta</li><li>• Menggali data</li><li>• Menciptakan tampilan 3 dimensi</li><li>• Membuat laporan.</li></ul>

Sumber : Disadur dari Jones (1997:7, dalam Mudrajat Kuncoro,2002)

## **2.9 Penelitian Terdahulu.**

Penelitian mengenai sektor basis telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti. Analisis yang digunakan sebagian besar adalah analisis *shift-share* dan LQ. Ada pula peneliti disamping menggunakan analisis *shift-share* dan LQ juga menggunakan analisis

lain seperti klassen tipologi atau analisis LQ digabungkan dengan klassen tipologi dan Logistik Regression. Secara lengkap penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Penelitian – Penelitian Terdahulu Tahun 2000 - 2003**

No	Peneliti	Alat Penelitian	Judul dan Hasil Penelitian
1	2	3	4
2	Yuliana Yuvita Ning Sarwati (2000)	- LQ - Shift-Share - Klassen Tipologi	<b>Judul:</b> Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi Regional Jawa Tengah periode 1985-1996. <b>Hasil Penelitian :</b> Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama kurun waktu 12 tahun rata-rata lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengalami berbagai fluktuasi, tipologi daerah termasuk kategori daerah pertumbuhan cepat. Sedang pendapatan perkapita lebih rendah dari pada pendapatan perkapita nasional, sektor andalan pada periode 1985-1996 adalah; sektor: pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa. Listrik, gas dan air bersih, secara umum struktur ekonomi Jawa Tengah ada beberapa sektor yang mempunyai peranan cukup besar terhadap peningkatan PDRB tapi koefisien LQ-nya selalu lebih kecil dari satu dan sektor pertanian cukup dominan dalam pembentukan PDRB Jawa Tengah
3	Fuad Assadin dan Faried Wijaya Mansoer (2001)	- LQ - Shift-Share	<b>Judul:</b> Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja: Terapan Model Kebijakan Prioritas Sektor untuk Kalimantan Timur. <b>Hasil Penelitian:</b> Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perkembangan kesempatan kerja, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi cenderung semakin membuka kesempatan kerja, laju pertumbuhan kesempatan kerja di Kalimantan Timur lebih tinggi dari pada propinsi lain, laju kesempatan kerja di daerah lebih cepat, sedang komponen daya kompetitif menunjukkan nilai negatif.
4	Hairul Aswandi dan Mudrajad Kuncoro (2002)	- LQ -Klasen Tipologi -Log Regresi	<b>Judul :</b> Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan; studi empiris di Kalimantan Selatan 1993 -1999. <b>Hasil Penelitian :</b> Pertimbangan penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan hanya mengacu pada pendapatan perkapita dan sub sektor unggulan yang ditunjukkan oleh hasil analisa LQ dan model Logit. Pertumbuhan PDRB dan spesialisasi daerah ternyata tidak menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan.
5	Binar Rudatin (2003)	- Shift-Share - LQ - Tipologi Daerah	<b>Judul:</b> Analisis Sektor Basis dalam Rangka pengembangan pembangunan wilayah studi kasus Kabupaten-kecamatan di Jawa Tengah tahun 1996-2001. <b>Hasil Penelitian:</b> Hasil analisis LQ menunjukkan sektor pertanian sebagai

			<p>sektor basis di 22 kabupaten dari 29 kabupaten yang ada. Dari 29 kabupaten hanya 2 kabupaten masuk dalam tipologi daerah maju dan cepat tumbuh (tipologi I). Tipologi II ada 4 kabupaten. Tipologi III ada 9 kabupaten. Tipologi IV ada 14 kabupaten. Prioritas pengembangan sektor pertanian pada 5 kabupaten. Sektor pertambangan dan penggalian pada 1 kabupaten. Sektor industri pada 2 kabupaten. Sektor listrik, gas dan air pada 2 kabupaten. Sektor bangunan pada 3 kabupaten. Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada 1 kabupaten. Sektor pengangkutan dan komunikasi 1 kabupaten. Sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan pada 4 kabupaten. Sektor jasa pada 3 kabupaten.</p>
6.	Elia Radianto (2003)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shift-Share</li> <li>- LQ</li> <li>- Indeks Spesialisasi Regional</li> </ul>	<p><b>Judul</b> : Evaluasi Pembangunan Regional Pasca Kerusakan di Maluku.</p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> Seluruh Kabupaten/kota di Propinsi Maluku memiliki LQ &gt; 1 untuk beberapa subsektor lapangan usaha baik sebelum kerusakan dan krisis ekonomi maupun pada masa pemulihan dari kedua dampak tersebut . Dari hasil perhitungan indeks spesialisasi menunjukkan terjadi penurunan nilai rata-rata 0,30 tahun 1997 menjadi 0,28 pada tahun 2001. Penurunan tsb. Disebabkan oleh adanya penurunan nilai rata-rata indeks spesialisasi di kota Ambon, Kab.Maluku Tengah dan Kab. Pulau Buru.</p>

## 2.10 Kerangka pemikiran teoritis :

Suatu daerah memiliki potensi ekonomi dapat terlihat dari besarnya PDRB yang dihasilkan, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Dari PDRB akan dapat diketahui output yang dihasilkan tiap sektor serta digunakan untuk menentukan sektor basis dan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi. Dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dapat diketahui Tipologi daerah.

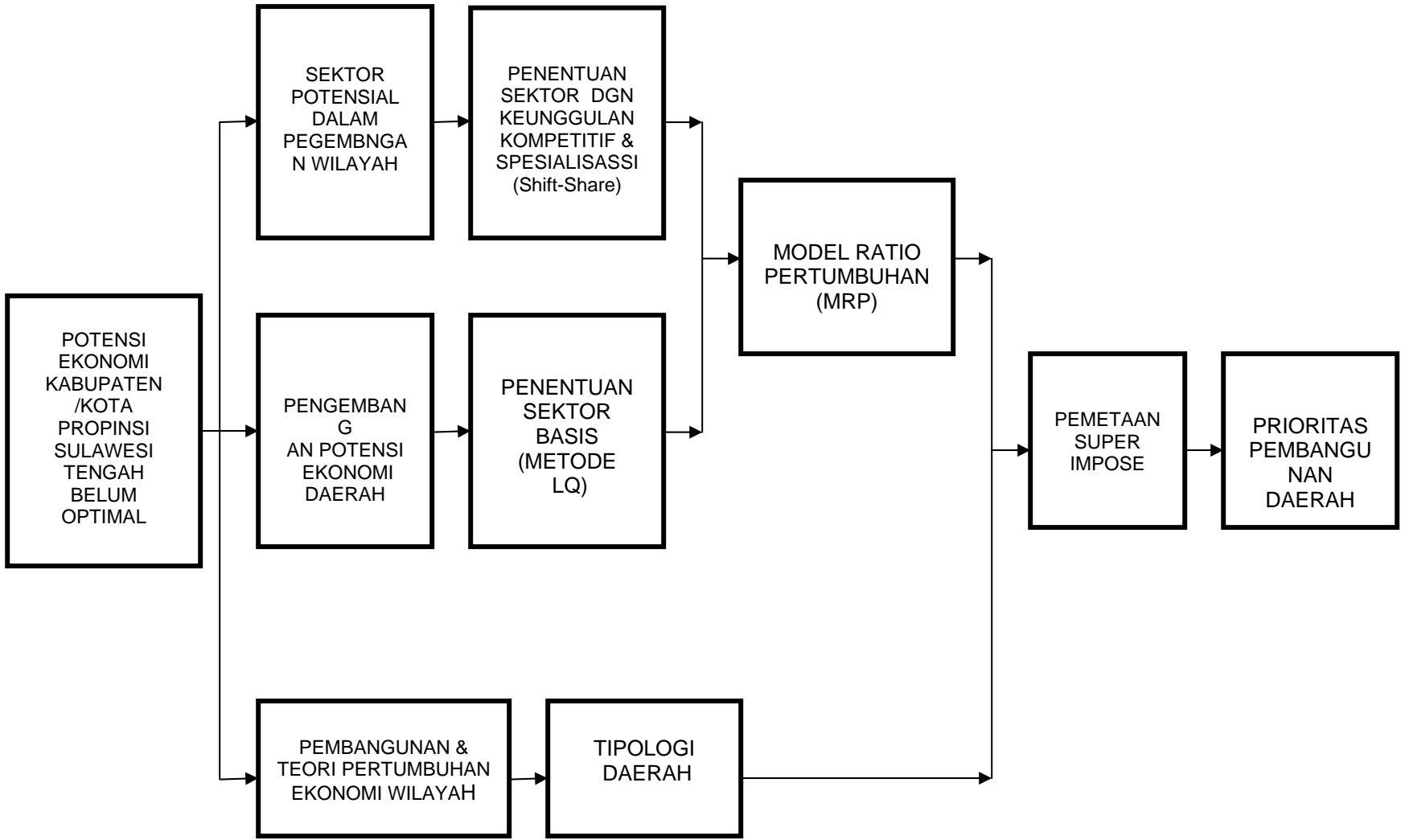
Untuk menentukan sektor basis dalam perencanaan pengembangan pembangunan daerah digunakan pengaruh variabel keunggulan kompetitif, spesialisasi dan pertumbuhan ekonomi persektor terhadap sektor basis yang signifikan dan disesuaikan dengan tipologi daerah yang bersangkutan.

Perencanaan pembangunan suatu daerah haruslah disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah bersangkutan dan inilah kunci keberhasilan program pengembangan

pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan itu harus mempertimbangkan sumber daya yang dapat dikembangkan tidak hanya sektor basis akan tetapi juga mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain sekitarnya. Variabel lain yang perlu dipertimbangkan adalah tipologi daerah itu sendiri.

Dari uraian diatas maka dapatlah disusun suatu skema sebagai berikut :

**Model : Alur Pikir Teoritis**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Definisi Operasional Variabel

##### a. Potensi Ekonomi

Merupakan kemampuan ekonomi yang dimiliki daerah yang mungkin atau layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko, 2002).

##### b. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB )

Merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah, yang dapat dilihat berdasarkan harga berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB dimaksudkan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang ada dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. PDRB yang terpakai dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993.

##### c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan yang dimaksudkan adalah pertumbuhan PDRB rata-rata sejak tahun 2000–2005 yang dihitung dengan menggunakan rumus :

1. Untuk pertumbuhan menurut lapangan usaha digunakan  $\rightarrow (E_{ij}^* - E_{ij}) / E_{ij}$
2. Untuk pertumbuhan PDRB digunakan  $\rightarrow (E_j^* - E_j) / E_j$ .

Dimana :

E = Output

i = Lapangan usaha ( sektor )

j = Kabupaten / Kota

\* adalah tahun terakhir

#### **d. Pendapatan Perkapita**

Merupakan perkiraan pendapatan perorangan yang dihasilkan dari PDRB pertahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun atau dengan kata lain pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

#### **e. Sektor – Sektor Ekonomi**

Terdapat sembilan sektor ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota .

Adapun sektor - sektor perekonomian dimaksud yakni :

- Pertanian
- Penggalian
- Industri Pengolahan
- Listrik dan Air Minum
- Bangunan
- Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Angkutan dan Komunikasi
- Keuangan Perusahaan dan Jasa Perusahaan
- Jasa – jasa

#### **f. Kegiatan Ekonomi**

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi yang digolongkan kedalam 2 bagian yakni : Kegiatan basis /unggulan dan kegiatan Non basis.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang sering terpakai dalam penelitian adalah data kualitatif dan kuantitatif dimana keduanya dapat digabungkan, dan jenis data yang terpakai dalam penelitian ini adalah penggabungan kedua jenis data tersebut. Adapun sumber data yang

digunakan adalah memanfaatkan sumber data sekunder yang dipublikasikan oleh berbagai instansi atau lembaga terkait antara lain :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah (Sulawesi Tengah Dalam Angka 2000 – 2004).
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten dan Kota Se-Sulawesi Tengah (Kabupaten Dalam Angka).
3. Buku Statistik Tahunan Indonesia serta berbagai jurnal ilmiah lainnya

### **3.3 Metode Pengumpulan Data :**

Pengumpulan data diperoleh melalui telaah kepustakaan dan hasil publikasi. Adapun data yang dibutuhkan adalah :

1. Data PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000 per Kabupaten dan Kota sejak tahun 2000 – 2005.
2. Data Laju Pertumbuhan PDRB persektor atas dasar harga konstan tahun 2000 per Kabupaten dan Kota sejak tahun 2000 – 2005.
3. Pendapatan perkapita per Kabupatendan Kota sejak tahun 2000 – 2005.
4. Data PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000 sejak tahun 2000 – 2005.
5. Laju pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000 sejak tahun 2000 – 2005.
6. Pendapatan perkapita Sulawesi Tengah sejak tahun 2000 - 2005

### 3.4 Metode Analisis

#### 3.4.1. Metode Location Quotient ( LQ )

Identifikasi untuk menentukan sektor-sektor basis dilakukan dengan menggunakan Rumus LQ dimana tehnik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di Kabupaten/Kota dengan sektor yang sama di daerah yang lebih luas yaitu Sulawesi Tengah.

Melalui data PDRB atas dasar harga konstan analisis yang digunakan dengan rumus sbb. :

$$LQ = ( Q_{ij} / Q_j ) / ( Q_{in} / Q_n ) \quad ( 1 )$$

Keterangan :

- LQ adalah location quotient
- $Q_{ij}$  adalah output sektor I daerah j ( kabupaten/kota )
- $Q_j$  adalah total output daerah j ( kabupaten/kota )
- $Q_{in}$  adalah output sektor i di n ( Sulawesi Tengah )
- $Q_n$  adalah total output di n ( Sulawesi Tengah )

Dari analisa ini diharapkan didapat sektor-sektor basis di masing-masing kabupaten/kota se Sulawesi Tengah yang pertumbuhannya dapat dipacu guna meningkatkan pertumbuhan PDRB kabupaten/kota yang bersangkutan.

#### 3.4.2. Analisis Model Rasio Pertumbuhan ( MRP )

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dilakukan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi, terutama struktur ekonomi kabupaten / kota maupun Provinsi Sulawesi Tengah.yang lebih menekankan pada kriteria pertumbuhan. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan kegiatan membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam skala yang lebih kecil maupun dalam skala yang lebih luas.

Terdapat dua rasio pertumbuhan dalam analisis tersebut, yaitu (a) rasio pertumbuhan wilayah studi ( RPs ) dan (b) rasio pertumbuhan wilayah referensi ( RPr ).

Formulasi yang digunakan adalah :

$$RPs = \frac{DEj / EiR (t)}{DEiR / EiR (t)}$$

$$RPr = \frac{DEiR / EiR (t)}{DER / ER (t)}$$

Dimana :

- DEij = Perubahana pendapatan kegiatan i di Kabupaten/Kota pada tahun awal analisis
- DER = Perubahan PDRB di Propinsi Sulawesi Tengah
- DEiR = Perubahan pendapatan kegiatan i di Propinsi Sulawesi Tengah
- EiR (t) = Perubahan pendapatan kegiatan i di Kabupaten/kota
- ER = PDRB wilayah referensi

Pada dasarnya alat analisis ini sama dengan LQ, namun perbedaannya terletak pada kriteria perhitungan dimana LQ menggunakan kriteria distribusi sedangkan MRP menggunakan kriteria pertumbuhan.

Pendekatan alat analisis MRP ini kemudian akan digabungkan dengan hasil analisis menggunakan pendekatan LQ (overlay). Penggabungan kedua pendekatan ini digunakan untuk memperoleh hasil identifikasi kegiatan sektoral yang unggul, baik dari segi kontribusi maupun pertumbuhannya. Selain itu juga dapat diketahui bagaimana peran sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB pada tingkat Provinsi.

Identifikasi kegiatan-kegiatan unggulan tersebut ditunjukkan melalui overlay antara Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR), Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) dan Location Quotient (LQ). Koefisien dari ketiga komponen tersebut kemudian

disamakan satuannya dengan diberikan notasi positif (+) yang berarti koefisien komponen bernilai lebih dari satu. Bernotasi negatif (-) berarti kurang dari satu. RPr bernotasi positif berarti pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibanding pertumbuhan total diwilayah referensi. RPs bernotasi positif berarti pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama diwilayah referensi. Sedangkan LQ bernotasi positif berarti kontribusi sektor i terhadap PDRB di wilayah studi lebih tinggi dibanding kontribusi sektor yang sama terhadap PDRB di wilayah referensi.

Identifikasi unggulan dari hasil overlay dibedakan dalam dua kriteria yaitu ;

- a. Hasil overlay yang menunjukkan ketiganya bertanda positif, berarti kegiatan tersebut mempunyai pertumbuhan sektoral ditingkat Propinsi Sulawesi Tengah tinggi. Pertumbuhan sektoral Kabupaten/Kota lebih tinggi dari Propinsi Sulawesi Tengah dan kontribusi sektoral Kabupaten/Kota lebih tinggi pula di Propinsi Sulawesi Tengah. Artinya sektor ekonomi tersebut mempunyai potensi daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan dengan kegiatan yang sama pada tingkat Propinsi Sulawesi Tengah, dan di Propinsi Sulawesi Tengah sendiri kegiatan tersebut mempunyai prospek yang bagus ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan total kegiatan ekonomi.
- b. Hasil overlay yang menunjukkan notasi positif pada PRs dan LQ berarti bahwa kegiatan sektoral di Kabupaten/kota lebih unggul dari kegiatan yang sama di Propinsi Sulawesi Tengah, baik dari sisi pertumbuhan maupun kontribusinya. Dengan kata lain bahwa sektor tersebut merupakan spesialisasi kegiatan ekonomi Kabupaten / Kota di Propinsi Sulawesi Tengah

### 3.4.3. Metode Analisis Shift – Share (S-S)

Tehnik analisis S-S digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis menganalisis kinerja sektor-sektor ekonomi masing-masing kabupaten/kota dalam wilayah Sulawesi Tengah serta menentukan sektor-sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi, dimana keunggulan kompetitif merupakan kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya diluar daerah/luar negeri/pasar global. (Robinson, 2005). Tehnik ini memilih pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah dalam kurun waktu tertentu yang terdiri atas perubahan sebagai akibat dari pengaruh pertumbuhan wilayah di atasnya (N), bauran industri (M) serta keunggulan kompetitif atau persaingan (C). Pengaruh pertumbuhan dari daerah di atasnya disebut pangsa (share), pengaruh bauran industri disebut *proporsional shift* dan pengaruh keunggulan kompetitif (persaingan) disebut *differential shift* atau *regional share*.

Jika suatu wilayah mempunyai industri-industri yang menguntungkan yang tumbuh lebih cepat daripada laju pertumbuhan daerah di atasnya disebut sebagai pengaruh bauran industri ( $M_{ij}$ ). Sedangkan untuk pengaruh persaingan adalah jika suatu industri tertentu di wilayah tertentu tumbuh lebih cepat disuatu wilayah daripada industri yang sama ditingkat yang lebih tinggi, maka untuk sektor tertentu diwilayah tertentu perubahan variabel dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\mathbf{D}_{ij} = \mathbf{N}_{ij} + \mathbf{M}_{ij} + \mathbf{C}_{ij} \quad (2)$$

Keterangan :

$N_{ij} = E_{ij} ( r_n )$  adalah pertumbuhan nasional sektor I di wilayah j

$M_{ij} = E_{ij} ( r_{in} - r_n )$  adalah bauran industri sektor I di wilayah j

$C_{ij} = E_{ij} ( r_{ij} - r_{in} )$  adalah keunggulan kompetitif sektor I di wilayah j

$r_n$  dan  $r_{in}$  adalah laju pertumbuhan nasional persektor sedangkan  $r_{ij}$  adalah laju pertumbuhan wilayah persektor yang masing-masing diformulasikan sebagai berikut :

$$r_n = (E_n^* - E_n) / E_n$$

$$r_{in} = (E_{in}^* - E_{in}) / E_{in}$$

$$r_{ij} = (E_{ij}^* - E_{ij}) / E_{ij}$$

Keterangan :

$E_{ij}$  adalah Nilai tambah sektor i diwilayah j ( Kabupaten/Kota )

$E_{in}$  adalah Nilai tambah sektor i diwilayah nasional ( Sulawesi Tengah )

$E_n$  adalah Nilai tambah Nasional

Tanda \* menunjukkan tahun akhir analisis.

Maka analisis S-S dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$D_{ij} = E_{ij} (r_n + E_{ij} (r_{in} - r_n)) + E_{ijh} (r_{ij} - r_n) \quad (3)$$

Untuk mengetahui keunggulan kompetitif dan spesialisasi maka analisis S-S yang terpakai adalah analisis S-S yang telah dimodifikasi dari Estaban Marquillas (lihat Soepono, 1993) yaitu komponen ketiga dengan persamaan :

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_n)$$

Disempurnakan menjadi :

$$C'_{ij} = E'_{ij} (r_{ij} - r_n) \quad (4)$$

Keterangan :

$C'_{ij}$  adalah persaingan atau ketidak unggulan kompetitif disektor i pada perekonomian suatu wilayah menurut analisis S-S tradisional.

$E'_{ij}$  adalah  $E_{ij}$  yang diharapkan dan diperoleh dari :

$$E'_{ij} = E_j (E_{in} / E_n) \quad (5)$$

Sedangkan pengaruh alokasi sebagai bagian yang belum dijelaskan dari suatu variabel wilayah ( $A_{ij}$ ) dapat dirumuskan sebagai :

$$A_{ij} = (E_{ij} - E'_{ij}) (r_{ij} - r_{in}) \quad (6)$$

Keterangan :

- $A_{ij}$  = Pengaruh alokasi dibagi menjadi dua bagian yaitu adanya tingkat spesialisasi sektor i di wilayah j dikalikan dengan keunggulan kompetitif.
- $(E_{ij} - E'_{ij})$  = Tingkat spesialisasi terjadi apabila variabel wilayah nyata ( $E_{ij}$ ) lebih besar dari variabel yang diharapkan ( $E'_{ij}$ )
- $(r_{ij} - r_{in})$  = Keunggulan kompetitif terjadi bila laju pertumbuhan sektor di daerah lebih besar daripada laju pertumbuhan sektor nasional/regional .

Maka pengaruh alokasi ini disubstitusikan dalam analisis S-S tradisional menjadi persamaan S-S yang dimodifikasi oleh Estaban Marquillas (E-M) menjadi persamaan :

$$D_{ij} = E_{ij}(r_n) + E'_{ij}(r_{in}) - r_n + E'_{ij}(r_{ij} - r_{in}) + (E_{ij} - E'_{ij})(r_{ij} - r_{in}) \quad (7)$$

Berdasarkan analisa ini diharapkan dimasing-masing Kabupaten/Kota dapat ditentukan sektor-sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi.

#### 3.4.4. Penentuan Tipologi Daerah

Klassen Tipology pada dasarnya membagi daerah berdasarkan 2 (dua) indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horisontal, daerah yang diamati dapat menjadi 4 klasifikasi (Soepono, 1993; Sjafrizal, 1997; Kuncoro dan Aswandi, 2002) yaitu :

1. Tipologi I : Daerah Cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) adalah Kabupaten/kota yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB rata-rata diatas pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah dan pendapatan perkapita diatas rata-rata pendapat perkapita Sulawesi Tengah .
2. Tipologi 2 : Daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah Kabupaten yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB rata-rata lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah dan pendapatan perkapita lebih tinggi rata-rata diatas pendapatan perkapita Sulawesi Tengah.

3. Tipologi 3 : Daerah berkembang cepat ( *high growth but low income* ) merupakan Kabupaten/kota yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB rata-rata lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah dan pendapatan perkapita lebih rendah rata-rata diatas pendapatan perkapita Sulawesi Tengah.
4. Tipologi 4 : Daerah relatif tertinggal ( *low growth and low income* ) merupakan kabupaten/kota yang mempunyai laju rata-rata pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita lebih rendah dari rata-rata laju pertumbuhan dan pendapatan perkapita Sulawesi tengah.

Berikut ini gambaran atau skema dari Tipologi Daerah

<b>Klasifikasi I</b> <b>Daerah Cepat maju dan</b> <b>Cepat Tumbuh</b>	<b>Klasifikasi II</b> <b>Daerah maju tapi tertekan</b>
<b>Klasifikasi III</b> <b>Daerah Berkembang Cepat</b>	<b>Klasifikasi IV</b> <b>Daerah Relatif Tertinggal</b>

Diharapkan dari analisis ini dapat ditentukan tipologi masing-masing kabupaten / kota yang dapat digunakan sebagai acuan pendukung untuk menentukan prioritas dalam pengembangan pembangunan wilayah.

#### **3.4.5 Menentukan prioritas sektor basis untuk pengembangan pembangunan Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.**

Dari hasil analisis LQ, S-S untuk keunggulan kompetitif dan spesialisasi serta tipologi daerah yang semuanya diskorkan sesuai dengan range yang ada di masing-masing sektor, maka dapat ditentukan wilayah yang diprioritaskan dalam pengembangan pembangunan bagi sektor-sektor yang potensial di Kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi

Tengah. Interval kelas mengikuti Tipologi Daerah, sedangkan rangenya (Purbayu dan Ashari, 2003) adalah:

$$R = \frac{\text{Nilai terbesar} - \text{Nilai terkecil}}{\text{Kelas}}$$

#### **3.4.6. Metode SIG untuk Pemetaan**

Peta merupakan data kualitatif ataupun yang disajikan dalam bentuk titik dan garis yang ditujukan untuk memperlihatkan tampilan proses studi langsung pada gambaran wilayah studi. Menurut Kustiwan dan Iwan (1997) Pembuatan peta melalui tehnik superimpose, yaitu menganalisis objek studi melalui peta dengan cara menumpang susunkan antara peta satu dengan lainnya, akan memberikan hasil maksimal, sehingga menghasilkan informasi yang diinginkan secara spasial.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

#### 4.1. Pembentukan Propinsi Sulawesi Tengah.

Sebelum pemerintahan Belanda berkuasa tahun 1905, Wilayah Sulawesi Tengah merupakan wilayah pemerintahan raja-raja yang berdiri sendiri. Namun dalam pemerintahan kolonial Belanda 1905–1918 Sulawesi Tengah diperintah dari tiga tempat yaitu, bagian barat yang kini dikenal sebagai bagian wilayah Kabupaten Donggala dan wilayah Buol Toli-toli, menjadi bagian Gubernur Sulawesi dengan pusat pemerintahan di Makasar. Bagian tengah yang terdiri atas wilayah bagian timur dari Kabupaten Donggala, dan wilayah Kabupaten Poso terletak di teluk Tomini, menjadi bagian dari karesidenan Sulawesi Utara dengan pusat pemerintahan di Manado Bagian timur, yang kini dikenal sebagai wilayah Kabupaten Banggai dan sebagian wilayah Kabupaten Poso.

Pada tahun 1919 diadakan pembagian administratif baru dengan menempatkan seluruh wilayah Sulawesi Tengah sebagai bagian dari karesidenan Sulawesi Utara. Sejak tahun itu pula raja-raja memperbaharui janji setia mereka kepada pemerintah Hindia Belanda dengan menanda tangani *Korte Verklaring*, sedangkan pemerintah atau wilayah raja-raja diatur dengan peraturan tanah-tanah “berpemerintahan sendiri” (*self bertoorsregelen*). Kondisi ini berlangsung sampai tahun 1942 disaat pemerintahan Jepang berkuasa.

Tahun 1945 setelah Negara Republik Indonesia memperoleh kemerdekaan situasi dalam negeri masih diwarnai oleh berbagai persoalan politik, dan Sulawesi Tengah melalui berbagai elemen masyarakatnya yang terhimpun dalam berbagai organisasi massa seperti GPPST (Gerakan Penuntut Propinsi Sulawesi Tengah), terbentuk tanggal 17

Agustus 1957 di Palu, GPST (Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah ) dibentuk tahun 1957 di Poso dengan tugas utamanya adalah menuntut kepada pemerintah pusat mengenai berdirinya Propinsi Sulawesi Tengah.

Melalui proses yang panjang akhirnya di tahun 1964 keinginan masyarakat Sulawesi Tengah menjadi kenyataan setelah Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor II/1964 Tentang pembentukan Propinsi Sulawesi Tengah dengan ibukota Palu, yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 13/1964 dan tanggal 13 April dilaksanakan upacara serah terima daerah Karesidenan Koordinator Sulawesi tengah dari Gubernur J.F Tumbelaka selaku penguasa Sulawesi Utara Tengah, kepada Gubernur Anwar Gelar Datuk Basa Nan Kuning sebagai Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah sesuai Keputusan Presiden No: 36/1964 tanggal 13 Februari 1964, dan tanggal 13 April ditetapkan sebagai hari ulangtahun Propinsi Sulawesi Tengah.

#### **4.2. Letak Geografis**

Propinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 68.033,71 km<sup>2</sup>, terletak diantara 2<sup>0</sup>22' Lintang Utara dan 3<sup>0</sup> 48' Lintang Selatan serta 119<sup>0</sup>22' dan 124<sup>0</sup>22' Bujur Timur dengan batas-batas Wilayahnya :

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi dan Propinsi Gorontalo
- Sebelah Timur : Propinsi Maluku
- Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat : Selat Makasar

Secara administratif terbagi dalam 9 Kabupaten dan 1 Kota dengan 99 Kecamatan serta 1.510 Desa/Kelurahan definitif dan 46 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). ( BPS, Sulawesi Tengah 2006). Luas wilayah sampai tahun 2006 adalah 68,033,71 Km<sup>2</sup> atau sekitar 3,66 % dari luas wilayah Indonesia serta 33,22 persen dari luas wilayah Pulau Sulawesi dan menempati urutan pertama. Kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Morowali yang dimekarkan dari kabupaten induknya Poso tahun 1999 yaitu sebesar 15.490,12 Km<sup>2</sup> atau 22,77 % dari seluruh luas wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, sedangkan yang paling kecil adalah Kota Palu dengan luas wilayah 395,06 Km<sup>2</sup> atau sekitar 0,58 % dari luas wilayah Propinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006**

No	Kabupaten / Kota	Luas wilayah ( km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas Provinsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab.Banggai Kepulauan	3.214,46	4,72
2.	Kab. Banggai	9.672,70	14,22
3.	Kab. Morowali	15.490,12	22,77
4.	Kab. Poso	8.712,25	12,81
5.	Kab. Donggala	10.471,71	15,39
6.	Kab. Parimo	6.231,85	9,16
7.	Kab. B u o l	4.043,57	5.94
8.	Kab. Toli-Toli	4.079,77	6.00
9.	Kab. Tojo Una-Una	5.721,51	8,41
10.	Kota P a l u	395,06	0,58

Sumber : Profil Sulawesi Tengah Tahun 2006

Selanjutnya Gambar 4.1 berikut memperlihatkan Peta Letak Propinsi Sulawesi Tengah di Pulau Sulawesi dan Wilayah Republik Indonesia sebagai berikut :



### 4.3. Demografi

Penduduk propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2003 sebanyak 2.242.915 jiwa meningkat pada tahun 2005 menjadi 2.284.659 jiwa dengan perincian 1.113.577 jiwa perempuan (48,74 %) dan 1.171.082 jiwa penduduk laki-laki (51,26 %) dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 34 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk Sulawesi Tengah belum menyebar secara merata di seluruh wilayah. Umumnya penduduk banyak menumpuk didaerah kota dibandingkan di Kabupaten. Secara rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Sulawesi Tengah 34 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk terbanyak berada di kabupaten Donggala dengan jumlah sebesar 443.415 ribu jiwa atau sekitar 19,12 persen dari total penduduk Sulawesi Tengah dan kabupaten yang mempunyai penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Buol hanya berjumlah 112 491 ribu jiwa atau sekitar 4,84 persen dari total penduduk Sulawesi Tengah. Namun jika dilihat dari kepadatan penduduk, maka kota Palu merupakan wilayah terpadat dibandingkan kabupaten lainnya yaitu sebesar 728 jiwa/Km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan penduduk terendah dimiliki kabupaten Morowali yaitu hanya sebesar 11 jiwa/Km<sup>2</sup>. Selanjutnya dapat dilihat Tabel 4.2 berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk**  
**Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2003 - 2005**

Indikator	Tahun		
	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Penduduk	2.242.915	2.324.506	2.284.659
Laki-laki (orang)	1.152.804	1.197.689	1.171.082
Perempuan (orang)	1.090.111	1.126.817	1.113.577
Kepadatan Penduduk	33	34	34
Laju Pertumbuhan (%)	1,91 *)	2,26 **)	1,97

Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Tengah

Keterangan : \*) Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2000-2003

\*\*\*) Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2000-2004

#### **4.4. Kondisi Perekonomian Propinsi Sulawesi Tengah**

Proses pemulihan ekonomi dari keadaan krisis multidimensional yang melanda Indonesia khususnya Sulawesi Tengah dimana terjadi konflik mengalami percepatan di tahun 2005. Meskipun dilihat secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir (tahun 2001–2005) seperti pada Tabel 4.3 ternyata belum menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi yang berarti, dimana posisi masing-masing sektor masih tetap meskipun terdapat perubahan besarnya kontribusi. Struktur ekonomi Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2001 sampai dengan 2005 seperti ditunjukkan dalam tabel 4.3, ternyata sektor pertanian masih merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Tengah, yaitu pada tahun 2001 kontribusinya sebesar 48,15 persen dan ditahun 2005 sebesar 46,00 persen.

Sektor lain yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan peranan sebesar 11,77 persen di tahun 2001 dan 12,19 persen pada tahun 2005. Kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB berasal dari sektor listrik dan air bersih hanya sebesar 0,76 persen pada tahun 2001 dan tahun 2005 sebesar 0,73 persen. Selanjutnya dapat terlihat dalam Tabel 4.3 berikut ini

**Tabel 4.3**  
**Struktur Ekonomi Propinsi Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2001 – 2005 ( Persentase)**

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	48,15	49,03	49,13	45,00	46,00
2. Penggalian	1,93	1,81	1,74	1,80	1,81
3. Industri Pengolahan	8,54	8,50	8,13	7,77	7,49
4. Listrik Dan Air Bersih	0,76	0,80	0,84	0,75	0,73
5. Bangunan	6,04	6,08	6,17	6,09	6,19
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,77	11,44	11,53	12,19	12,19
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7,11	7,01	6,94	6,55	6,38
8. Keuangan,Persewaan,Jasa Perusahaan	3,03	2,99	2,97	4,49	4,44
9. Jasa-jasa	12,69	12,35	12,37	15,36	14,77
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : BPS, Propinsi Sulawesi Tengah, Pendapaten Regional Sulawesi Tengah Tahun 2005.

Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di tahun 2005 sebesar 7,35 persen, lebih tinggi dari yang dicapai tahun 2002 yaitu sekitar 5,41 persen. Dari sisi produksi semua sektor mengalami percepatan, sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 7,56 persen dan sektor perdagangan sebesar 8,59 persen. Laju pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dalam laju pertumbuhan atas dasar harga konstan tahun 2000 provinsi Sulawesi Tengah tahun 2000 – 2005 dapat dilihat dalam Tabel 4.4 berikut :

**Tabel 4.4**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2001 – 2005 (persentase)**

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1. Pertanian	6,90	8,11	6,30	7,56
2. Pertambangan dan Penggalian	2,24	2,94	3,48	4,43
3. Industri pengolahan	3,53	3,32	5,57	2,74
4. Listrik dan air bersih	9,57	9,55	11,70	8,07
5. Bangunan	4,39	4,87	5,74	7,48
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,53	5,51	8,03	8,59
7. Angkutan dan komunikasi	4,44	4,70	8,08	8,51
8. Keuangan persewaan dan jasa perusahaan	5,58	5,28	6,66	8,28
9. Jasa-jasa	4,10	4,78	6,90	7,30
<b>PDRB</b>	<b>5,41</b>	<b>6,26</b>	<b>6,60</b>	<b>7,35</b>

Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Tengah

Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa laju pertumbuhan seluruh sektor menunjukkan kenaikan kecuali sektor industri pengolahan yang menunjukkan penurunan cukup drastis di tahun 2004 sebesar 5,57 persen menjadi 2,74 persen pada tahun 2005, pertumbuhan paling tinggi tahun 2002 – 2004 berasal dari sektor Listrik dan Air Bersih masing-masing sebesar 9,57 persen, 9,55 persen dan 11,70 persen dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, namun di tahun 2005 sektor tersebut turun menjadi 8,07 persen, sedangkan tahun 2005 sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mengalami pertumbuhan yang cukup besar yakni 8,59 persen diatas sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar 8,51 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan dan pendapatan perkapita di Propinsi Sulawesi Tengah tidak merata untuk setiap kabupaten dan kota,

karena masing-masing daerah mempunyai keunggulan dan kelemahan yang menjadi ciri khas daerah tersebut.

Secara rinci PDRB, Laju pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita perkabupaten untuk tahun 2005 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dapat terlihat dalam Tabel 4.5 berikut ini :

**Tabel 4.5**  
**PDRB, PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan PDRB**  
**Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan 2000**  
**Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005**

No	Kabupaten / Kota	PDRB (Juta Rp)	PDRB Perkapita (Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Banggai Kepulauan	500.313	4.493	6,06
2	Kab. Banggai	1.337.881	6.461	7,18
3	Kab. Morowali	1.021.431	7.864	7,53
4	Kab. Poso	764.782	6.294	7,59
5	Kab. Donggala	2.240.776	7.272	7,20
6	Kab. Toli-Toli	922.306	6.779	7,01
7	Kab. Buol	445.448	5.630	7,11
8	Kab. Parimo	2.076.360	8.666	7,30
9	Kab. Tojo Una-Una	344.541	3.278	6,83
10	Kota Palu	1.914.127	9.972	6,98
	Sulawesi Tengah	11.728.617	7.479	7,35

Sumber Data : BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2005

Pada Tabel 4.5, terlihat bahwa kabupaten yang mempunyai PDRB total terbesar adalah Kabupaten Donggala dengan nilai PDRB total sebesar Rp.2.240.776,- sedangkan PDRB perkapita tertinggi terdapat di Kota Palu dengan nilai sebesar Rp. 9.972,-. Hal ini cukup beralasan karena Kota Palu merupakan ibu kota Propinsi dengan tingkat aktivitas perekonomian yang tinggi. Kabupaten yang memiliki PDRB total dan PDRB perkapita terkecil adalah Kabupaten Tojo Una-Una dengan nilai PDRB total sebesar Rp. 344.541,-

dan PDRB perkapita sebesar Rp. 3.278,-, kondisi ini dapat dimaklumi karena Kabupaten Tojo Una-Una baru dimekarkan dari kabupaten induknya Poso pada tahun 2002

Jika dilihat dari laju pertumbuhan maka Kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan terbesar adalah Kabupaten Poso sebesar 7,59 persen diatas laju pertumbuhan Propinsi yang hanya sebesar 7,35 persen sedangkan kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan yakni sebesar 6,06 persen dibawah rata-rata laju pertumbuhan total Propinsi Sulawesi Tengah.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Sektor – Sektor Basis di masing-masing Kabupaten/Kota

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Menurut Glasson (1990) kegiatan-kegiatan Basis (*Basic activities*) adalah kegiatan mengekspor atau memasarkan barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (*Non basic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 1977).

Metode *Location Quotient* (LQ) adalah salah satu tehnik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan sektor basis atau non basis (Prasetyo, 2001: 41-53; Lincolyn, 1997: 290). Seperti diketahui bahwa sektor basis merupakan sektor-sektor yang mempunyai nilai  $LQ > 1$  sedang sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang mempunyai nilai  $LQ < 1$ .

Hasil perhitungan dengan metode LQ menunjukkan bahwa sejak tahun 2001 sampai tahun 2005 mengalami perubahan yang tidak berarti. Sektor basis ditiap kabupaten/kota cenderung tetap, tidak banyak sektor yang mengalami perubahan dari sektor bukan basis

ke sektor basis demikian pula sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa pembangunan di Kabupaten-Kabupaten dan Kota di Propinsi Sulawesi Tengah mulai tahun 2001 sampai 2005 tidak banyak mengalami perubahan.

Secara lengkap berikut ini dapat dijelaskan hasil analisis LQ untuk masing-masing sektor selama 6 tahun sejak tahun 2000 sampai tahun 2005.

#### **5.1.1. Sektor Pertanian**

Sektor pertanian merupakan sektor basis ditujuh kabupaten dari sepuluh kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tengah sejak awal tahun sampai akhir tahun analisis, kabupaten Poso mempunyai nilai  $LQ < 1$  di tahun 2000 dan pada tahun berikutnya 2001 sampai tahun 2005 sektor pertanian menjadi sektor basis bagi daerah ini. Kota Palu mempunyai nilai  $LQ < 1$  sejak tahun 2000 bahkan nilainya terus menurun sampai tahun 2005, sedangkan Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2000-2001 belum terhitung karena kabupaten tersebut baru dimekarkan dari kabupaten induknya Poso pada tahun 2001. Lengkapnya dapat terlihat dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota**  
**Untuk Sektor Pertanian Tahun 2000 – 2005**

No	Kabupaten/Kota	T a h u n					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab.Banggai Kepulauan	1,108	1,137	1,187	1,176	1,163	1,148
2	Kab. Banggai	1,148	1,119	1,198	1,216	1,227	1,237
3	Kab. Morowali	1,327	1,373	1,334	1,343	1,349	1,344
4	Kab. Poso	0,984	1,029	1,020	1,017	1,009	1,004
5	Kab. Donggala	1,062	1,027	1,088	1,096	1,095	1,099
6	Kab. Toli-Toli	1,078	1,027	1,087	1,096	1,095	1,099
7	Kab. Buol	1,203	1,247	1,217	1,231	1,244	1,256
8	Kab.Parimo	1,352	1,356	1,298	1,299	1,301	1,303
9	Kab. Tojo Una-Una	- *)	- *)	0,936	0,931	0,942	0,955
10	Kota Palu	0,088	0,087	0,069	0,067	0,066	0,065

Sumber : PDRB Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2000-2005 dan PDRB Sulawesi Tengah Tahun 2000 – 2005 ( diolah )

Keterangan : \*). Tidak ada data Tojo Una-Una dimekarkan tahun 2002

Pada Tabel 5.1 menggambarkan bahwa hasil analisis LQ pada sektor pertanian tahun 2000 – 2005, Kabupaten yang mempunyai sektor basis pertanian adalah kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai, Morowali, Donggala, Toli-toli, Buol dan Kabupaten Parimo. Khusus untuk kabupaten Poso hasil perhitungan menunjukkan pada tahun 2000 berada pada  $LQ < 1$ , padahal luas lahan pertanian yang dimilikinya sangat luas, hal ini dapat dimaklumi karena Kabupaten Poso tahun itu masih dilanda konflik.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor yang diunggulkan untuk wilayah Sulawesi Tengah karena delapan dari sepuluh kabupaten yang ada sektor pertanian merupakan sektor basis dan selama periode analisis sektor tersebut mempunyai kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDRB. Dengan kata lain sektor pertanian mempunyai kemampuan terhadap peningkatan perekonomian baik di kabupaten maupun di tingkat Propinsi. Sejalan dengan hal tersebut kebijakan

operasional pembangunan pertanian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2006–2011 selalu diarahkan pada penerapan sistem agribisnis terpadu dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya pertanian yang ada dalam satu kawasan ekosistem. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan bisa mengembangkan pertanian yang tangguh dengan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui peningkatan produktifitas tenaga kerja.

### **5.1.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian**

Hasil analisis LQ untuk sektor pertambangan dan penggalian hanya kota Palu yang menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor basis untuk daerahnya dengan nilai LQ tertinggi pada tahun 2003 sebesar 2,308 dan berubah pada tahun 2005 menjadi 2,214. Kabupaten Donggala pada awal periode mempunyai nilai  $LQ > 1$  untuk sektor ini yakni 1,378 namun sejak tahun 2001 sampai 2005 terus menurun dan tidak lagi menjadi sektor basis. Hal ini terjadi karena adanya perubahan dan inventarisasi serta pengalihan beberapa asset daerah ke Kota Palu serta terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Parimo. Gambaran lebih rinci dapat terlihat pada Tabel 5.2 berikut ini.

**Tabel 5.2**  
**Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota**  
**Untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian**  
**Tahun 2000 – 2005**

No	Kabupaten/Kota	T a h u n					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab.Banggai Kepulauan	0,311	0,306	0,323	0,326	0,319	0,314
2	Kab. Banggai	0,598	0,530	0,561	0,558	0,563	0,570
3	Kab. Morowali	0,262	0,263	0,264	0,263	0,264	0,279
4	Kab. Poso	0,517	0,520	0,467	0,461	0,456	0,447
5	Kab. Donggala	1,378	0,809	0,836	0,792	0,803	0,783
6	Kab. Toli-Toli	0,915	0,809	0,836	0,792	0,803	0,783
7	Kab. Buol	0,522	0,499	0,498	0,492	0,485	0,482
8	Kab.Parimo	0,696	0,715	0,646	0,644	0,635	0,627
9	Kab. Tojo Una-Una	- *)	- *)	0,722	0,724	0,727	0,702
10	Kota Palu	2,284	2,308	2,127	2,166	2,184	2,214

Sumber : PDRB Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2000-2005 dan PDRB Sulawesi Tengah Tahun 2000 – 2005 ( diolah )

Keterangan : \*). Tidak ada data Tojo Una-Una dimekarkan tahun 2002

### 5.1.3. Sektor Industri Pengolahan

Hasil analisis LQ pada sektor industri seperti terlihat dalam Tabel 5.3 menunjukkan bahwa terdapat empat kabupaten dan satu kota yang memiliki sektor basis di sektor industri selama periode analisis. Bagi kabupaten Donggala pada tahun 2000 sektor industri pengolahan belum termasuk sektor basis karena LQnya < 1 namun sejak tahun 2001 sektor ini mengalami kemajuan sehingga telah menjadi sektor basis bagi kabupaten ini. Jelasnya terlihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota**  
**Untuk Sektor Industri Pengolahan Tahun 2000 – 2005**

No	Kabupaten/Kota	T a h u n					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab.Banggai Kepulauan	0,0659	0,633	0,617	0,618	0,623	0,630
2	Kab. Banggai	1,066	1,052	1,017	1,011	1,007	1,011
3	Kab. Morowali	0,540	0,523	0,555	0,547	0,547	0,552
4	Kab. Poso	1,283	1,248	1,267	1,253	1,245	1,246
5	Kab. Donggala	0,547	1,076	1,042	1,037	1,029	1,017
6	Kab. Toli-Toli	1,097	1,076	1,042	1,037	1,029	1,017
7	Kab. Buol	1,236	1,207	1,195	1,173	1,149	1,140
8	Kab.Parimo	0,817	0,765	0,800	0,785	0,777	0,770
9	Kab. Tojo Una-Una	- *)	- *)	1,625	1,605	1,549	1,496
10	Kota Palu	1,839	1,865	1,791	1,824	1,857	1,869

Sumber : PDRB Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2000-2005 dan PDRB Sulawesi Tengah Tahun 2000 – 2005 ( diolah )

Keterangan : \*). Tidak ada data Tojo Una-Una dimekarkan tahun 2002

#### 5.1.4. Sektor Listrik dan Air Bersih

Kota Palu selama periode analisis menunjukkan nilai  $LQ > 1$  yang berarti sektor listrik dan air bersih menjadi sektor basis bagi kota Palu, sedangkan untuk kabupaten Poso mempunyai sektor basis pada sektor listrik dan air bersih pada tahun 2000-2001 dan berubah menjadi non basis pada empat tahun analisis berikutnya. Kabupaten Tojo Una-Una sejak tahun 2002-2005 mempunyai  $LQ > 1$  untuk sektor ini, yang berarti sejak dimekarkan Kabupaten ini mempunyai sektor basis untuk sektor Listrik dan Air bersih.

Jadi dari sepuluh kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tengah hanya terdapat dua kabupaten/kota yang memiliki sektor basis pada sektor ini selama tahun analisis. Berikut ini adalah hasil perhitungan LQ untuk sektor listrik dan air bersih selengkapnya :

**Tabel 5.4**  
**Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota**  
**Untuk Sektor Listrik dan Air Bersih Tahun 2000 – 2005**

No	Kabupaten/Kota	T a h u n					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab.Banggai Kepulauan	0,432	0,418	0,515	0,519	0,528	0,535
2	Kab. Banggai	0,602	0,516	0,641	0,647	0,654	0,658
3	Kab. Morowali	0,623	0,613	0,644	0,649	0,654	0,658
4	Kab. Poso	1,204	1,136	0,940	0,920	0,902	0,880
5	Kab. Donggala	0,334	0,574	0,690	0,680	0,665	0,647
6	Kab. Toli-Toli	0,761	0,574	0,690	0,680	0,665	0,647
7	Kab. Buol	0,845	0,812	0,812	0,811	0,810	0,807
8	Kab.Parimo	0,165	0,193	0,160	0,159	0,161	0,162
9	Kab. Tojo Una-Una	- *)	- *)	2,079	2,057	2,002	2,003
10	Kota Palu	3,593	3,532	3,188	3,209	3,227	3,248

Sumber : PDRB Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2000-2005 dan PDRB Sulawesi Tengah Tahun 2000 – 2005 ( diolah )

Keterangan : \*). Tidak ada data Tojo Una-Una dimekarkan tahun 2002

### 5.1.5. Sektor Bangunan

Untuk sektor bangunan dari 10 kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tengah hanya kota Palu yang mempunyai sektor basis di sektor bangunan konsisten selama periode analisis. Sedangkan kabupaten Banggai memiliki sektor basis pada sektor ini selang waktu tahun 2000 -2003 tahun selanjutnya LQnya menurun menjadi lebih kecil dari satu.

Kabupaten Poso mempunyai nilai  $LQ > 1$  yang berarti sektor bangunan merupakan sektor basis hanya pada 2000 dan selanjutnya berubah menjadi sektor non basis pada tahun 2001-2005. Hal ini disebabkan karena pasca kerusuhan pembangunan di wilayah tersebut terhenti karena kondisi keamanan yang belum kondusif dan masyarakat masih trauma dengan berbagai aksi pembakaran terhadap berbagai fasilitas baik perumahan maupun kantor-kantor pemerintahan dan rumah-rumah ibadah. Tabel 5.5 memperlihatkan hasil analisis LQ untuk Sektor Bangunan sebagai berikut :

**Tabel 5.5**  
**Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota**  
**Untuk Sektor Bangunan Tahun 2000 – 2005**

No	Kabupaten/Kota	T a h u n					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab.Banggai Kepulauan	0,161	0,155	0,166	0,169	0,171	0,174
2	Kab. Banggai	1,102	1,022	1,058	1,011	0,976	0,951
3	Kab. Morowali	0,546	0,516	0,572	0,567	0,574	0,563
4	Kab. Poso	1,019	0,952	0,379	0,387	0,391	0,392
5	Kab. Donggala	1,036	0,761	0,834	0,850	0,868	0,868
6	Kab. Toli-Toli	0,787	0,761	0,834	0,850	0,868	0,868
7	Kab. Buol	0,873	0,861	0,920	0,916	0,909	0,909
8	Kab.Parimo	0,866	0,848	0,873	0,876	0,879	0,898
9	Kab. Tojo Una-Una	- *)	- *)	0,972	0,980	0,988	1,006
10	Kota Palu	1,669	1,705	1,647	1,639	1,639	1,606

Sumber : PDRB Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2000-2005 dan PDRB Sulawesi Tengah Tahun 2000 – 2005 ( diolah )

Keterangan : \*). Tidak ada data, Tojo Una-Una dimekarkan tahun 2002

#### **5.1.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran**

Di Sulawesi Tengah aktifitas perdagangan khususnya sangat berfluktuasi, hal ini terjadi mengingat komoditi ekspor daerah Sulawesi Tengah masih didominasi oleh bahan mentah dan setengah jadi sehingga menciptakan nilai ekspor yang relatif rendah.

Hasil analisis LQ untuk Perdagangan, Hotel dan Restoran hanya tiga Kabupaten yang menunjukkan Sektor tersebut mempunyai LQ>1 atau sebagai sebagai sektor basis selama periode analisis yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan , Kabupaten Morowali dan Kabupaten Tojo Una-Una, sedangkan Kota Palu tahun 2000 – 2004 untuk sektor ini mempunyai LQ>1 tapi pada tahun 2005 sektor ini bagi Kota Palu berubah menjadi non basis. Selanjutnya lihat Tabel 5.6 menunjukkan hasil perhitungan LQ untuk sektor Perdagangan,Hotel dan Restoran selengkapnya.

**Tabel 5.6**  
**Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota**  
**Untuk Sektor Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran**  
**Tahun 2000 – 2005**

No	Kabupaten/Kota	T a h u n					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab.Banggai Kepulauan	1,563	1,539	1,548	1,555	1,573	1,592
2	Kab. Banggai	0,741	0,730	0,714	0,698	0,692	0,681
3	Kab. Morowali	1,106	1,069	1,131	1,125	1,131	1,130
4	Kab. Poso	0,990	0,968	1,084	1,120	1,155	1,191
5	Kab. Donggala	1,022	0,936	0,999	1,016	1,041	1,092
6	Kab. Toli-Toli	0,803	0,936	0,999	1,016	1,041	1,092
7	Kab. Buol	0,927	0,879	0,942	0,921	0,899	0,874
8	Kab.Parimo	1,001	1,073	0,982	0,978	0,969	0,959
9	Kab. Tojo Una-Una	- *)	- *)	1,012	1,056	1,056	1,002
10	Kota Palu	1,054	1,043	1,028	1,013	1,001	0,997

Sumber : PDRB Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2000-2005 dan PDRB Sulawesi Tengah Tahun 2000 – 2005 ( diolah )

Keterangan : \*). Tidak ada data Tojo Una-Una dimekarkan tahun 2002

#### **5.1.7. Sektor Pengangkutan Dan Komunikasi**

Hasil analisis LQ pada sektor Sektor Pengangkutan dan Komunikasi seperti terlihat dalam Tabel 5.7 menunjukkan bahwa dari sepuluh Kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah hanya terdapat dua daerah yang memiliki sektor basis di sektor Pengangkutan Dan Komunikasi yakni Kabupaten Parimo dan Kota Palu. Kabupaten Poso mempunyai nilai  $LQ > 1$  untuk sektor ini tahun 2000 namun ditahun 2001 untuk sektor ini berubah menjadi sektor non basis karena memiliki nilai  $LQ < 1$  selanjutnya pada tahun berikutnya sampai 2005 kembali sektor Pengangkutan dan Komunikasi ini menjadi sektor basis di Kabupaten ini. Jelasnya terlihat dalam Tabel 5.7 sebagai berikut:

**Tabel 5.7**  
**Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota**  
**Untuk Sektor Pengangkutan Dan Komunikasi**  
**Tahun 2000 – 2005**

No	Kabupaten/Kota	T a h u n					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab.Banggai Kepulauan	0,834	0,831	0,928	0,936	0,952	0,960
2	Kab. Banggai	0,727	0,615	0,682	0,680	0,679	0,680
3	Kab. Morowali	0,163	0,160	0,157	0,154	0,104	0,150
4	Kab. Poso	1,011	0,100	1,356	1,351	1,345	1,327
5	Kab. Donggala	0,693	0,848	0,928	0,933	0,957	0,937
6	Kab. Toli-Toli	1,004	0,848	0,928	0,933	0,957	0,937
7	Kab. Buol	0,535	0,532	0,526	0,528	0,533	0,533
8	Kab.Parimo	1,266	1,356	1,208	1,194	1,178	1,151
9	Kab. Tojo Una-Una	- *)	- *)	0,342	0,340	0,343	0,343
10	Kota Palu	1,930	1,969	1,802	1,809	1,823	1,838

Sumber : PDRB Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2000-2005 dan PDRB Sulawesi Tengah Tahun 2000 – 2005 ( diolah )

Keterangan : \*). Tidak ada data Tojo Una-Una dimekarkan tahun 2002

#### 5.1.8. Sektor Keuangan,Persewaan, Jasa Perusahaan

Hasil analisis LQ untuk sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan untuk kabupaten/kota lengkapnya terlihat sebagai berikut :

**Tabel 5.8**  
**Hasil perhitungan LQ tiap Kabupaten/Kota**  
**Untuk Sektor Keuangan,Persewaan, Jasa Perusahaan**  
**Tahun 2000 – 2005**

No	Kabupaten/Kota	T a h u n					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab.Banggai Kepulauan	1.415	1.317	1.003	1.019	1.011	1.006
2	Kab. Banggai	0.015	1.369	1.022	1.011	0.995	0.982
3	Kab. Morowali	0.940	0.853	0.985	0.971	0.979	0.977
4	Kab. Poso	0.774	0.704	0.754	0.757	0.753	0.749
5	Kab. Donggala	0.591	1.248	0.909	0.886	0.868	0.843
6	Kab. Toli-Toli	0.924	1.248	0.909	0.886	0.868	0.843
7	Kab. Buol	0.822	0.743	0.800	0.793	0.790	0.792
8	Kab.Parimo	0.102	0.099	0.130	0.130	0.133	0.137
9	Kab. Tojo Una-Una	- *)	- *)	1.087	1.077	1.074	1.086
10	Kota Palu	2.786	2.417	2.804	2.828	2.831	2.844

Sumber : PDRB Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2000-2005 dan PDRB Sulawesi Tengah Tahun 2000 – 2005 ( diolah )

Keterangan : \*). Tidak ada data Tojo Una-Una dimekarkan tahun 2002

Dari tabel 5.8 terlihat bahwa ada tiga Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai  $LQ > 1$  masing-masing kabupaten Banggai, Tojo Una-una dan kota Palu. Kabupaten lainnya yang menunjukkan angka fluktuasi adalah kabupaten Banggai dimana pada tahun 2000 sektor ini mempunyai nilai  $LQ < 1$  namun pada tahun 2001-2003 sektor ini berubah menjadi sektor basis, dan pada tahun 2004-2005 kembali menjadi sektor non basis karena nilai  $LQ$ nya berubah menjadi lebih kecil dari satu.

### 5.1.9. Sektor Jasa – Jasa

Hasil analisis  $LQ$  pada sektor jasa-jasa seperti terlihat dalam tabel 5.9 menunjukkan bahwa hanya kabupaten Tojo Una-una dan kota Palu yang memiliki sektor basis di sektor jasa-jasa. Kabupaten Donggala di tahun 2000-2001 memiliki sektor basis di sektor ini namun tahun 2002-2005 menunjukkan perubahan dimana sektor ini menjadi sektor non basis. Jelasnya terlihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.9**  
**Hasil perhitungan  $LQ$  tiap Kabupaten/Kota**  
**Untuk Sektor Jasa – Jasa Tahun 2000 – 2005**

No	Kabupaten/Kota	T a h u n					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab.Banggai Kepulauan	0.820	0.785	0.656	0.664	0.670	0.675
2	Kab. Banggai	0.860	1.031	0.837	0.824	0.816	0.807
3	Kab. Morowali	0.842	0.788	0.793	0.771	0.759	0.743
4	Kab. Poso	1.017	0.956	0.971	0.955	0.956	0.948
5	Kab. Donggala	1.262	1.126	0.884	0.850	0.819	0.787
6	Kab. Toli-Toli	0.998	1.126	0.884	0.850	0.819	0.787
7	Kab. Buol	0.656	0.616	0.690	0.678	0.667	0.657
8	Kab.Parimo	0.009	0.008	0.543	0.547	0.554	0.559
9	Kab. Tojo Una-Una	- *)	- *)	1.128	1.117	1.107	1.139
10	Kota Palu	2.153	2.065	1.920	1.933	1.938	1.952

Sumber : PDRB Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2000-2005 dan PDRB Sulawesi Tengah Tahun 2000 – 2005 ( diolah )

Keterangan : \*). Tidak ada data Tojo Una-Una, dimekarkan tahun 2002

Dari 9 sektor yang ada dan 9 kabupaten serta 1 kota terdapat beberapa daerah yang mempunyai lebih dari 1 sektor basis konsisten sepanjang tahun analisis meskipun ada pula yang hanya memiliki 1 sektor basis saja. Kota Palu merupakan daerah yang paling banyak memiliki sektor basis yaitu sebanyak 8 sektor kecuali sektor pertanian. Sedangkan kabupaten yang memiliki sektor basis paling sedikit adalah kabupaten Donggala yang hanya memiliki 1 sektor basis konsisten sepanjang tahun analisis yakni sektor pertanian.

Urutan terbanyak lainnya adalah kabupaten Tojo Una-Una memiliki 5 sektor basis, kabupaten lainnya dengan 3 sektor basis masing-masing adalah kabupaten Banggai dan Poso dan yang mempunyai sektor basis 2 adalah kabupaten Morowali, Toli-toli, Buol dan Parimo. Sektor Pertanian merupakan sektor basis di Propinsi Sulawesi Tengah karena 9 kabupatennya mempunyai sektor basis pertanian. Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor basis bagi 6 Kabupaten/kota dan sektor basis yang hanya dimiliki oleh Kota Palu yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian. Secara rinci kompilasi analisis LQ untuk 10 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai sektor basis konsisten sepanjang tahun analisis terlihat dalam Tabel 5.10 berikut :

**Tabel 5.10**  
**Hasil Kompilasi Analisis LQ di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000-2005**

No	Kabupaten/Kota	Sektor									Jumlah Sektor Basis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Kab. Banggai Kepulauan	X					X		X		3
2	Kab. Banggai	X		X		X					3
3	Kab. Morowali	X					X				2
4	Kab. Poso	X		X				X			3
5	Kab. Donggala	X									1
6	Kab. Toli-Toli	X		X							2
7	Kab. Buol	X		X							2
8	Kab. Parimo	X						X			2
9	Kab. Tojo Una-Una			X	X		X		X	X	5
10	Kota Palu		X	X	X	X	X	X	X	X	8
Jumlah Kabupaten/Kota		8	1	6	2	2	4	3	3	2	

Sumber : Hasil analisis LQ per sektor

Keterangan : 1. Pertanian . 2. Pertambangan dan Penggalian . 3. Industri Pengolahan .  
4. Listrik, Gas dan Air Bersih . 5. Bangunan . 6. Perdagangan Hotel & Restoran .  
7. Pengangkutan & Telekom. 8. Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan . 9. Jasa - jasa

## 5.2. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis model rasio pertumbuhan (MRP) merupakan salah satu alat analisis alternatif guna mendukung penentuan deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial bagi kabupaten/kota di provinsi Sulawesi tengah, MRP ini memiliki kemiripan dengan LQ, perbedaannya terletak pada cara menghitung, jika LQ menggunakan distribusi sedangkan MRP menggunakan kriteria pertumbuhan. Kedua hitungan ini MRP dan LQ (*overlay*) digabung untuk mendapatkan hasil indentifikasi kegiatan sektor yang unggul, baik dari sisi kontribusi maupun sisi pertumbuhannya (Yusuf,1999).

Melalui *overlay* antara rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPr), rasio pertumbuhan wilayah study (RPs) dan *location quotient* (LQ) dapat ditunjukkan identifikasi kegiatan-kegiatan unggulan. Koefisien dari ketiga komponen ini harus disamakan satuannya dengan diberi tanda atau notasi positif (+) atau negatif (-).

Notasi positif (+) berarti koefisien komponen bernilai lebih dari satu, dan negatif (-) apabila kurang dari satu. RPr bernotasi positif artinya pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibanding pertumbuhan total di wilayah referensi. RPs bernotasi positif berarti pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibanding pertumbuhan sektor yang sama di wilayah studi. Sedang LQ bernotasi positif berarti kontribusi sektor i terhadap PDRB di wilayah studi lebih tinggi dibanding kontribusi sektor yang sama terhadap PDRB di wilayah referensi.

Identifikasi unggulan dari hasil *overlay* dibedakan dalam dua kriteria. **Pertama**, notasi *overlay* ketiga komponen bertanda positif (+++), artinya kegiatan tersebut mempunyai pertumbuhan sektoral di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah tinggi, pertumbuhan sektoral kabupaten/kota lebih tinggi dari Sulawesi Tengah, dan kontribusi

sektoral kabupaten/kota lebih tinggi pula dari Propinsi Sulawesi Tengah. Artinya bahwa sektor ekonomi tersebut mempunyai potensi daya saing kompetitif dan komparatif di Kabupaten/Kota lebih unggul dibandingkan kegiatan yang sama pada tingkat Sulawesi Tengah, dan di Sulawesi Tengah sendiri sektor mempunyai prospek yang bagus ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan total kegiatan ekonomi. **Kedua**, demikian sebaliknya jika ketiganya bernotasi negatif (---). **Ketiga**, Jika hasil overlay bertanda positif pada RPs dan LQ menunjukkan bahwa kegiatan sektoral di kabupaten/kota lebih unggul dari kegiatan yang sama di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah, dilihat dari sisi pertumbuhan dan kontribusinya, dengan kata lain bahwa sektor tersebut menunjukkan *spesialisasi* kegiatan ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah.

### **5.2.1 Analisis MRP Kabupaten Banggai Kepulauan**

Menurut analisis MRP di kabupaten Banggai Kepulauan setelah di overlay tak satu pun sektor ekonomi bernotasi positif untuk ketiga komponen, sebaliknya bernotasi negatif untuk ketiga komponen baik RPr, RPs dan LQ artinya kegiatan tersebut mempunyai pertumbuhan sektoral di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah rendah, pertumbuhan sektoral Kabupaten Banggai Kepulauan lebih rendah dari Propinsi Sulawesi Tengah, dan kontribusi sektoral Kabupaten Banggai Kepulauan rendah pula dari Propinsi Sulawesi Tengah. Terdapat 5 sektor yang bernotasi negatif pada ketiga komponen yakni sektor pertanian; Pertambangan, Penggalian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan; Pengangkutan dan Komunikasi. Selanjutnya lihat Tabel 5.11 sebagai berikut :

**Tabel 5.11**  
**Overlay RPr, RPs dan LQ Perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan**  
**Tahun 2000-2005**

No	Lapangan Usaha	RPr		RPs		LQ		Overlay
		Riil	Notasi	Riil	Notasi	Riil	Notasi	Notasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertanian	0,80	-	0,05	-	0,99	-	---
2	Pertambangan & Penggalian	0,65	-	0,01	-	0,32	-	---
3	Industri Pengolahan	1,07	+	0,02	-	0,63	-	+-
4	Listrik, gas & air minum	0,51	-	0,04	-	0,49	-	---
5	Bangunan	0,73	-	0,01	-	0,17	-	---
6	Perdagangan, hotel & restoran	1,26	+	0,07	-	1,56	+	+++
7	Pengangkutan & komunikasi	0,49	-	0,06	-	0,91	-	---
8	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	2,18	+	0,02	-	1,15	+	+++
9	Jasa-jasa	1,71	+	0,02	-	0,71	-	+-

Sumber : PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan dan  
PDRB Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000-2005 (diolah)

### 5.2.2 Analisis MRP Kabupaten Banggai

Hasil hitungan MRP di kabupaten Banggai setelah di overlay tak satu pun sektor ekonomi masuk dalam kriteria pertama yang bernotasi positif untuk ketiga komponen, sebaliknya ada yang bernotasi negatif untuk ketiga komponen baik RPr, RPs dan LQ artinya sektor tersebut mempunyai pertumbuhan sektoral di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah rendah, pertumbuhan sektoral Kabupaten Banggai lebih rendah dari Propinsi Sulawesi Tengah, dan kontribusi sektoral Kabupaten Banggai rendah pula dari Propinsi Sulawesi Tengah. Terdapat 3 sektor yang bernotasi negatif pada ketiga komponen yakni sektor Pertambangan, Penggalian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Pengangkutan dan Komunikasi. Sektor lain notasinya bervariasi seperti terlihat pada Tabel 5.12 berikut :

**Tabel 5.12**  
**Overlay RPr, RPs dan LQ Perekonomian Kabupaten Banggai**  
**Tahun 2000-2005**

No	Lapangan Usaha	RPr		RPs		LQ		Overlay
		Riil	Notasi	Riil	Notasi	Riil	Notasi	Notasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertanian	0,80	-	0,19	-	1,19	+	--+
2	Pertambangan & Penggalian	0,65	-	0,07	-	0,56	-	---
3	Industri Pengolahan	1,07	+	0,12	-	1,03	+	++
4	Listrik, gas & air minum	0,51	-	0,12	-	0,62	-	---
5	Bangunan	0,72	-	0,07	-	1,02	+	--+
6	Perdagangan, hotel & restoran	1,26	+	0,07	-	0,71	-	+-
7	Pengangkutan & komunikasi	0,49	-	0,07	-	0,68	-	---
8	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	2,18	+	0,12	-	1,06	+	++
9	Jasa-jasa	1,71	+	0,09	-	0,86	-	+-

Sumber : PDRB Kabupaten Banggai dan  
PDRB Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000-2005 (diolah)

### 5.2.3 Analisis MRP Kabupaten Morowali

Tidak terdapat satupun sektor ekonomi di Kabupaten Morowali setelah di overlay masuk dalam kriteria pertama yang bernotasi positif untuk ketiga komponen, sebaliknya yang bernotasi negatif ketiga komponen terdapat pada 4 sektor yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan serta Pengangkutan dan Komunikasi. seperti ditunjukkan pada tabel 5.13 berikut.

**Tabel 5.13**  
**Overlay RPr, RPs dan LQ Perekonomian Kabupaten Morowali**  
**Tahun 2000-2005**

No	Lapangan Usaha	RPr		RPs		LQ		Overlay
		Riil	Notasi	Riil	Notasi	Riil	Notasi	Notasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertanian	0,80	-	0,13	-	1,34	+	--+
2	Pertambangan & Penggalian	0,65	-	0,03	-	0,26	-	---
3	Industri Pengolahan	1,07	+	0,05	-	0,54	-	+--
4	Listrik, gas & air minum	0,51	-	0,08	-	0,64	-	---
5	Bangunan	0,73	-	0,06	-	0,56	-	---
6	Perdagangan, hotel & restoran	1,26	+	0,11	-	1,12	+	+++
7	Pengangkutan & komunikasi	0,49	-	0,01	-	0,15	-	---
8	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	2,18	+	0,09	-	0,95	-	+--
9	Jasa-jasa	1,71	+	0,06	-	0,78	-	+--

Sumber : PDRB Kabupaten Morowali dan  
PDRB Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000-2005 (diolah)

#### 5.2.4 Analisis MRP Kabupaten Poso

Hasil hitungan MRP di kabupaten Poso setelah di overlay tak satu pun sektor ekonomi masuk dalam kriteria pertama yang bernotasi positif untuk ketiga komponen, namun terdapat 2 sektor ekonomi yang bernotasi negatif pada ketiga komponen masing-masing sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Bangunan. Sektor lainnya yang bernotasi positif pada RPr dan LQ adalah sektor Industri Pengolahan serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, yang berarti sektor tersebut mempunyai pertumbuhan sektoral di Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah tinggi, dan kontribusi sektoral Kabupaten Poso lebih tinggi dari Propinsi Sulawesi Tengah. Secara rinci hasil MRP dapat dilihat pada Tabel 5.14 berikut.

**Tabel 5.14**  
**Overlay RPr, RPs dan LQ Perekonomian Kabupaten Poso**  
**Tahun 2000-2005**

No	Lapangan Usaha	RPr		RPs		LQ		Overlay
		Riil	Notasi	Riil	Notasi	Riil	Notasi	Notasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertanian	0,80	-	-0,06	-	1,01	+	--+
2	Pertambangan & Penggalian	0,65	-	-0,07	-	0,48	-	---
3	Industri Pengolahan	1,07	+	-0,05	-	1,26	+	++
4	Listrik, gas & air minum	0,51	-	-0,30	-	1,00	+	--+
5	Bangunan	0,73	-	-0,26	-	0,59	-	---
6	Perdagangan, hotel & restoran	1,26	+	0,02	-	1,08	+	++
7	Pengangkutan & komunikasi	0,49	-	-0,03	-	1,23	+	--+
8	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	2,18	+	0,01	-	0,75	-	+-
9	Jasa-jasa	1,71	+	-0,01	-	0,97	-	+-

Sumber : PDRB Kabupaten Poso dan  
PDRB Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000-2005 (diolah)

### 5.2.5 Analisis MRP Kabupaten Donggala

Analisis MRP di Kabupaten Donggala setelah di overlay menunjukkan hasil bahwa tidak satupun sektor ekonomi masuk dalam kriteria pertama yang bernotasi positif untuk ketiga komponen, namun terdapat 4 sektor ekonomi yang bernotasi negatif pada ketiga komponen, masing-masing sektor Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Sektor Bangunan serta Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Terdapat 1 sektor yang bernotasi positif untuk komponen RPr dan LQ yakni Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, yang berarti pertumbuhan sektoralnya di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah tinggi, dan kontribusi sektoral Kabupaten Donggala lebih tinggi dari Propinsi Sulawesi Tengah. Secara jelas ditunjukkan pada Tabel 5.15 berikut.

**Tabel 5.15**  
**Overlay RPr, RPs dan LQ Perekonomian Kabupaten Donggala**  
**Tahun 2000-2005**

No	Lapangan Usaha	RPr		RPs		LQ		Overlay
		Riil	Notasi	Riil	Notasi	Riil	Notasi	Notasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertanian	0,80	-	0,19	-	1,08	+	--+
2	Pertambangan & Penggalian	0,65	-	0,29	-	0,90	-	---
3	Industri Pengolahan	1,07	+	0,10	-	0,96	-	+--
4	Listrik, gas & air minum	0,51	-	0,12	-	0,60	-	---
5	Bangunan	0,73	-	0,35	-	0,87	-	---
6	Perdagangan, hotel & restoran	1,26	+	0,14	-	1,02	+	+++
7	Pengangkutan & komunikasi	0,49	-	0,26	-	0,88	-	---
8	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	2,18	+	0,04	-	0,89	-	+--
9	Jasa-jasa	1,71	+	0,13	-	0,96	-	+--

Sumber : PDRB Kabupaten Donggala dan  
PDRB Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000-2005 (diolah)

### 5.2.6 Analisis MRP Kabupaten Toli -Toli

Hasil hitungan MRP di Kabupaten Toli-Toli setelah di overlay tak satu pun sektor ekonomi masuk dalam kriteria pertama yang bernotasi positif untuk ketiga komponen, sebaliknya terdapat 4 sektor ekonomi yang bernotasi negatif pada ketiga komponen yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan serta Pengangkutan dan Komunikasi. Terdapat 1 sektor yang bernotasi positif untuk komponen RPr dan LQ yakni Sektor Industri Pengolahan berarti pertumbuhan sektoralnya di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah tinggi, dan kontribusi sektoral Kabupaten Toli-Toli lebih tinggi dari Propinsi Sulawesi Tengah. Secara jelas ditunjukkan pada Tabel 5.16 berikut.

**Tabel 5.16**  
**Overlay RPr, RPs dan LQ Perekonomian Kabupaten Toli-Toli**  
**Tahun 2000-2005**

No	Lapangan Usaha	RPr		RPs		LQ		Overlay
		Riil	Notasi	Riil	Notasi	Riil	Notasi	Notasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertanian	0,80	-	0,13	-	1,08	+	--+
2	Pertambangan & Penggalian	0,65	-	0,05	-	0,82	-	---
3	Industri Pengolahan	1,07	+	0,09	-	1,05	+	++
4	Listrik, gas & air minum	0,51	-	0,04	-	0,67	-	---
5	Bangunan	0,73	-	0,12	-	0,83	-	---
6	Perdagangan, hotel & restoran	1,26	+	0,15	-	0,98	-	++
7	Pengangkutan & komunikasi	0,49	-	2,10	-	0,94	-	---
8	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	2,18	+	0,07	-	0,95	-	++
9	Jasa-jasa	1,71	+	0,05	-	0,91	-	++

Sumber : PDRB Kabupaten Toli-Toli dan  
PDRB Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000-2005 (diolah)

### 5.2.7 Analisis MRP Kabupaten Buol

Hasil hitungan MRP di kabupaten Buol setelah di overlay menunjukkan kriteria yang sama dengan Kabupaten Toli-Toli yakni tak satu pun sektor ekonomi masuk dalam kriteria pertama yang bernotasi positif untuk ketiga komponen, sebaliknya terdapat 4 sektor ekonomi yang bernotasi negatif pada ketiga komponen yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan serta Pengangkutan dan Komunikasi. Terdapat 1 sektor yang bernotasi positif untuk komponen RPr dan LQ yakni Sektor Industri Pengolahan berarti pertumbuhan sektoralnya di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah tinggi, dan kontribusi sektoral Kabupaten Buol lebih tinggi dari Propinsi Sulawesi Tengah. Secara rinci terlihat pada Tabel 5.17 berikut.

**Tabel 5.17**  
**Overlay RPr, RPs dan LQ Perekonomian Kabupaten Buol**  
**Tahun 2000-2005**

No	Lapangan Usaha	RPr		RPs		LQ		Overlay
		Riil	Notasi	Riil	Notasi	Riil	Notasi	Notasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertanian	0,80	-	0,06	-	1,23	+	--+
2	Pertambangan & Penggalian	0,65	-	0,02	-	0,50	-	---
3	Industri Pengolahan	1,07	+	0,04	-	1,18	+	++
4	Listrik, gas & air minum	0,51	-	0,03	-	0,82	-	---
5	Bangunan	0,73	-	0,04	-	0,90	-	---
6	Perdagangan, hotel & restoran	1,26	+	0,03	-	0,90	-	++
7	Pengangkutan & komunikasi	0,49	-	0,02	-	0,53	-	---
8	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	2,18	+	0,03	-	0,79	-	++
9	Jasa-jasa	1,71	+	0,03	-	0,66	-	++

Sumber : PDRB Kabupaten Buol dan  
PDRB Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000-2005 (diolah)

### 5.2.8 Analisis MRP Kabupaten Parigi Moutong

Analisis MRP di Kabupaten Parigi Moutong setelah di overlay menunjukkan tidak satupun sektor ekonomi masuk dalam kriteria pertama yang bernotasi positif untuk ketiga komponen, sebaliknya terdapat 3 sektor ekonomi yang bernotasi negatif pada ketiga komponen, masing-masing sektor Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air Bersih; dan Sektor Bangunan. Secara jelas ditunjukkan pada Tabel 5.18 berikut.

**Tabel 5.18**  
**Overlay RPr, RPs dan LQ Perekonomian Kabupaten Parigi Moutong**  
**Tahun 2000-2005**

No	Lapangan Usaha	RPr		RPs		LQ		Overlay
		Riil	Notasi	Riil	Notasi	Riil	Notasi	Notasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertanian	0,80	-	0,20	-	1,32	+	--+
2	Pertambangan & Penggalian	0,64	-	0,06	-	0,66	-	---
3	Industri Pengolahan	1,07	+	0,11	-	0,79	-	+--
4	Listrik, gas & air minum	0,51	-	0,02	-	0,17	-	---
5	Bangunan	0,73	-	0,17	-	0,88	-	---
6	Perdagangan, hotel & restoran	1,23	+	0,15	-	0,99	-	+--
7	Pengangkutan & komunikasi	0,49	-	0,09	-	1,22	+	--+
8	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	2,18	+	0,03	-	0,12	-	+--
9	Jasa-jasa	1,71	+	0,24	-	0,37	-	+--

Sumber : PDRB Kabupaten Parigi Moutong dan PDRB Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000-2005 (diolah)

### 5.2.9 Analisis MRP Kabupaten Tojo Una-Una

Hasil hitungan MRP di Kabupaten Tojo Una-Una setelah di overlay tak satu pun sektor ekonomi masuk dalam kriteria pertama yang bernotasi positif untuk ketiga komponen, sebaliknya terdapat 3 sektor ekonomi yang bernotasi negatif pada ketiga komponen, masing-masing sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Bangunan serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Terdapat 2 sektor yang bernotasi positif untuk komponen RPr dan LQ yakni Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Berarti pertumbuhan sektoralnya di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah tinggi, dan kontribusi sektoral Kabupaten Tojo Una-Una lebih tinggi dari Propinsi Sulawesi Tengah. Hasil selengkapnya terlihat pada Tabel 5.19 berikut.

**Tabel 5.19**  
**Overlay RPr, RPs dan LQ Perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una**  
**Tahun 2000-2005**

No	Lapangan Usaha	RPr		RPs		LQ		Overlay
		Riil	Notasi	Riil	Notasi	Riil	Notasi	Notasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertanian	1,03	+	0,03	-	0,94	-	+ - -
2	Pertambangan & Penggalian	0,90	-	0,02	-	0,72	-	- - -
3	Industri Pengolahan	0,89	-	0,02	-	1,57	+	- - +
4	Listrik, gas & air minum	1,14	+	0,05	-	1,36	+	+ - +
5	Bangunan	0,94	-	0,03	-	0,99	-	- - -
6	Perdagangan, hotel & restoran	1,19	+	0,03	-	1,03	+	+ - +
7	Pengangkutan & komunikasi	0,89	-	0,01	-	0,34	-	- - -
8	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	0,88	-	0,03	-	1,08	+	- - +
9	Jasa-jasa	0,92	-	0,03	-	1,13	+	- - +

Sumber : PDRB Kabupaten Tojo Una-Una dan  
PDRB Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000-2005 (diolah)

#### 5.2.10 Analisis MRP Kota Palu

Hasil hitungan MRP di Kota Palu setelah di overlay tak satu pun sektor ekonomi masuk dalam kriteria pertama yang bernetasi positif untuk ketiga komponen, sebaliknya Sektor Pertanian bernetasi negatif pada ketiga komponen, Terdapat 4 sektor yang bernetasi positif untuk komponen RPr dan LQ, masing-masing Sektor Industri Pengolahan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-jasa. Hasil selengkapnya terlihat pada Tabel 5.20 berikut.

**Tabel 5.20**  
**Overlay RPr, RPs dan LQ Perekonomian Kota Palu**  
**Tahun 2000-2005**

No	Lapangan Usaha	RPr		RPs		LQ		Overlay
		Riil	Notasi	Riil	Notasi	Riil	Notasi	Notasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertanian	0,80	-	0,00	-	0,08	-	---
2	Pertambangan & Penggalian	0,65	-	0,44	-	2,21	+	--+
3	Industri Pengolahan	1,07	+	0,38	-	1,84	+	+++
4	Listrik, gas & air minum	0,51	-	0,51	-	3,33	+	--+
5	Bangunan	0,73	-	0,31	-	1,65	+	--+
6	Perdagangan, hotel & restoran	1,26	+	0,17	-	1,02	+	+++
7	Pengangkutan & komunikasi	0,49	-	0,36	-	1,86	+	--+
8	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	2,18	+	0,52	-	2,75	+	+++
9	Jasa-jasa	1,71	+	0,32	-	2,00	+	+++

Sumber : PDRB Kota Palu dan  
PDRB Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000-2005 (diolah)

Dari hasil analisis MRP diatas secara keseluruhan terlihat bahwa tidak satupun sektor ekonomi yang dimiliki Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah masuk dalam kriteria pertama yang bernotasi positif untuk ketiga komponen (+++), artinya bahwa Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki sektor yang mempunyai pertumbuhan sektoral di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah tinggi, pertumbuhan sektoral kabupaten/kota lebih tinggi dari Sulawesi Tengah, dan kontribusi sektoral kabupaten/kota lebih tinggi pula dari Propinsi Sulawesi Tengah, atau yang memiliki sektor dengan potensi daya saing kompetitif dan komparatif di Kabupaten/Kota lebih unggul dibandingkan kegiatan yang sama pada tingkat Propinsi Sulawesi Tengah, dan di Sulawesi Tengah sendiri sektor mempunyai prospek yang bagus. Sebaliknya terdapat 4 Kabupaten yang memiliki sektor ekonomi yang bertanda negatif untuk ketiga komponen (---) masing – masing Kabupaten Morowali, Donggala, Toli-Toli dan Kabupaten Buol

dengan sektor yang sama yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas, Air Bersih; Sektor Bangunan serta Sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

Kabupaten yang memiliki sektor yang bertanda negatif untuk ketiga komponen terbanyak adalah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi Sektor Pertanian; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan serta Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh keadaan topografi dari Kabupaten Banggai Kepulauan yang terdiri dari gugusan Pulau-Pulau yang diantarai oleh lautan lepas dengan sarana prasarana yang relatif terbatas. Kota Palu hanya memiliki 1 sektor yang bernotasi negatif untuk ketiga komponen yaitu sektor Pertanian dan terdapat empat sektor yang bernilai positif untuk komponen RPr dan LQ.

### 5.3 Hasil Analisis Shift-Share Tentang Keunggulan Komparatif dan Spesialisasi

Analisis Shift – Share merupakan tehnik yang menggambarkan *performance* (kinerja) sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan kinerja sektor-sektor perekonomian nasional. Dengan demikian dapat ditemukan adanya *shift* (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah, bila daerah itu memperoleh kemajuan lebih lambat atau lebih cepat dari kemajuan nasional. (Bendavid - Val (1983), Hoover (1984) Lihat Prasetyo, 1993: 44). Selanjutnya Lincolyn Arsyad (1997: 290) dan Latif Adam (1994), mengemukakan bahwa analisis *shift-share* merupakan tehnik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tehnik ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor di suatu wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya, dan mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan-perbandingan itu. Bila penyimpangan itu positif, hal itu disebut keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis shift-share (S-S) tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi menurut sektor di kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tengah, terlihat bahwa tak satu pun kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah memiliki keunggulan kompetitif. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita kabupaten dan kota di Propinsi Sulawesi Tengah ditopang oleh sektor spesialis dan tidak memiliki keunggulan kompetitif.

Daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang mempunyai spesialisasi ditandai dengan nilai S-S positif, untuk sektor pertanian terdapat empat Kabupaten/Kota yang mempunyai spesialisasi masing-masing di Kabupaten Poso, Donggala, Tojo Una-Una,

dan Kota Palu, sebaliknya ada enam kabupaten bernilai S-S negatif artinya tidak memiliki spesialisasi.

Spesialisasi di sektor pertambangan dan penggalian dimiliki oleh kabupaten Banggai Kepulauan, Buol, Parigi Moutong, dan Tojo Una-Una. Dari sepuluh kabupaten/kota terdapat enam yang memiliki spesialisasi di sektor listrik, gas dan air bersih yakni Kabupaten Poso, Toli-Toli, Buol, Parigi Moutong, Tojo Una-Una dan Kota Palu. Spesialis di sektor bangunan dijumpai di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Poso. Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai, Poso, Donggala, Buol, dan Tojo Una-Una berspesialisasi di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedang kabupaten Banggai, Morowali, Poso, Parigi Moutong dan Tojo Una-una bertumpu pada sektor pengangkutan dan komunikasi.

Kabupaten yang spesialisasinya di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dimiliki oleh kabupaten Banggai Kepulauan, Poso, Donggala, Buol dan Tojo Una-Una. Sedang Kabupaten/Kota yang berspesialisasi pada sektor jasa-jasa adalah Kabupaten Banggai Kepulauan, Morowali, Poso, Donggala, Tojo Una-Una, dan Kota Palu. Lengkapnya dapat terlihat pada Tabel 5.21 berikut :

**Tabel 5.21**  
**Hasil Analisis Shift-Share Tentang Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi**  
**menurut Sektor di Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Tengah**

Kabupaten/ Kota		S e k t o r																	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		S	K	S	K	S	K	S	K	S	K	S	K	S	K	S	K	S	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Bangkep	(291,6)	0,0	54,0	0,0	1.329,3	0,0	(259,3)	0,2	(718,7)	0,1	1.673,2	0,0	(2.660,1)	0,1	5.226,0	0,5	7.631,4	0,5
2	Banggai	(112.216,9)	0,2	(699,7)	0,0	(13.905,9)	0,2	(500,6)	0,2	1.451,0	0,1	1.451,0	0,1	534,9	0,0	(18.341,0)	0,0	(38.750,2)	0,0
3	Morowali	(14.758,1)	0,1	(339,5)	0,1	(1.212,2)	0,1	(280,2)	0,1	(1.291,6)	0,1	(4.043,9)	0,0	530,4	0,1	(1.290,0)	0,8	7.441,1	0,2
4	Poso	145.446,1	0,0	4.639,3	0,1	25.788,4	0,0	5.252,7	0,0	45.340,2	0,0	15.236,4	0,2	15.272,8	0,0	1.868,3	0,0	24.557,3	0,0
5	Donggaa	25.045,3	0,0	(406,3)	0,0	3.150,0	0,0	(564,5)	0,2	(17.394,4)	0,2	25.133,0	0,2	(12.578,1)	0,2	10.402,0	0,6	56.733,1	0,4
6	Toli-toli	(74.579,5)	0,2	(157,8)	0,1	(12.206,1)	0,1	310,9	0,0	(10.388,3)	0,3	(50.561,9)	0,8	(2.443,2)	0,1	(11.508,5)	0,0	(19.492,0)	0,2
7	Buol	(13.712,6)	0,1	164,9	0,1	1.294,1	0,1	29,8	0,0	(1.295,6)	0,1	903,0	0,0	(380,9)	0,0	49,2	0,0	(868,2)	0,0
8	Parimo	(30.388,3)	0,0	1.336,4	0,2	(10.587,5)	0,1	131,2	0,0	(8.617,0)	0,0	(25.614,7)	0,1	14.119,3	0,1	(5.483,8)	0,6	(144.020,0)	0,4
9	Touna	234,2	0,0	201,1	0,1	3.507,0	0,1	235,8	0,1	(227,9)	0,0	1.136,3	0,1	123,3	0,0	315,2	0,0	613,2	0,0
10	Palu	9.459,2	0,2	(3.696,2)	0,1	(18.484,7)	0,2	401,1	0,0	(7.071,1)	0,1	(5.530,6)	0,1	(7.692,6)	0,1	(12.989,8)	0,2	2.774,0	0,0

Sumber: Data diolah.

Keterangan: 1 = pertanian, 2= pertambangan & penggalan, 3= Industri pengolahan, 4= listrik, gas & air minum, 5= bangunan, 6 = perdagangan, hotel & restoran, 7=pengangkutan & komunikasi, 8= keuangan, persewaan & jasa perusahaan, 9=jasa-jasa.

S = Spesialisasi

K= Kompetitif.

#### 5.4 Analisis Tipologi Daerah Kabupaten / Kota di Propinsi Sulawesi Tengah

Metode *Klassen Tipology* digunakan untuk menentukan tipologi daerah pada penelitian ini. Tipologi *Klassen* membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal. Daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu :

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*High growth and high income*) adalah laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita rata-rata nasional.
2. Daerah maju tapi tertekan. (*high income but low growth*) yaitu daerah yang relatif maju, tapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhan menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Daerah ini merupakan daerah yang telah maju tapi dimasa mendatang pertumbuhannya tidak akan begitu cepat walaupun potensi pengembangan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar. Daerah ini mempunyai pendapatan perkapita lebih tinggi tapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
3. Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah daerah yang dapat berkembang cepat dengan potensi pengembangan yang dimiliki sangat besar tapi belum diolah sepenuhnya secara baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi, namun tingkat pendapatan perkapita yang mencerminkan dari tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah. Daerah ini memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan

perkapita lebih rendah dibandingkan dengan rata- rata nasional.

4. Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income* ). adalah daerah yang masih mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita lebih rendah dari pada rata- rata nasional.

Hasil analisis Tipologi untuk Propinsi Sulawesi Tengah terlihat bahwa dari sepuluh Kabupaten/Kota yang dimilikinya tidak satupun diantaranya yang masuk kriteria satu yakni Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh karena tidak satupun Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita diatas pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Propinsi. Demikian pula dengan kriteria tiga yaitu Daerah berkembang cepat bahwa tidak ada Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori ini, seperti terlihat dalam skema sebagai berikut :

**Gambar 5.1**  
**Skema Tipologi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2000 - 2005**

Pertumbuhan 9,35	<b>Klasifikasi I</b> <b>Daerah Cepat Maju &amp; Cepat Tumbuh</b> -	<b>Klasifikasi II</b> <b>Daerah Maju Tapi Tertekan</b> ➤ Kab. Banggai (7,59 – 12,37) ➤ Kab. Toli-Toli ( 7,80 – 12,21) ➤ Kota Palu (8,65 – 14,37)
	<b>Klasifikasi III</b> <b>Daerah Berkembang Cepat</b> -	<b>Klasifikasi IV</b> <b>Daerah Relatif Tertinggal</b> ➤ Kab. Banggai Kepulauan (6,05-11,48) ➤ Kab. Morowali (7,05-10,68) ➤ Kab. Poso (3,53-9,03) ➤ Kab. Donggala (5,50-11,00) ➤ Kab. Buol (7,29-11,02) ➤ Kab. Parigi Moutong (5,36-10,45) ➤ Kab. Tojo Una-Una (4,91-4,63)
	11,82	Pendapatan Per kapita

Tabel 5.22 berikut ini memperlihatkan bahwa terdapat tiga Kabupaten/Kota yang masuk klasifikasi Daerah Maju Tapi Tertekan yaitu daerah yang mempunyai Pertumbuhan ekonomi rendah tapi memiliki rata-rata pendapatan perkapita lebih tinggi dibandingkan dengan Propinsi. Kabupaten/Kota yang masuk kategori ini adalah Kabupaten Banggai, Toli-Toli dan Kota Palu sedangkan tujuh Kabupaten lainnya masuk kategori empat yaitu daerah relatif tertinggal karena baik pertumbuhan ekonomi maupun rata-rata pendapatan perkapitanya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan perkapita yang dimiliki Propinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 5.22**  
**Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi tengah**  
**Periode 2000-2005**

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Rata- Rata ( % )	Pendapatan Perkapita ( % )	Tipologi Daerah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Kab. Banggai Kepulauan	6,05	11,48	4
2	Kab. Banggai	7,59	12,37	2
3	Kab. Morowali	7,05	10,68	4
4	Kab. Poso	3,53	9,03	4
5	Kab. Donggala	5,50	11,00	4
6	Kab. Toli-toli	7,80	12,21	2
7	Kab. Buol	7,29	11,02	4
8	Kab. Parigi Moutong	5,36	10,45	4
9	Kab. Tojo Una-una	4,91	4,63	4
10	Kota Palu	8,65	14,37	2
	<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>9,35</b>	<b>11,82</b>	

Sumber : BPS Kabupaten dalam angka 2005  
BPS Propinsi Sulawesi Tengah dalam angka 2005 ( Diolah )

## 5.5 Prioritas Wilayah untuk Pengembangan Pembangunan

Penentuan prioritas wilayah untuk pembangunan selain dilihat dari sektor basis yang tercermin pada analisis LQ, keunggulan kompetitif dan tipologi daerah juga diperlukan pertumbuhan persektor. Analisis tersebut selanjutnya dibuat skor nilai dengan *range* untuk masing-masing kategori untuk dapat ditentukan Kabupaten yang potensial untuk dikembangkan dengan sektor basisnya sebagai berikut :

### 5.5.1 Prioritas Sektor Pertanian

Tabel 5.23 merupakan hasil penentuan prioritas sektor basis untuk sektor pertanian. Hasil analisis menunjukkan dari sembilan Kabupaten yang mempunyai LQ > 1 untuk sektor pertanian, Prioritas pertama Kabupaten yang dapat dikembangkan adalah Kabupaten Banggai Kepulauan, Poso, Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong sedangkan prioritas kedua Kabupaten Morowali dan Kabupaten Buol dan prioritas empat meliputi Kabupaten Banggai ,dan Kabupaten Toli-Toli.

**Tabel 5.23**  
**Prioritas Untuk Sektor Pertanian dilihat dari**  
**Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral**  
**Tahun 2000 - 2005**

Kabupaten /Kota	Nilai LQ		Pertumbuhan Sektoral		Spesialisasi		Keunggulan Kompetitif		Tipologi	Total Skore		Prioritas Sektor Basis
	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Skore	Nilai	Skore	
Kab. Banggai Kepulauan	1,15	3	5,58	2	-291,6	4	0,0	4	4	17	1	1
Kab. Banggai	1,24	2	7,87	1	-112.216,9	1	0,2	1	2	7	4	4
Kab. Morowali	1,34	1	-6,17	2	-14.758,1	4	0,1	3	4	14	2	2
Kab. Poso	1,00	4	-4,37	4	145.446,1	1	0,0	4	4	17	1	1
Kab. Donggala	1,10	4	-4,99	4	25.045,4	4	0,0	4	4	20	1	1
Kab. Toli-toli	1,10	4	-8,00	1	-74.579,49	2	0,2	1	2	10	4	4
Kab. Buol	1,26	2	-6,97	1	-13.712,6	4	0,1	3	4	14	2	2
Kab. Parigi Moutong	1,30	1	-4,60	4	-30.388,30	4	0,0	4	4	17	1	1

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Sulawesi Tengah ( diolah )

### 5.5.2 Prioritas Sektor Pertambangan dan Penggalian

Dari sepuluh Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Propinsi Sulawesi Tengah, yang memiliki LQ >1 atau yang mempunyai sektor basis di sektor pertambangan dan Penggalian hanya Kota Palu, sehingga prioritas pengembangannya hanya berada di Kota Palu.

### 5.5.3 Prioritas Sektor Industri Pengolahan

Terdapat tujuh Kabupaten/Kota yang mempunyai sektor basis atau mempunyai LQ>1 di sektor Industri Pengolahan seperti terlihat dalam Tabel 5.24 berikut:

**Tabel 5.24**  
**Prioritas Untuk Sektor Industri Pengolahan dilihat dari**  
**Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral**  
**Tahun 2000 - 2005**

Kabupaten/ Kota	Nilai LQ		Pertumbuhan Sektoral		Spesialisasi		Keunggulan Kompetitif		Tipe logi	Jumlah Skore		Prioritas Sektor Basis
	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Nilai	Skore		Nilai	Skore	
Kab. Banggai	1,01	4	- 6,97	1	-13.905,9	2	0,0	4	2	13	2	2
Kab. Poso	1,25	3	3,71	1	25.788,4	1	0,0	4	4	13	2	2
Kab. Donggala	1,02	4	-6,15	1	3.150,0	4	0,0	4	4	17	1	1
Kab. Toli-toli	1,02	4	-7,73	1	-12.206,1	3	0,1	2	2	12	3	3
Kab. Buol	1,14	4	-6,14	1	1.294,1	4	0,1	2	4	15	1	1
Kab. Tojo Una-Una	1,50	2	-1,87	4	3.507,0	4	-0,1	2	4	16	1	1
Kota Palu	1,87	1	-9,00	1	-18.484,7	2	0,2	1	2	7	4	4

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Sulawesi Tengah ( diolah )

Tabel 5.24 diatas terlihat bahwa Kabupaten/Kota yang termasuk dalam prioritas pertama adalah Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol dan Kabupaten Tojo Una-Una sedangkan Kabupaten Banggai dan Kabupaten Poso termasuk prioritas ke dua sedangkan Kabupaten Toli-Toli prioritas ke tiga dan prioritas ke empat adalah Kota Palu.

#### 5.5.4 Prioritas Sektor Listrik dan Air Bersih

Tabel 5.25 merupakan hasil penentuan prioritas sektor basis untuk sektor Listrik dan Air Bersih. Hanya Kabupaten Tojo Una-Una dan Kota Palu yang memiliki  $LQ > 1$  untuk sektor ini sehingga prioritas pengembangan wilayahnya adalah Kabupaten Tojo Una-Una masuk prioritas pertama dan Kota Palu termasuk pada prioritas keempat.

**Tabel 5.25**  
**Prioritas Untuk Sektor Listrik dan Air Bersih dilihat dari**  
**Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral**  
**Tahun 2000 - 2005**

Kabupaten /Kota	Nilai LQ		Pertumbuhan Sektoral		Spesialisasi		Keunggulan Kompetitif		Tipologi	Total Skore		Prioritas Sektor Basis
	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Nilai	Skore		Nilai	Skore	
Kab. Tojo Una-Una	2,00	4	-4,05	1	235,8	4	0,1	1	4	14	1	1
Kota Palu	3,25	1	-3,54	4	401,0	1	0,0	4	2	12	4	4

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Sulawesi Tengah ( diolah )

#### 5.5.5 Prioritas Sektor Bangunan

Dari sepuluh Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Propinsi Sulawesi Tengah, yang memiliki  $LQ > 1$  atau yang mempunyai sektor basis di sektor Bangunan hanya Kabupaten Tojo Una-Una dan Kota Palu, sehingga prioritas pengembangan wilayahnya adalah Kabupaten Tojo Una-Una masuk prioritas pertama dan Kota Palu termasuk pada prioritas keempat seperti dalam Tabel 5.26 sebagai berikut :

**Tabel 5.26**  
**Prioritas Untuk Sektor Bangunan dilihat dari**  
**Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral**  
**Tahun 2000 - 2005**

Kabupate/ Kota	Nilai LQ		Pertumbuhan Sektoral		Spesialisasi		Keunggulan Kompetitif		Tipe logi	Total Skore		Prioritas Sektor Basis
	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Nilai	Skore		Nilai	Skore	
Kab. Tojo Una - Una	1,00	4	-4,90	4	-227,9	4	0,0	4	4	20	1	1
Kota Palu	1,61	1	-6,10	1	-7.071,1	1	0,1	1	2	6	4	4

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Sulawesi Tengah ( diolah )

### 5.5.6 Prioritas Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Terdapat delapan Kabupaten yang mempunyai sektor basis atau mempunyai  $LQ > 1$  di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, seperti terlihat dalam Tabel 5.27 berikut:

**Tabel 5.27**  
**Prioritas Untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dilihat dari**  
**Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral**  
**Tahun 2000 - 2005**

Kabupaten/ Kota	Nilai LQ		Pertumbuhan Sektoral		Spesialisasi		Keunggulan Kompetitif		Tipe logi	Total Skore		Prioritas Sektor Basis
	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Nilai	Skore		Nilai	Skore	
Kab. Banggai Kepulauan	1,15	3	5,58	2	-291,6	4	0,0	4	4	17	1	1
Kab. Banggai	1,24	2	7,87	1	-112.216,9	1	0,2	1	2	7	4	4
Kab. Morowali	1,34	1	-6,17	2	-14.758,1	4	0,1	3	4	14	2	2
Kab. Poso	1,00	4	-4,37	4	145.446,1	1	0,0	4	4	17	1	1
Kab. Donggala	1,10	4	-4,99	4	25.045,4	4	0,0	4	4	20	1	1
Kab. Toli-toli	1,10	4	-8,00	1	-74.579,49	2	0,2	1	2	10	4	4
Kab. Buol	1,26	2	-6,97	1	-13.712,6	4	0,1	3	4	14	2	2
Kab. Parigi Moutong	1,30	1	-4,60	4	-30.388,30	4	0,0	4	4	17	1	1

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Sulawesi Tengah ( diolah )

Tabel 5.27 terdapat empat Kabupaten termasuk dalam prioritas pertama yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Poso, Donggala, dan Parigi Moutong; Prioritas kedua

adalah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Buol sedangkan Kabupaten Banggai dan Kabupaten Toli-Toli masuk pada prioritas ke empat.

### 5.5.7 Prioritas Sektor Angkutan dan Komunikasi

Tabel 5.28 merupakan hasil penentuan prioritas sektor basis untuk sektor Angkutan dan Komunikasi, dari tiga kabupaten yang memiliki  $LQ > 1$  untuk sektor ini yang masuk prioritas satu untuk pengembangan wilayah adalah Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Palu masuk prioritas ke empat.

**Tabel 5.28**  
**Prioritas Untuk Sektor Angkutan dan Komunikasi dilihat dari**  
**Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral**  
**Tahun 2000 - 2005**

Kabupaten/ Kota	Nilai LQ		Pertumbuhan Sektoral		Spesialisasi		Keunggulan Kompetitif		Tipe logi	Total Skore		Prioritas Sektor Basis
	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Nilai	Skore		Nilai	Skore	
Kab. Poso	1,33	3	-1,29	4	15.272,8	1	0,0	4	4	16	1	1
Kab. Parimo	1,15	4	-6,55	1	14.119,3	1	-0,1	1	4	11	4	4
Kota Palu	1,84	1	-4,40	2	-7.692,6	4	0,1	1	2	10	4	4

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Sulawesi Tengah ( diolah )

### 5.5.8 Prioritas Sektor Keuangan, Sewa Dan Jasa Perusahaan

Tabel 5.29 merupakan hasil penentuan prioritas sektor basis untuk sektor Keuangan, Sewa Dan Jasa Perusahaan, dari tiga kabupaten yang memiliki  $LQ > 1$  untuk sektor ini yang masuk prioritas satu untuk pengembangan wilayah adalah Kabupaten Tojo Una-Una; Prioritas kedua Kabupaten Banggai Kepulauan sedangkan Kota Palu masuk prioritas ke empat.

**Tabel 5.29**  
**Prioritas Untuk Sektor Keuangan, Sewa Dan Jasa Perusahaan dilihat dari**  
**Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral**  
**Tahun 2000 - 2005**

Kabupaten/Kota	Nilai LQ		Pertumbuhan Sektoral		Spesialisasi		Keunggulan Kompetitif		Tipologi	Jlh. Skore		Prioritas Sektor Basis`
	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Nilai	Skore		Nilai	Skore	
Kab. Banggai Kepulauan	1,01	4	- 5,22	4	5.226,0	3	0,5	1	4	16	2	2
Kab. Tojo Una-Una	1,09	4	- 3,76	4	315,15	4	0,0	4	4	20	1	1
Kota Palu	2,84	1	- 14,00	1	-12.989,8	1	0,2	2	2	7	4	4

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Sulawesi Tengah ( diolah )

### 5.5.9 Prioritas Sektor Jasa - Jasa

Dari sepuluh Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Propinsi Sulawesi Tengah, yang mempunyai sektor basis di sektor jasa-jasa hanya Kabupaten Tojo Una-Una dan Kota Palu, sehingga prioritas pengembangan wilayahnya hanya pada dua Kabupaten tersebut dengan prioritas pertama Kabupaten Tojo Una-Una dan Kota Palu termasuk pada prioritas keempat seperti dalam Tabel 5.30 sebagai berikut :

**Tabel 5.30**  
**Prioritas Untuk Sektor Jasa – Jasa dilihat dari**  
**Analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral**  
**Tahun 2000 - 2005**

Kabupaten/ Kota	Nilai LQ		Pertumbuhan Sektoral		Spesialisasi		Keunggulan Kompetitif		Tipologi	Jlh. Skore		Prioritas Sektor Basis
	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Nilai	Skore	Nilai	Skore		Nilai	Skore	
Kab. Tojo Una-Una	1,14	4	- 4,20	4	613,2	4	- 0,0	4	4	20	1	1
Kota Palu	1,95	1	- 10,00	1	2.774,0	1	0,0	1	2	6	4	4

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Sulawesi Tengah ( diolah )

Secara keseluruhan hasil analisis untuk penentuan prioritas pengembangan wilayah bagi daerah yang mempunyai sektor basis di Propinsi Sulawesi Tengah terlihat dalam Tabel 5.31 berikut :

**Tabel 5. 31**  
**Prioritas Pengembangan Pembangunan Sektor Basis**  
**di Propinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2000 - 2005**

No	Kabupaten/Kota	Sektor Ekonomi / Prioritas ke								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab .Banggai Kepulauan	1	-	-	-	-	2	-	-	-
2	Kab. Banggai	4	-	2	-	-	-	-	-	-
3	Kab. Morowali	2	-	-	-	-	1	-	-	-
4	Kab. Poso	1	-	2	-	-	1	1	-	-
5	Kab. Donggala	1	-	1	-	-	1	-	-	-
6	Kab. Toli-toli	4	-	3	-	-	4	-	-	-
7	Kab. Buol	2	-	1	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Parigi Moutong	1	-	-	-	-	-	4	-	-
9	Kab. Tojo Una-Una	-	-	1	1	1	1	-	1	1
10	Kota Palu	-	1	4	4	4	1	4	4	4

Sumber : Hasil Analisis LQ, Shift-Share, Pertumbuhan Persektor ( diolah )

Keterangan : 1 = Sektor Pertanian      2 = Sektor Pertambangan ,Penggalian  
3 = Industri Pengolahan      4 = Listrik dan Air Bersih      5 = Bangunan  
6 = Perdagangan,Hotel, Restoran      7 = Pengangkutan,Komunikasi  
8 = Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan      9 = Jasa – jasa

Dalam pengembangan wilayah, pengembangan tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian kecuali pada sektor–sektor yang mempunyai potensi berkembangnya cukup besar. Tabel 5.31 memperlihatkan bahwa prioritas pengembangan wilayah sektor basis di Propinsi Sulawesi Tengah tidak sama untuk tiap kabupaten/kota, meskipun terlihat terdapat dua Kabupaten yang termasuk pada Prioritas Pertama yang perlu dikembangkan, masing-masing Kabupaten Tojo Una-Una untuk semua sektor basisnya ( 6 sektor ) meliputi Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik dan Air Bersih;

Sektor Bangunan; Sektor Perdagangan,Hotel, Restoran; Sektor Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan; Sektor Jasa – jasa, dan Kabupaten Donggala (3 sektor) meliputi sektor Pertanian; Sektor Listrik,Gas,Air Bersih; dan Sektor Perdagangan, Hotel,Restoran.

Bagi Kabupaten Tojo Una-Una hal ini dimungkinkan karena Kabupaten tersebut merupakan Kabupaten terakhir yang dimekarkan dari lima kabupaten lainnya atau baru berusia tiga tahun. Kabupaten lainnya yang mempunyai prioritas pertama lebih dari satu adalah Kabupaten Poso (3 dari 4 sektor) Kota Palu (2 dari 8 sektor) tapi adapula kabupaten yang tidak mempunyai prioritas pertama yakni Kabupaten Banggai, Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol.

## **5.6 Pemetaan Potensi Ekonomi Propinsi Sulawesi Tengah**

Hasil temuan penelitian potensi ekonomi di kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tengah periode 2000-2005 dengan metode LQ, Tipologi Klassen, Shift-Share, dan MRP, menunjukkan bahwa tak satu pun sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan kompetitif, tetapi potensi ekonominya memiliki kriteria spesialisasi meskipun potensi ekonominya relatif rendah. Informasi kompilasi potensi ekonomi menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 5.32 berikut dan hasil pemetaan yang menggunakan metode SIG seperti terlihat pada gambar peta yang ada.

**Tabel 5.32**  
**Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2000-2005**

No	Kabupaten/Kota	Lapangan Usaha								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Banggai Kepulauan	PES	PER	PES	PES	PER	PER	PER	PER	PES
2	Banggai	PES	PER	PER	PES	PER	PES	PER	PES	PES
3	Morowali	PES	PER	PES	PES	PER	PER	PER	PES	PES
4	Poso	PES	PER	PER	PES	PER	PER	PES	PES	PES
5	Donggala	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PER	PES	PER
6	Toli-toli	PES	PER	PER	PES	PER	PER	PER	PES	PES
7	Buol	PES	PER	PER	PES	PER	PES	PER	PES	PES
8	Parigi Moutong	PES	PER	PES	PES	PER	PES	PES	PES	PES
9	Tojo Una-una	PES	PER	PES	PES	PES	PER	PER	PES	PES
10	Palu	PER	PES	PER	PER	PES	PES	PES	PER	PER

Sumber : BPS, Sulawesi Tengah dalam angka (diolah)

Keterangan: PES = Potensi Ekonomi Spesialisasi

PER = Potensi Ekonomi Rendah.

1 = Pertanian; 2 = Pertambangan dan Penggalian; 3 = Industri pengolahan;

4 = Listrik dan air minum; 5 = Bangunan; 6 = Perdagangan, hotel dan Restoran;

7 = Pengangkutan dan komunikasi; 8 = Keuangan, sewa dan Jasa perusahaan;

9 = Jasa-jasa.

Di sektor pertanian misalnya di seluruh wilayah kabupaten memiliki potensi ekonomi spesialisasi (PES) kecuali kota Palu potensi ekonominya rendah (PER). Selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 5.2 peta tipologi potensi ekonomi sektor pertanian

Tipologi potensi ekonomi sektor pertambangan dan penggalian sebagian besar memiliki PER dan hanya kabupaten Donggala dan kota Palu memiliki PES karena mempunyai tambang galian golongan C. Lihat Gambar 5.3 peta tipologi potensi ekonomi sektor pertambangan dan Penggalian..

Tipologi potensi ekonomi sektor Industri Pengolahan memiliki PES dan PER tersebar secara merata di kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Tengah. Wilayah yang memiliki PES meliputi Kabupaten Banggai Kepulauan karena mempunyai mutiara laut, Kabupaten Morowali mempunyai keramik alami berkualitas terbaik, Donggala

mempunyai sentra produksi Tenun Sarung Donggala, dan Kabupaten Tojo Una-Una dengan industri pengolahan hasil laut dan perkebunan. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 5.4 peta tipologi potensi ekonomi sektor industri pengolahan.

Untuk Tipologi potensi ekonomi sektor listrik dan air minum semua Kabupaten memiliki PES, kecuali Kota Palu memiliki PER. Sebelum membangun listrik tenaga batubara, seringkali terjadi pemadaman karena listrik tenaga diesel (LTD) selain usianya lebih dari 16 tahun kebutuhanpun meningkat. Hal yang sama juga terjadi pada PDAM memiliki kualitas layanan yang rendah dan kebutuhan meningkat dan sumber air berasal dari satu sumber. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 5.5 peta tipologi potensi ekonomi sektor listrik dan air minum.

Tipologi potensi ekonomi sektor bangunan dalam periode penelitian 2000-2005 memiliki potensi ekonomi spesialisasi dan potensi ekonomi rendah. Beberapa kabupaten memiliki PES yakni Kabupaten Donggala, Kota Palu dan Kabupaten Tojo Una-Una, hal ini disebabkan karena kebutuhan perumahan meningkat sejalan dengan pemekaran wilayah. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 5.6 peta tipologi potensi ekonomi sektor bangunan.

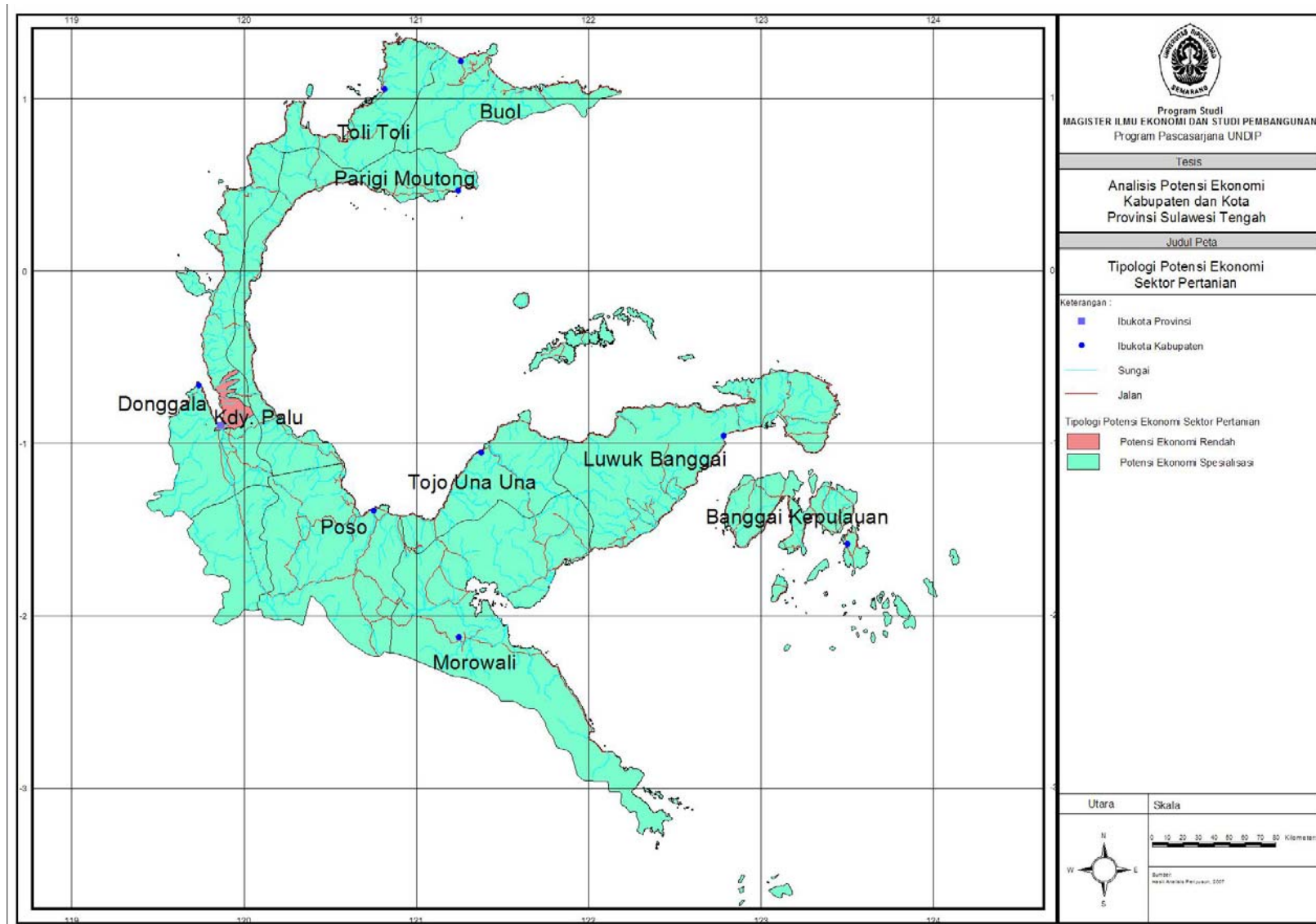
Tipologi potensi ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran banyak kabupaten/kota memiliki PES meliputi Kabupaten Banggai, Donggala, Buol, Parigi Moutong dan Kota Palu dan menjadi basis pembangunan di wilayah tersebut. Selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 5.7 peta tipologi potensi ekonomi sektor perdagangan, hotel dan restoran

Semakin tumbuh sebuah wilayah kabupaten/kota kebutuhan pengangkutan dan komunikasi akan meningkat dan secara bersamaan akan diikuti pula oleh kualitas layanan di sektor ini, sehingga ada beberapa kabupaten/kota memiliki PES seperti Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso karena lokasi kabupaten/kota tersebut berada pada jalur trans Sulawesi dari utara (Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara) dan ke selatan (Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara) dan sebaliknya. Gambaran selengkapnya terlihat pada Gambar 5.8 peta tipologi potensi ekonomi sektor pengangkutan dan komunikasi.

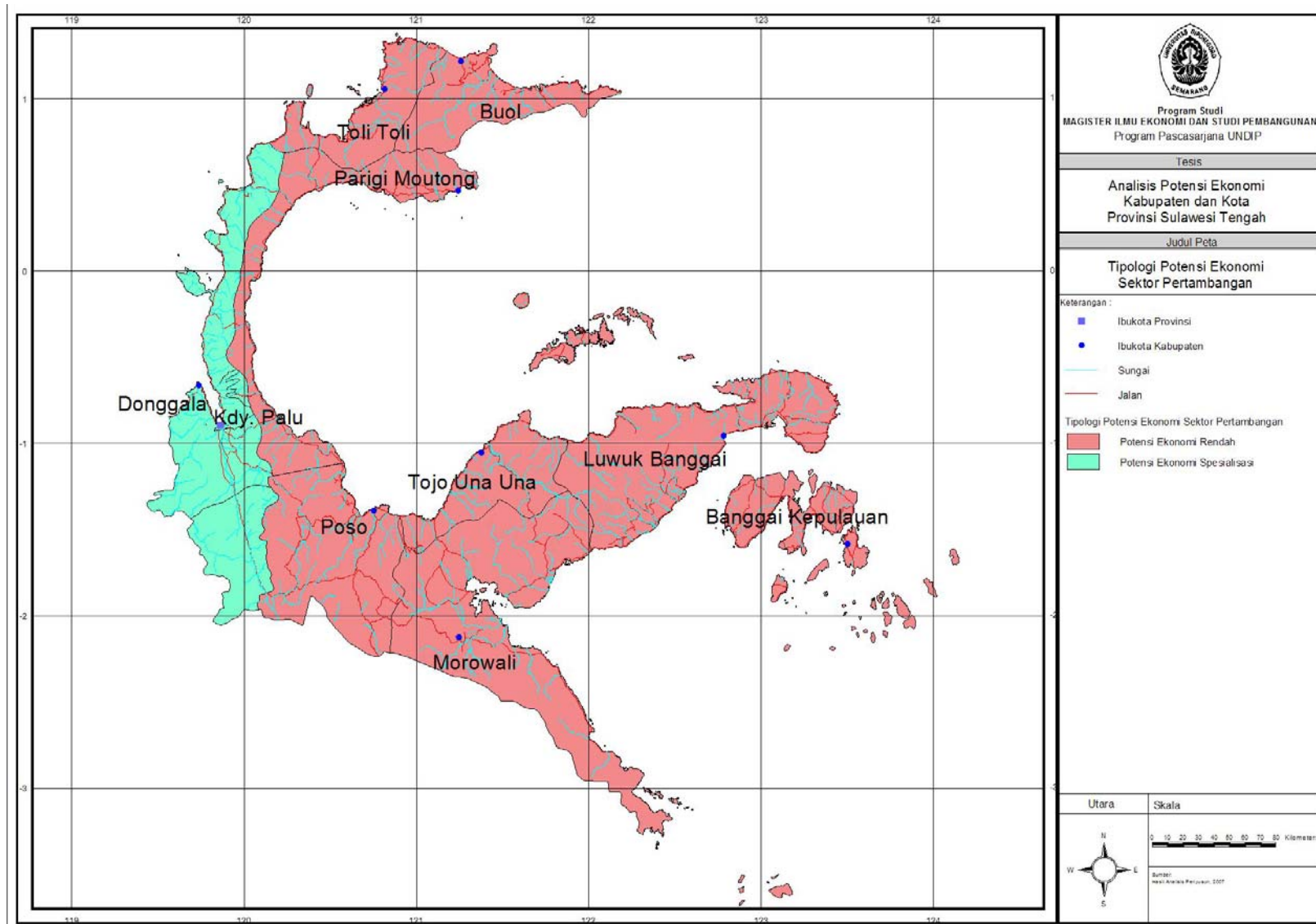
Tipologi sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan memperlihatkan hasil bahwa dari 10 Kabupaten/Kota yang ada terdapat 8 Kabupaten menjadikan sektor ini sebagai basis pembangunan ditandai oleh PES meskipun ada pula wilayah yang memiliki PER yakni Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kota Palu. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 5.9 peta tipologi potensi ekonomi sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan .

Terdapat 8 Kabupaten/Kota yang menjadikan sektor Jasa-jasa sebagai basis pembangunan ditandai oleh PES meskipun terdapat 2 wilayah yang memiliki PER yakni Kabupaten Donggala dan Kota Palu karena kendala internal yang ada di wilayah tersebut. Misalkan, rendahnya investasi masuk ke wilayah tersebut karena kurangnya informasi yang lengkap tentang sektor-sektor ekonomi. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 5.10 peta tipologi potensi ekonomi sektor jasa-jasa.

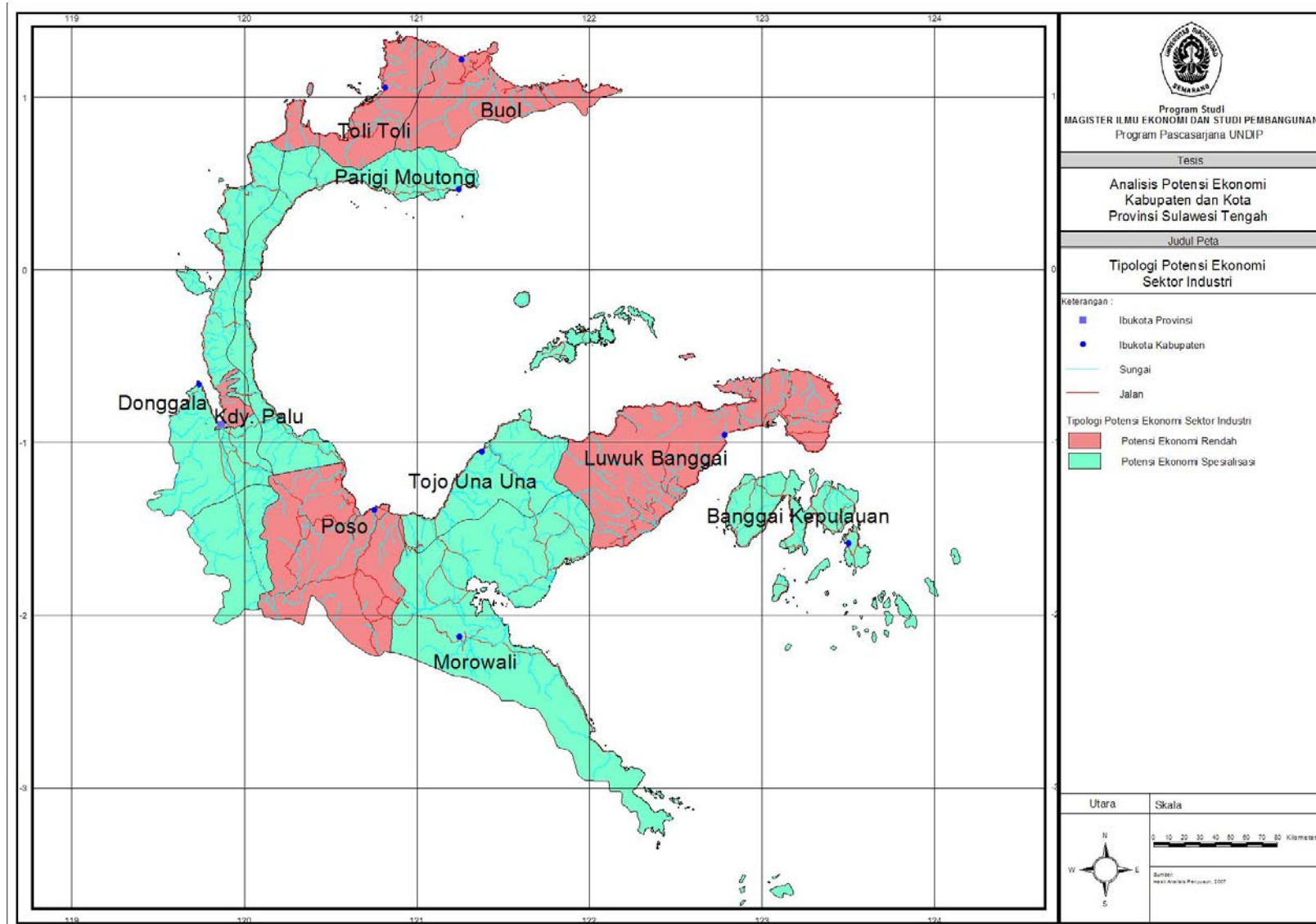
Gambar 5.2 Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Pertanian



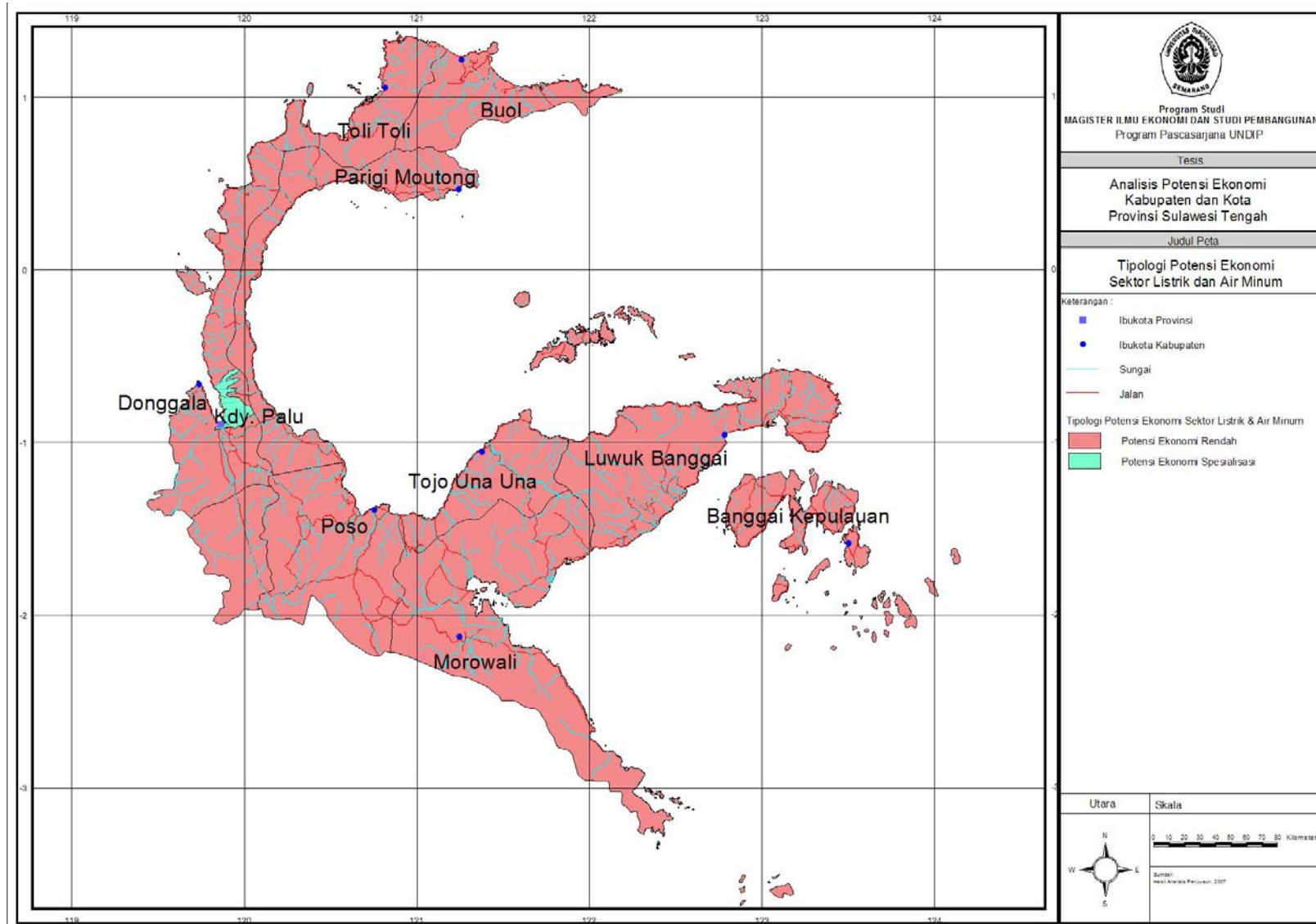
Gambar 5.3. Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Pertambangan dan Penggalian



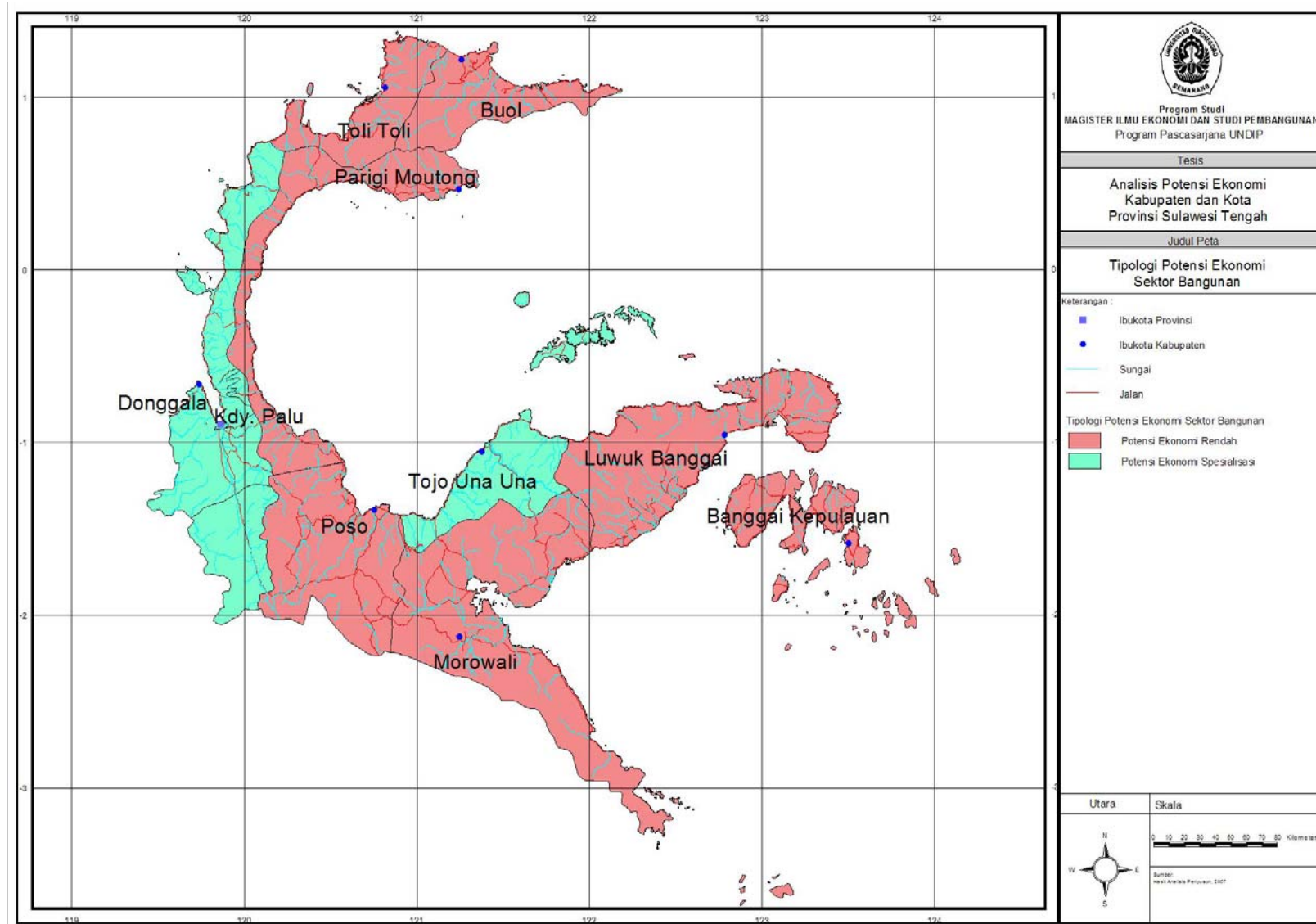
Gambar 5.4. Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan



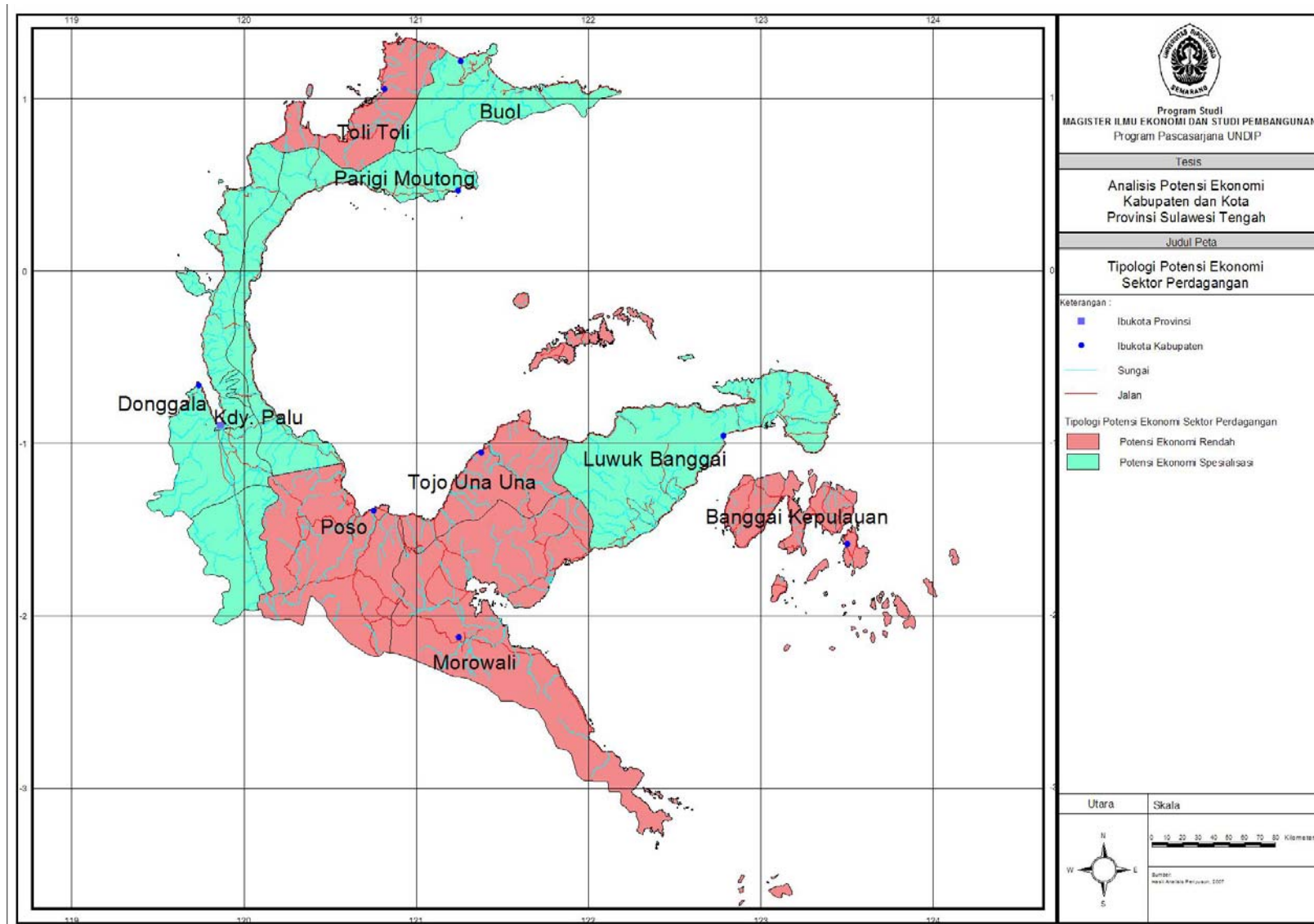
Gambar 5.5 Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Listrik dan Air Minum



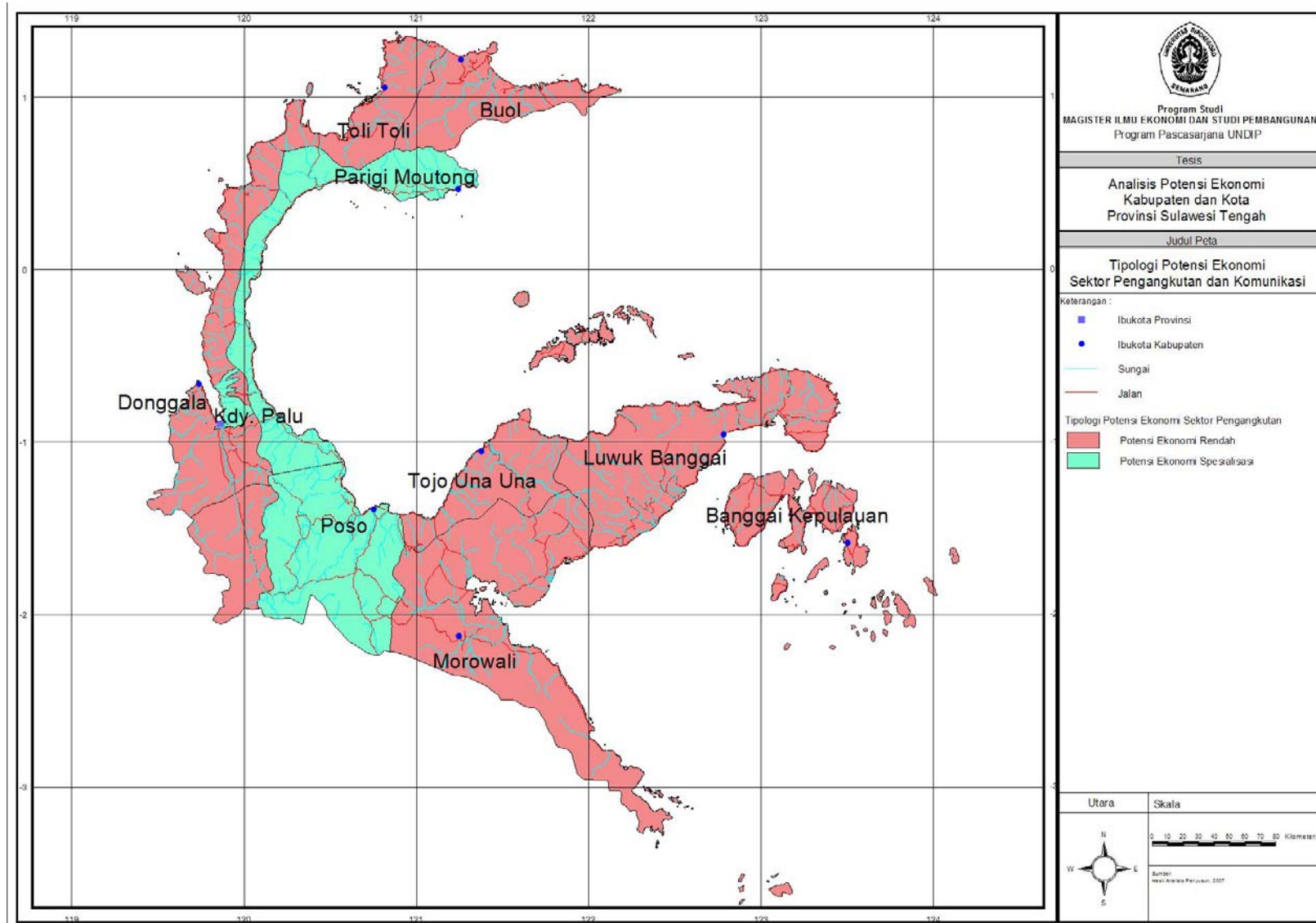
Gambar 5.6 Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Bangunan



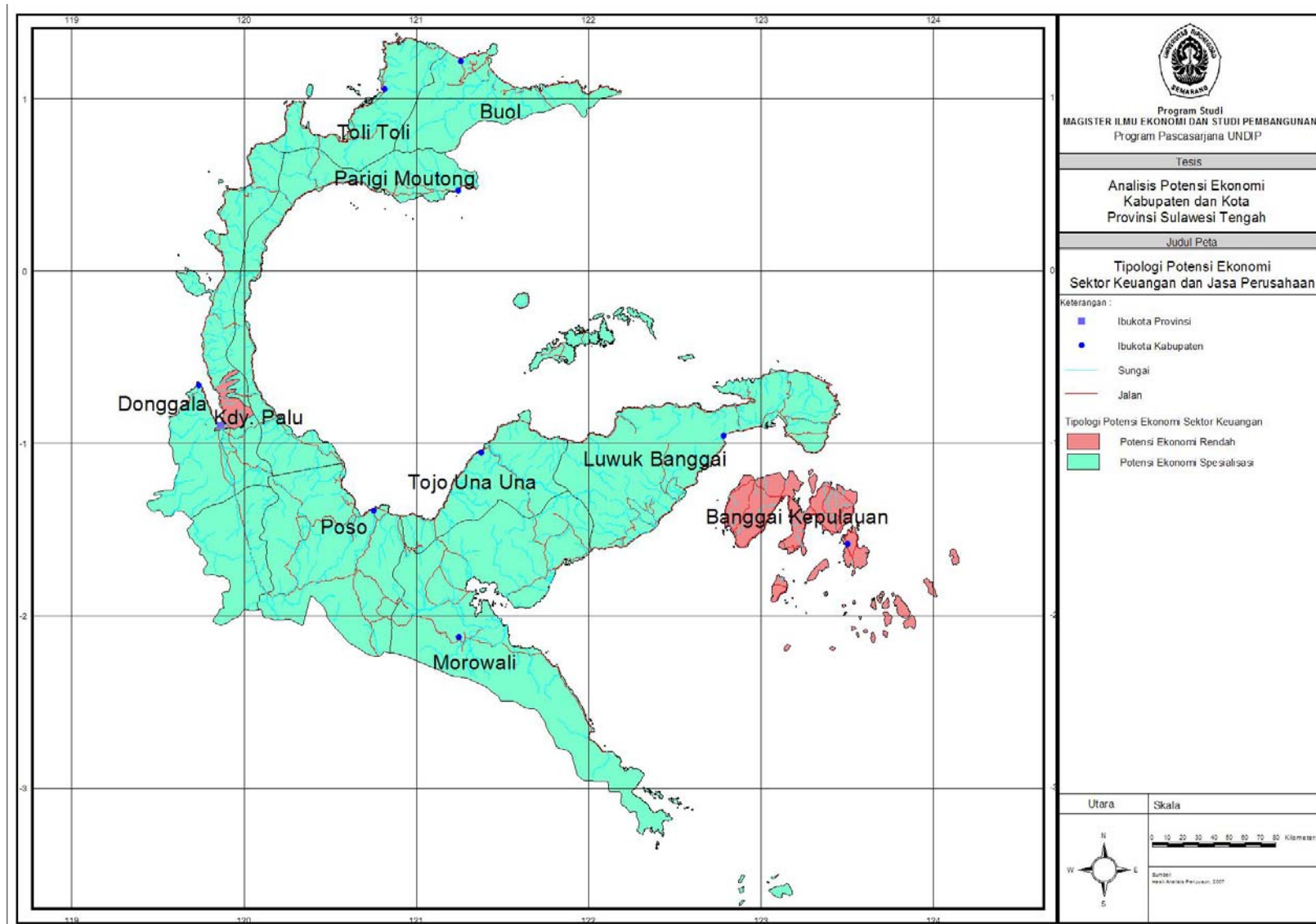
Gambar 5.7 Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran



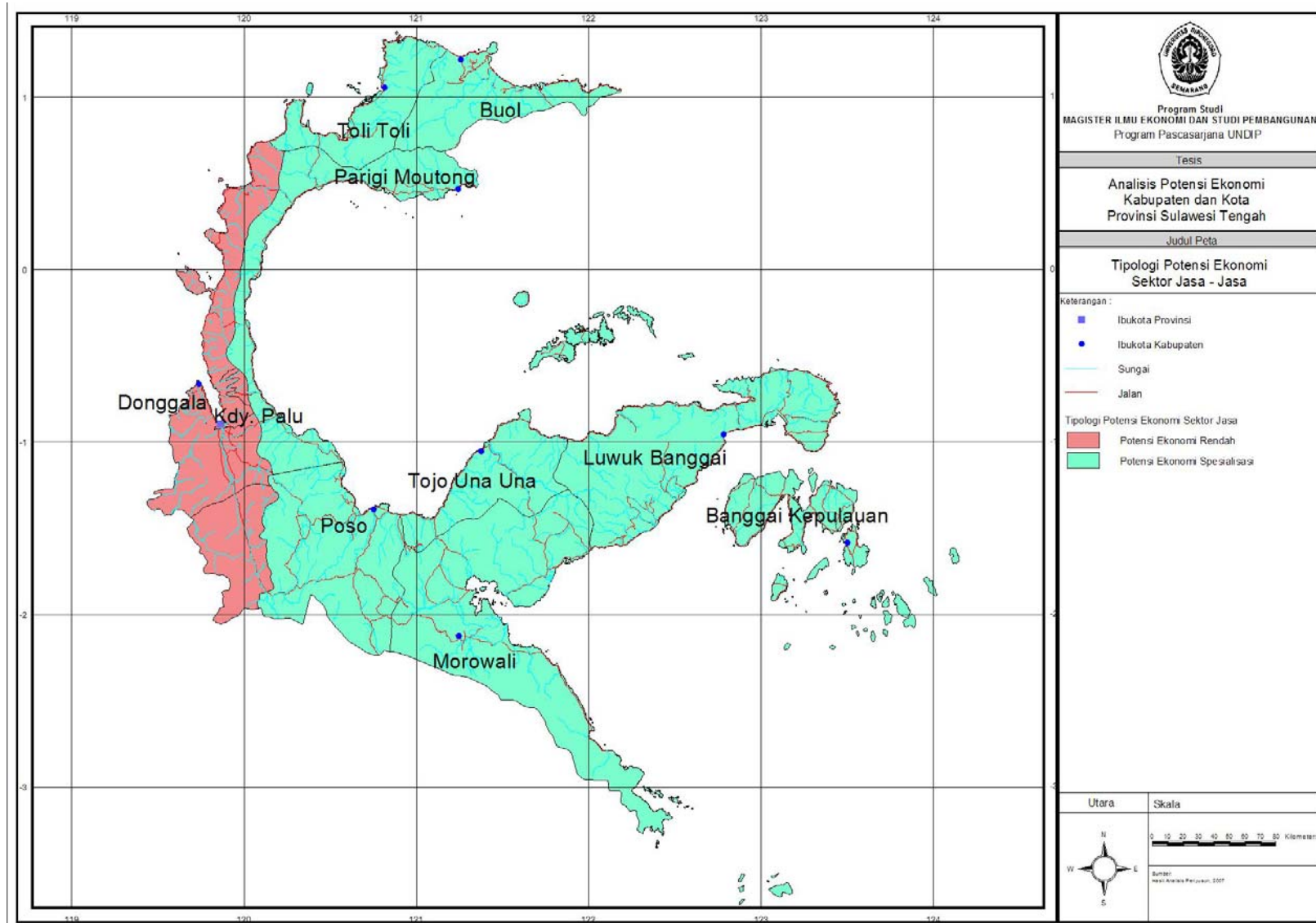
Gambar 5.8 Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi



Gambar 5.9 Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan



Gambar 5.10 Peta Tipologi Potensi Ekonomi Sektor Jasa-Jasa



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah periode 2006-2011 dalam menentukan program pembangunan dengan skala prioritas disetiap sektor penyusunannya belum didasarkan pada potensi ekonomi masing-masing wilayah yang memiliki karakteristik dan sumberdaya berbeda-beda termasuk modal manusia, modal kapital, modal fisik, dan modal sosial, bahkan cenderung mengeneralisir antar wilayah yang satu dengan wilayah lainnya.

Demikian pula halnya dengan realisasi belanja pembangunan / Belanja Operasi Pemeliharaan (BOP) dan Belanja Modal Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai sumber utama pembiayaan investasi sektor pemerintah, terutama dialokasikan untuk membiayai kegiatan fisik maupun non fisik dalam upaya menunjang pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat serta peningkatan pelayanan umum, oleh sebab itu prioritas alokasi anggaran pembangunan dititik beratkan pada pengembangan sarana prasarana ekonomi, penyediaan berbagai fasilitas pelayanan dasar dan pengembangan SDM, yang secara keseluruhan diharapkan akan mampu menunjang percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pengeluaran Belanja Pembangunan / Belanja Operasi dan Pemeliharaan – Belanja Modal pada dasarnya adalah investasi pemerintah, tidak bersifat konsumtif dan memiliki dampak ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Perkembangannya dari tahun 2001 s/d tahun 2005 terlihat dalam Tabel 5.33 berikut :

**Tabel 5.33**  
**Realisasi Belanja Pembangunan/Belanja Operasi Pemeliharaan**  
**dan Belanja Modal Propinsi Sulawesi Tengah T.A. 2001 s/d 2005**

No	Bidang Pemerintahan	T a h u n				
		2001	2002	2003	2004	2005 *)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aministrasi Pemerintahan	31.728.277.663,20	25.035.775.820,24	71.305.833.886,00	81.227.768.639,00	20.525.294.220,00
2	Pertanian	1.493.230.650,00	779.523.093,75	2.760.331.250,00	5.841.475.125,00	1.683.237.130,00
3	Perikanan/Kelautan	458.479.200,00	574.148.500,00	510.467.502,00	1.520.089.000,00	119.950.000,00
4	Pertambangan & energi	609.700.000,00	389.554.675,00	354.281.379,00	1.229.691.800,00	596.005.300,00
5	Kehutan/Perkebunan	176.337.600,00	186.931.000,00	3.032.858.778,00	3.990.022.313,00	1.177.487.250,00
6	Perindustrian/Perdagangan	365.000.000,00	731.500.000,00	1.279.657.140,00	1.831.273.263,00	431.530.000,00
7	Penanaman Modal	310.674.159,00	394.747.145,00	-	766.792.594,00	416.747.900,00
8	Ketenaga Kerjaan	24.911.800,00	463.926.500,00	2.213.691.500,00	3.041.322.850,00	1.647.112.000,00
9	Kesehatan	1.646.724.655,00	1.338.918.150,00	12.784.599.265,00	14.847.284.957,00	3.951.688.313,00
10	Pendidikan & Kebudayaan	1.969.417.800,00	2.837.968.800,00	10.184.887.520,00	14.712.148.369,00	6.336.368.000,00
11	Sosial	324.574.500,00	1.324.724.926,00	1.785.867.746,00	1.572.863.400,00	477.070.000,00
12	Pekerjaan Umum	12.276.665.356,61	11.092.187.788,68	27.176.809.217,00	29.814.843.482,83	2.444.766.750,00
13	Perhubungan	279.981.200,00	553.072.000,00	2.394.191.750,00	1.929.919.954,00	219.114.800,00
14	Lingkungan Hidup	1.489.794.530,00	3.846.726.738,00	950.372.000,00	1.229.645.000,00	593.125.000,00
	Jumlah	53.153.769.104,81	49.549.705.136,67	136.733.848.933,00	163.555.140.746,83	40.619.496.663,00

Sumber : Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Thn. 2006.

Catatan : \*) Angka sampai triwulan II

Tabel diatas jelas memperlihatkan terjadinya kenaikan yang signifikan khususnya bidang ketenaga kerjaan mengalami kenaikan rata-rata 443,19 persen, dengan alokasi dana yang besar diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja terampil dan profesional, bidang sosial mengalami kenaikan 60,41 persen, hal tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan permasalahan sosial terutama pemulihan pasca konflik di Poso.

Namun jika dilihat dari alokasi persektor bidang pemerintahan maka sektor pertanian , perikanan dan kehutanan yang menjadi sektor basis di 9 Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah hanya dialokasikan dana sebesar rata-rata 5,48 persen kurun waktu 2001-2005 sedangkan sektor industri hanya sebesar 1,06 persen padahal sektor tersebut merupakan sektor basis di 7 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah. Demikian halnya dengan sektor perhubungan yang hanya dialokasikan dana rata-rata sebesar 1,02 persen selama tahun 2001-2005. Alokasi dana terbesar disektor Administrasi

Umum Pemerintahan rata-rata tahun 2001-2005 sebesar 52,11 persen. Selanjutnya lihat pada Tabel 5.34 sebagai berikut :

**Tabel 5.34**  
**Alokasi Belanja Pembangunan /Belanja Operasi Pemeliharaan**  
**dan Belanja Modal Propinsi Sulawesi Tengah T.A. 2001 s/d 2005**

No	Bidang Pemerintahan	T A H U N					Rata-rata
		2001	2002	2003	2004	2005	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Aministrasi Pemerintahan	59,69	50,53	50,15	49,66	50,53	52,11
2	Pertanian	2,81	1,57	2,02	3,57	4,14	3,14
3	Perikanan/Kelautan	0,63	1,16	0,37	0,93	0,30	0,68
4	Pertambangan & energi	1,15	1,16	0,26	0,75	1,47	0,96
5	Kehutan/Perkebunan	0,33	0,38	2,22	2,44	2,94	1,66
6	Perindustrian/Perdagangan	0,69	1,48	0,94	1,12	1,06	1,06
7	Penanaman Modal	0,58	0,80	-	0,05	1,03	0,62
8	Ketenaga Kerjaan	0,05	0,94	1,62	1,86	4,05	1,70
9	Kesehatan	3,10	2,70	9,35	9,08	9,73	6,79
10	Pendidikan & Kebudayaan	3,71	5,73	7,45	9,00	15,60	8,30
11	Sosial	0,61	2,67	1,31	0,96	1,17	1,34
12	Pekerjaan Umum	3,10	22,39	19,86	18,23	6,02	17,92
13	Perhubungan	0,53	1,12	1,75	1,18	0,54	1,02
14	Lingkungan Hidup	2,80	7,76	0,70	0,75	1,46	2,69

Sumber : Tabel 5.33 ( diolah )

Dari tabel di atas jelas terlihat adanya ketimpangan terhadap alokasi anggaran Belanja Pembangunan masing-masing bidang dan tidak memperhatikan kebutuhan yang berlandaskan pada potensi ekonomi daerah yang dimiliki.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

6.1.1 Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor Pertanian merupakan sektor basis yang dominan di Propinsi Sulawesi Tengah karena terdapat di 9 Kabupaten dari 10 Kabupaten/Kota; Sektor Listrik Gas dan Air Bersih, Sektor Bangunan dan sektor Jasa-Jasa terdapat di 2 Kabupaten/Kota; Sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi, sektor Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan terdapat di 3 Kabupaten / Kota; Sektor Industri Pengolahan 6 Kabupaten/Kota dan Sektor Perdagangan Hotel,Restoran 4 Kabupaten/Kota; Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian hanya dimiliki Kota Palu.

Kota Palu mempunyai sektor basis terbanyak dengan 8 sektor basis; dan yang mempunyai sektor basis paling sedikit (2 sektor basis) adalah Kabupaten Morowali, Donggala, Toli-Toli, Buol dan Parigi Moutong.

6.1.2 Hasil Analisis MRP yang di overlay menunjukkan Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah tidak satupun mempunyai potensi daya saing kompetitif dan komparatif atau masuk kriteria pertama bernetasi (+++) untuk ketiga komponen; Sebaliknya terdapat 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Morowali, Donggala, Toli-Toli dan Kabupaten Buol yang memiliki sektor ekonomi yang bernetasi negatif (---) untuk ketiga komponen dengan sektor yang sama yaitu sektor Pertambangan, Penggalian; Sektor Listrik,Gas, Air Bersih; dan sektor Bangunan serta sektor Pengangkutan, Telekomunikasi.

6.1.3 Hasil Analisis Shift-Share di Propinsi Sulawesi Tengah menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat satupun Kabupaten/Kota yang memiliki sektor yang mempunyai keunggulan/daya saing kompetitif, tetapi hanya memiliki spesialisasi.

- Sektor Listrik, Gas, Air Bersih; Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran dan Sektor Jasa-Jasa , mempunyai spesialisasi di 6 Kabupaten/Kota;
- Industri Pengolahan; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; mempunyai spesialisasi di 5 Kabupaten
- Sektor Pertanian; Sektor Pertambangan dan Penggalian spesialisasi di 4 Kabupaten
- Sektor Bangunan; mempunyai spesialisasi di 2 Kabupaten.

Tidak semua sektor basis di Kabupaten/Kota mempunyai spesialisasi demikian pula sebaliknya tidak semua yang masuk kriteria spesialisasi belum tentu sebagai sektor basis.

6.1.4. Berdasarkan Tipologi Klassen dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah tidak terdapat satupun Kabupaten/Kota yang masuk dalam Tipologi Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh (klasifikasi I) serta Tipologi Daerah Berkembang Cepat (klasifikasi III). Tipologi Daerah Maju Tapi Tertekan (klasifikasi II) mencakup Kabupaten Banggai; Toli-Toli dan Kota Palu, sedangkan 7 Kabupaten lainnya masuk pada Tipologi Daerah Relatif Tertinggal

meliputi Kabupaten Banggai Kepulauan; Morowali, Poso, Donggala, Buol; Parigi Moutong dan Kabupaten Tojo Una-Una.

6.1.5. Menentukan Prioritas Pengembangan Wilayah berdasarkan analisis LQ, Shift-Share, Tipologi dan Pertumbuhan Sektoral maka dapat ditentukan Kabupaten / Kota yang menjadi prioritas pengembangan masing- masing sektor. Prioritas pertama untuk sektor pertanian adalah Kabupaten Banggai Kepulauan, Poso, Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong; Sektor Pertambangan dan Penggalian di Kota Palu; Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Donggala, Buol dan Kabupaten Tojo Una-Una; Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih di Kabupaten Tojo Una-Una; Sektor Bangunan di Kabupaten Tojo Una-Una; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Kabupaten Banggai Kepulauan, Poso, Donggala dan Kota Palu; Sektor Angkutan dan Komunikasi di Kabupaten Poso; Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan di Kabupaten Tojo Una-Una dan untuk Sektor Jasa-jasa diprioritaskan pengembangannya di Kabupaten Tojo Una-Una.

Khusus Kabupaten Tojo Una-Una merupakan Kabupaten yang masuk dalam prioritas pertama untuk Pengembangan wilayah semua sektor basis yang dimilikinya ( 6 sektor ).

## **6.2 Saran – Saran**

6.2.1 Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan kebijakan pembangunan dengan prioritas sektor unggulan/basis di masing-masing kabupaten/kota, dengan tetap memperhatikan sektor non basis secara proporsional.

- 6.2.2. Perlu mengenal secara baik daerah yang mempunyai potensi ekonomi spesialis (PES) dan potensi ekonomi rendah (PER), agar bijak dalam menentukan skala prioritas pembangunan, sehingga dapat merubah posisi Kabupaten/Kota masuk pada tipologi daerah yang lebih baik atau meminimalisir keberadaan kabupaten-kabupaten pada tipologi daerah tertinggal.
- 6.2.3 . Perlu melakukan revitalisasi semua sektor dimulai dari sektor yang memiliki nilai  $LQ > 1$  kemudian  $LQ < 1$ , serta memacu peningkatan produktifitas dan profesionalitas dalam mengelola sektor-sektor potensial agar mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah baik Kabupaten/Kota maupun Propinsi.
- 6.2.4. Bagi investor yang ingin berinvestasi di Propinsi Sulawesi Tengah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam memperhatikan sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan serta prioritas pengembangan masing-masing sektor di Kabupaten/Kota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armida.,S.Alisyahbana (2000). **Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah**: Makalah disampaikan pada kongres ISEI XIV, 21-23 April, di Makasar.
- Bachrul Elmi (2004). Studi Pembiayaan Pembangunan Perkotaan (urban development finance) Kota Prabumulih, **Kajian Ekonomi dan Keuangan.**, Vol.8, No.1. Maret.
- Bendavid-Val., Avrom (1991). **Regional and Local Economic Analysis for Practitioners**, Fourth edition, New York: Prager Publisher.
- Badan Pusat Statistik (2001). **Sulawesi Tengah Dalam Angka**. Provinsi Sulawesi Tengah.
- Badan Pusat Statistik, (2001-2005). **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha**. Provinsi Sulawesi tengah.
- Badan Pusat Statistik, (2004) *Statistical Yearbook of Indonesia 2004*. Jakarta.
- Binar Rudatin (2003). **Analisis Sektor Basis Dalam Rangka Pengembangan Pembangunan Wilayah Studi Kasus Kabupaten-Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 1996-2001**. (Tesis S2, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang., Tidak dipublikasikan).
- Boediono (1985). **Teori Pertumbuhan Ekonomi.**, Yogyakarta, BPFE-UGM.
- Elia Radianto (2003). Evaluasi Pembangunan Regional Pasca Kerusakan di Maluku. **Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia**. Vol. 51 (4) hal. 479-499.
- Fuad Asaddin dan Faried W.Mansoer (2001). Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja: Terapan Model Kebijakan Prioritas Sektoral Untuk Kalimantan Timur. **Jurnal Riset Akuntansi, manajemen, Ekonomi** Vol 1. No.1, Februari 2001 hal. 89-103.
- Glasson John (1990). **Pengenalan Perancangan Wilayah Konsep dan Amalan** (alih bahasa Ahris Yaakup). Dewan bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia Kualalumpur.

- Hairul Aswandi dan Mudrajat Kuncoro (2002). Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia**. Vol. 17. No 1. 2002.
- Hoover., E.M. (1971). *An Introduction to Rergional Economics*. (1 st ed.). New York: Alfred A.Knopf, Inc.
- Krugman.,P. (1998). *Space : The Final Frontier. Journal of Economic Perspectivee*, 12 (2)
- Kustiawan dan Iwan (1997). Permasalahan Konvensi Lahan Pertanian dan Implikasinya Terhadap Penataan Ruang Wilayah (Studi Kasus Wilayah Pantura Jawa Barat). **Jurnal PWK**. Vol.8. No.1.
- Latif Adam. (1994). Aplikasi Model Shift-Share Analysis di Provinsi Sulawesi Utara. **Jurnal Ekonomi dan Pembangunan**. Vol.II. No.1. The Indonesian Institute of Sciences (PEP-LIPI) Jakarta.
- Lincolyn Arsyad, (1999). **Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah**, Edisi Pertama, BPFE – UGM, Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro (2000). **Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan** (1 st ed.). UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro (2002). **Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kalster Industri Indonesia**. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Nudiatulhuda Mangun, (2001). Perempuan Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Pasca Konflik, **Jurnal Perempuan**, Edisi 29, Jakarta.
- Prasetyo Soepono (2001). Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (ekspor) Posisi dan Sumbangannya bagi Perbendaharaan Alat-alat Analisis Regional. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia**. Vol.16 No.1.
- Prasetyo Soepono (1993). Analisis Shft-Share: Perkembangan dan Penerapan. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia**. Vol 1 Tahun VIII.
- Rahardjo Adisasmita (2005). **Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah**. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Riachardson Harry.,W. (1977). **Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional**. (terjemahan: Paul Sitohang). LPFE-UI. Jakarta.
- Robinson T (2005). **Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi**. Bumi Aksara. Jakarta.
- Rusli Ghalib (2005). **Ekonomi Regional**. Pustaka Ramadhan. Bandung.

- Sjafrizal (1997). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. **Prisma. LP3ES** No.3 Tahun XXVI. Jakarta.
- Soeparmoko (2002). **Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**. Edisi pertama. Andi. Yogyakarta.
- Todaro.,M.P (1997). *Economic Development*. Six Edition. Edinbourg Gate Harlow Addition Wesley Longman. New York University.
- Todaro.,M.P. (2000). *Economic Development* (7<sup>th</sup> ed.) New York; Addition Wesley Longman, Inc.
- Yusuf Maulana (1999). Model Ratio Pertumbuhan (MRP) sebagai salah satu alat Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota. **Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia**. Vol XLVII No.2.